

## 2. STUDI LITERATUR

Bab 2 akan berisi mengenai Studi Literatur yang akan menghadirkan konsep-konsep dasar, Tinjauan Pustaka serta kerangka teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan utama tesis ini mengenai kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap Ketahanan Nasional Indonesia di bidang Pertahanan dan Keamanan Periode 1994-2006. Pemaparan pada Bab II akan dimulai dengan penjelasan mengenai kerangka pemikiran tentang keamanan kawasan (*regional security*) yang akan menjadi landasan teori untuk menjelaskan kontribusi ASEAN Regional Forum bagi ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan periode 1994-2006. Kemudian secara lebih khusus akan dijelaskan pula norma-norma ASEAN seperti ASEAN Way dan *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) yang digunakan untuk menjelaskan mekanisme ARF. Pada bagian kedua akan dibahas kerangka teori secara khusus yang akan dipergunakan dalam proses analisis permasalahan mengenai ARF dan korelasinya dengan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan Periode 1994-2006 yaitu teori ketahanan nasional, teori ketahanan regional dan teori keamanan kooperatif (*cooperative security*).

Pada Bagian terakhir dari Bab 2 akan dihadirkan Tinjauan Pustaka berupa tiga tulisan dalam Jurnal Ilmiah yang pernah mengangkat topik mengenai esensi dan Perkembangan *ASEAN Regional Forum* Pencantuman Tinjauan Pustaka dalam Studi Literatur dimaksudkan sebagai bahan perbandingan penelitian yang pernah ada mengenai *ASEAN Regional Forum* namun dari sudut pandang yang berbeda dengan Tesis ini yang lebih menghubungkan kontribusi *ASEAN Regional Forum* terhadap ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan Sepanjang periode tahun 1996-2004.

## 2.1. Pengertian Keamanan Kawasan (*Regional Security*)

Menurut Barry Buzan, dalam terminologi keamanan, kawasan diartikan sebagai bagian dari hubungan keamanan yang secara terarah dan signifikan muncul di antara negara-negara yang berada dan “terkunci” di dalam kawasan tersebut.<sup>31</sup> Lebih lanjut Barry Buzan menjelaskan bahwa di dalam menjelaskan keamanan kawasan maka terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu pola permusuhan dan persahabatan (*amity and enmity*) dan kompleksitas keamanan (*security complex*) yang diartikan sebagai kondisi dimana adanya ketergantungan keamanan di antara negara-negara dalam kawasan sehingga keamanan nasional negara-negara tersebut tidak dapat dilepaskan dari negara-negara tetangga di kawasan. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari kondisi anarki dalam sistem internasional. Kondisi tersebut memunculkan perasaan saling curiga dan kekhawatiran di antara negara-negara dalam kawasan.<sup>32</sup>

Karena itulah dalam upaya mengelola keamanan kawasan, maka dibutuhkan kerjasama keamanan di antara negara-negara di dalam suatu kawasan. Sehingga kawasan tersebut dapat menjadi kawasan yang stabil dan damai juga terciptanya ketahanan regional. Dalam upaya melakukan pengaturan keamanan kawasan maka muncul beberapa konsep yang kemudian akan dipakai sebagai konsep dasar dalam memahami kemunculan dari ASEAN Regional Forum dan bagaimana Forum keamanan di kawasan Asia Pasifik tersebut dapat memberikan kontribusi bagi ketahanan nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang periode 1994-2006.

Konsep yang pertama adalah mengenai Institusi Keamanan. Institusi keamanan dapat diartikan sebagai :<sup>33</sup>

- a. *Like all institutions security institutions have the general function of influencing the action members towards continuing cooperation by installing accepted rules of behaviour despite competing interests.* (Seperti halnya dengan institusi lain, institusi keamanan memiliki fungsi umum untuk mempengaruhi aksi anggota menuju pada kerjasama yang berkelanjutan

<sup>31</sup> Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post Cold War Era* 2nd Edition (New York : Harvester Wheatsheaf, 1990), p. 188

<sup>32</sup> *Ibid*, p.189-191

<sup>33</sup> *Ibid.*, p.124.

melalui sosialisasi aturan main yang dapat membentuk sikap untuk menghindari kepentingan berkompetisi).

- b. *In addition, security institutions have the specific function of facilitating cooperation among their members in the provision of security that is territorial integrity, political self-determination and economic well being, against any military threat* (Lebih lanjut bahwa institusi-institusi keamanan memiliki fungsi yang spesifik dalam memfasilitasi kerjasama di antara anggota dalam menjamin kondisi keamanan yang berkaitan dengan integritas wilayah, hak menentukan kebijakan politik secara mandiri, kesejahteraan ekonomi dan menentang ancaman militer).

Kemudian konsep yang kedua adalah mengenai kerjasama keamanan multilateral terutama yang dikembangkan pada masa pasca perang dingin yang memiliki tiga asumsi dasar yaitu <sup>34</sup>

1. Perluasan konsep keamanan dimana masalah keamanan tidak dapat dilihat secara terbatas atau unilateral atau juga hanya dipahami dari segi militer semata.
2. Perubahan kondisi keamanan paska perang dingin dimana konsep *enmity dan amity* (permusuhan dan persahabatan) tidak lagi berbasis pada persaingan ideologi melainkan muncul trend baru dalam hubungan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kondisi keamanan di kawasan Asia Pasifik
3. Namun masalah-masalah lama terutama konflik laten terutama tentang perebutan wilayah masih tetap muncul dan tetap harus diantisipasi.

Sehingga secara umum struktur dari kerjasama keamanan multilateral di Asia Pasifik dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mengutamakan penggunaan diplomasi preventif
2. Keberlanjutan dari pertumbuhan ekonomi regional
3. Memelihara kepemimpinan Amerika Serikat di kawasan

---

<sup>34</sup> Hee Kwon Pack, "Multilateral Security Cooperation", *The Pacific Review* Vol. 6 No. 3 1993

Kerjasama keamanan multilateral juga dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan konsultasi lebih dari konfrontasi, menahan diri lebih daripada penangkalan, transparansi atau keterbukaan daripada kerahasiaan, pencegahan lebih daripada kecaman dan saling ketergantungan lebih daripada tindakan unilateralisme.

Konsep berikut yang akan digunakan adalah yang berhubungan dengan mekanisme dari ASEAN Regional Forum yaitu norma-norma ASEAN yang menjadi landasan pengembangan mekanisme dalam ASEAN Regional Forum. Norma pertama adalah Deklarasi Bangkok 1967 yang berintikan hal-hal sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan pembangunan kultural di kawasan melalui pembentukan kerjasama yang dapat mendorong semangat persamaan dan mitra kerjasama yang erat dalam upaya memperkuat perwujudan masyarakat yang sejahtera dan damai di antara bangsa-bangsa Asia Tenggara
2. Mempromosikan stabilitas dan perdamaian di kawasan melalui penghormatan terhadap aturan hukum dan keadilan dalam membangun hubungan di antara negara-negara dalam kawasan dan menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Mempromosikan kerjasama yang aktif dan timbal balik dalam melaksanakan kepentingan umum di bidang ekonomi, sosial, kultural, teknis, ilmu pengetahuan dan administrasi.
4. Saling membantu dalam penyediaan fasilitas pelatihan dan penelitian di bidang pendidikan, profesi, teknis dan administrasi.
5. Membangun kerjasama secara lebih aktif dalam upaya memanfaatkan hasil-hasil pertanian dan industri, memperluas perdagangan kawasan termasuk melakukan studi bersama dalam upaya mengatasi permasalahan dalam perdagangan internasional, peningkatan fasilitas transportasi dan komunikasi dan peningkatan standar hidup dari masyarakat di kawasan ASEAN.
6. Mempromosikan Studi tentang Asia Tenggara.
7. Memelihara kerjasama secara lebih erat dan saling menguntungkan dengan sejumlah organisasi inetrnasional dan regional lainnya yang memiliki tujuan yang sama dan

---

<sup>35</sup> Lihat Isi Deklarasi Bangkok dalam Solidum, *op.cit.*

memperdalam kesempatan untuk membangun kerjasama yang lebih erat dengan organisasi tersebut.

Di samping berlandaskan pada isi Deklarasi Bangkok, mekanisme yang dikembangkan oleh ASEAN Regional Forum juga berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada pada *Treaty of Amity and Cooperation (TAC)* 1976 yaitu :<sup>36</sup>

1. *Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity and national identity by the following fundamental principles*
2. *The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversive or coercion*
3. *Non-Interference in the internal affairs of one another ;*
4. *Settlement of differences or disputes by peaceful means*
5. *Renunciation of the threat or use of force*
6. *Effective cooperation among themselves.*

Konsep yang ketiga sebagai landasan mekanisme ASEAN Regional Forum adalah *ASEAN Way*. Kendati secara formal ASEAN telah merumuskan TAC sebagai norma yang akan mendasari proses interaksi dan mekanisme hubungan dalam ASEAN, namun ASEAN juga mengembangkan suatu budaya politik yang dikenal sebagai *ASEAN Way*. Menurut Kao Kim Hourn yang menganalisis keterlibatan ASEAN dalam proses penyelesaian konflik di Kamboja, terdapat setidaknya lima prinsip tidak tertulis yang juga mempengaruhi mekanisme hubungan dalam ASEAN yaitu (1) Berpegang kepada peraturan-peraturan dasar yang tercantum dalam berbagai traktat, deklarasi dan komunike ASEAN, (2) Prinsip menahan diri (*self restraint*) dan mendorong negara anggota lain yang bersengketa untuk menurunkan ketegangan dengan mengutamakan kestabilan kawasan, (3) Prinsip musyawarah dan mufakat, (4) Mediasi pihak ketiga dalam manajemen konflik dan (5) Menyepakati ketidaksepakatan dengan menunda agenda yang gagal disepakati hingga situasi untuk mendiskusikannya kembali dimungkinkan.<sup>37</sup>

Konsep *ASEAN Way* sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1974 oleh Jendral Ali Moertopo, pejabat intelejen senior Indonesia. Ali Moertopo menyatakan bahwa keberhasilan sistem konsultasi ASEAN itulah yang disebut *ASEAN Way*. Sistem konsultasi yang dimaksud di sini adalah mengutamakan konsensus dan informalitas.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Collins, *op.cit.*, p. 114.

Sementara Menteri Luar Negeri Singapura S. Jayakumar pada 1997 mengemukakan bahwa *ASEAN Way* mengacu pada informalitas, minimalisme organisasi dan inklusivitas, konsultasi intensif menuju konsensus dan resolusi damai dalam penyelesaian persengketaan.<sup>38</sup>

Dalam ASEAN, pengambilan keputusan memang dilakukan dengan konsensus yang ketat dalam upaya memberikan jaminan kepada negara terlemah apabila tidak menyetujui suatu kebijakan tidak akan dipaksa untuk menerapkan kebijakan tersebut. ASEAN juga menghindari proses institusionalisasi kebijakan dan perjanjian formal dan lebih menyukai *private diplomacy* dengan mengandalkan hubungan kedekatan personal di tingkat pejabat, menteri dan pemimpin negara. *Private diplomacy* ini merupakan pertemuan atau pembicaraan formal antar pejabat negara-negara ASEAN yang biasanya dilakukan secara diam-diam (*quiet diplomacy*) Hasil dari komunikasi diplomasi diplomasi informal ini biasanya memang tidak dipublikasikan. Selain itu ASEAN juga mengembangkan *track two diplomacy* yang merupakan pertemuan informal yang difasilitasi *non-state actor*.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui *ASEAN Way*, ASEAN memang terbiasa menerapkan aturan main yang longgar dan sebatas kepentingan tingkat elit pemerintahan daripada suatu kerangka acuan yang ketat. Terlebih karena ASEAN memang didirikan melalui Deklarasi tanpa suatu Charter yang ketat. Secara lebih terperinci *ASEAN Way* dikaitkan dengan karakter proses pengambilan keputusan ASEAN :<sup>39</sup>

1. *the search for compromises acceptable to all (musyawarah).*
2. *consensus principle (mufakat)*
3. *private talks (empat mata)*
4. *extensives unofficial exploratory talks with all parties involved before initiatives are formally launched (feeler technique)*
5. *a sense of community spirit (gotong royong)*
6. *decent and modest behaviour (nobody leads principle) and*
7. *the search for a general agreement, even if there is yet no common understanding concerning the specifics of its realization (agreeing first, details later).*

---

<sup>38</sup> Acharya, *op.cit.*, p. 63

<sup>39</sup> Heller, *op.cit.*, p. 128

Hal ini sejalan dengan pandangan Michael Vatikiotis yang mengatakan bahwa karakteristik ASEAN merupakan kombinasi antara kesatuan dengan keberagaman. Dalam posisi tersebut ASEAN memang tidak mengarahkan dirinya kepada suatu bentuk kesatuan. Namun sebaliknya kehadiran ASEAN justru memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pembangunan negara anggota kepada suatu bentuk negara berdaulat yang nyata dan kokoh.<sup>40</sup> Sementara Alan Collins berpendapat bahwa ASEAN adalah kumpulan dari negara yang memiliki karakteristik beragam. Hal ini dapat dilihat tidak saja dari penampilan fisik geografis, komposisi etnis, kondisi sosial kultural, identitas negara anggota, pengalaman kolonial dan juga kondisi politik domestik.<sup>41</sup>

Karakter tersebut berpengaruh kepada proses perumusan kebijakan di tingkat organisasi. Dimana ASEAN lebih memilih pola konsultasi dan konsolidasi dalam mencapai suatu konsensus. Namun tetap tidak mencampuri kebijakan domestik suatu negara. Namun apabila kebijakan tersebut berpengaruh pada hubungan intra kawasan ASEAN dapat memberikan penawaran untuk menyelesaikan di tingkat organisasi namun tidak tanpa konsesi khusus. Dalam arti negara anggota tetap memiliki hak untuk memilih apakah akan membahas masalah tersebut di tingkat institusi atau menyelesaikan berdasarkan kepentingan masing-masing negara anggota. Dalam Deklarasi Bangkok pun tidak pernah disebutkan aturan main yang berkaitan dengan proses perumusan kebijakan dalam ASEAN.

Merujuk kepada pandangan Rizal Sukma dari CSIS Jakarta maka dalam proses perumusan kebijakan, ASEAN dapat dianggap sebagai sebuah Komunitas Diplomatik. Hal ini dikarenakan adanya tiga fungsi yang dijalankan ASEAN selama ini yang menunjukkan kemampuan untuk menghindari dan mengelola konflik intra-ASEAN; kemampuan untuk mengelola tatanan regional melalui keberhasilan mengelola konflik intra-ASEAN dan kemampuan untuk mengambil posisi bersama dan mengartikulasikan posisi tersebut secara lancar dan tegas.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Michael R.J. Vatikiotis, *Political Change in Southeast Asia* (New York : Routledge, 1998), p. 176

<sup>41</sup> Alan Collins, *op.cit.*, p. 47.

<sup>42</sup> Rizal Sukma, "ASEAN Sebagai Komunitas Diplomatik Peran, Tugas dan Strategi" dalam Bantarto Bandoro (ed.), *op.cit.*, h. 57

Sedangkan menurut Alan Collins, ASEAN cukup berhasil memainkan peranannya dalam mengelola dilema keamanan kawasan (terutama dalam menghadapi konflik di Indochina) dikarenakan pelaksanaan tiga prinsip utama yaitu pola pengambilan keputusan yang berdasarkan konsensus, kemudian penerapan *swept under the carpet* yang berarti bahwa apabila terdapat masalah konflik intra-ASEAN yang tidak berhasil mencapai keputusan secara konsensus, maka negara-negara anggota lebih suka menyimpan masalah tersebut; serta kemampuan untuk mengutamakan kepentingan ASEAN serta menjaga harmonisasi hubungan dalam institusi lebih dari upaya untuk menonjolkan kepentingan masing-masing negara anggota.

## **2.2. Kerangka Teori untuk menganalisis kontribusi ASEAN Regional Forum terhadap Ketahanan Nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan sepanjang kurun waktu 1994-2006.**

### **2.2.1. Keamanan kooperatif (*cooperative security*)**

Keamanan kooperatif atau *Cooperative Security* adalah pendekatan yang dikembangkan oleh Kanada dan Australia pada awal dekade 90-an dalam upaya untuk mencari format baru pengelolaan keamanan kawasan untuk menjawab perubahan-perubahan kondisi keamanan internasional sebagai dampak dari runtuhnya sistem bipolar dan bubarnya salah satu negara adidaya Uni Soviet. Hal ini dikarenakan pada masa pasca Perang Dingin muncul harapan untuk lebih mengelola kondisi keamanan tidak hanya sebatas mengantisipasi terjadinya perang namun juga bagaimana membangun nilai-nilai bersama secara internasional untuk mencapai stabilitas perdamaian dan perdamaian jangka panjang.<sup>43</sup>

Sebenarnya konsep tersebut pertama kali muncul sebagai topik dari Pacific Basin Symposium yang diadakan pada tahun 1988 atau masih dalam suasana perang dingin yaitu mengenai *security cooperation*. Kemudian muncul tulisan John Steinburner yang secara lebih substantif mengangkat konsep

<sup>43</sup> David Dewitt, "Common, Comprehensive and Cooperative Security", *Pacific Review*, Vol. 7 No. 1 (1994) p. 2-3

*cooperative security* untuk membedakan dengan konsep *common security* yang lebih dahulu muncul melalui Palme Commission 1975 yang berupaya untuk meminimalisir ketegangan Timur-Barat pada masa perang dingin. Pada intinya konsep *cooperative security* dari Steinburner menggarisbawahi pentingnya untuk membangun stabilitas strategis antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang juga akan berpengaruh terhadap keamanan Eropa. Steinburner kemudian mengembangkan pemikirannya tentang *cooperative security* dalam sejumlah workshop dan seminar bersama dengan pakar strategi keamanan AS lainnya yang kemudian ketika dunia memasuki masa paska perang dingin menjadi alternatif pilihan yang dominan dalam upaya mengelola perubahan kondisi keamanan di kawasan Asia Pasifik.<sup>44</sup>

Sementara itu pakar keamanan Asia Pasifik lainnya Harry Harding dalam tulisannya mengenai *Global Engagement : Cooperative Security in the Asia Pasific* menggarisbawahi bahwa konsep *cooperative security* adalah konsep yang sensitif terhadap isu militer maupun non-militer. Harding kemudian mengangkat contoh kasus yang dianggap merupakan penerapan secara nyata dari *cooperative security* yaitu forum dialog yang dikembangkan oleh ASEAN Regional Forum dan *Council for Security Cooperation on Asia-Pacific (CSCAP)* yang juga sebagai bagian dari ASEAN Regional Forum yang merupakan pertemuan antara *first track* dan *second track*.<sup>45</sup>

Teori tentang *cooperative security* secara lebih spesifik sebenarnya merujuk pada upaya untuk membangun pengertian keamanan secara lebih luas dan timbal balik dalam upaya mewujudkan jaminan keamanan dalam jangka waktu lama lebih dari sekedar upaya untuk melakukan tindakan penangkalan terhadap ancaman pihak lawan. Karena itulah konsep *cooperative security* berusaha untuk mengkonstruksi pemikiran sebelumnya mengenai *security against adversary or enemy* atau dalam upaya menjamin keamanan maka lawan harus dihadapi dengan perlawanan (mengggunakan kekuatan militer) dengan pendekatan baru yang lebih bersifat *security with enemy* atau mengelola keamanan kawasan

<sup>44</sup> David Capie and Paul Evans, *The Asia-Pacific Security Lexicon* (Singapore : Institute of Southeast Asia Studies, 2007), p. 105.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 110

dengan merangkul pihak musuh atau pesaing melalui dialog keamanan multilateral.<sup>46</sup>

Pendekatan melalui *partnership security dialogue with enemy or adversary* diharapkan dapat meningkatkan interdependensi dalam masalah pengelolaan keamanan kawasan serta menciptakan *confidence and security-building measures (CBMs)* dan proses transparansi dalam kekuatan militer. Hal ini dibutuhkan agar negara-negara dalam kawasan senantiasa dapat mengartikulasikan kepentingan keamanan mereka secara bersama tanpa dilandasi rasa saling curiga namun sebaliknya bersama-sama memfasilitasi kebutuhan untuk mengelola keamanan kawasan tidak dengan menggunakan tindakan koersif atau melalui penggunaan kekuatan militer secara agresif dan provokatif. Pada prinsipnya *cooperative security* memfokuskan diri pada upaya untuk melindungi negara dari konflik antar negara dan juga memfasilitasi kebutuhan untuk mempertahankan status quo di kawasan maupun di dalam negara. Konsep *cooperative security* juga dapat digunakan untuk mengelola masalah keamanan individu maupun kelompok dalam negara. Karena itulah *cooperative security* juga memasukkan unsur diplomasi preventif dalam menyelesaikan masalah keamanan.<sup>47</sup>

Konsep *cooperative security* juga mengkombinasikan komponen militer dan non-militer dalam langkah-langkah pengelolaan keamanan bersama. Karena itulah langkah-langkah dalam pelaksanaan pengelolaan keamanan kawasan dengan pola *cooperative security* juga mengembangkan pola *multi track dialogue* yang tidak saja melibatkan aktor negara namun juga aktor non-negara khususnya kelompok akademisi dan komunitas epistemis.<sup>48</sup>

### 2.2.2. Ketahanan Regional

Ketahanan regional adalah merupakan suatu disiplin ilmu baru yang dikembangkan oleh R.M. Sunardi, yang berangkat dan di dasarkan atas kesamaan konseptual dengan teori Ketahanan Nasional. Artinya unsur dasarnya adalah sama,

<sup>46</sup> Craig A. Snyder, "Regional Security Structures" dalam Craig A. Snyder (Ed.), *Contemporary Security and Strategy* (London : Deakin University, 1999), p. 114.

<sup>47</sup> *Ibid.*, p. 115

<sup>48</sup> Dewitt, *loc.cit.*

yaitu keuletan dan ketangguhan. Namun terdapat perbedaan antara pengertian ketahanan nasional dengan ketahanan regional. Ketahanan Nasional lebih memfokuskan kepada ketahanan internal suatu negara, artinya Ketahanan Nasional merupakan suatu kondisi yang dinamis dari suatu bangsa yang berisikan keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, di dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman, hambatan, serta gangguan, baik yang datangnya dari luar maupun dari dalam, yang langsung, maupun yang tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan perjuangan nasionalnya.

Sedangkan Ketahanan Regional adalah Ketahanan dalam pengertian yang lebih luas, yaitu merupakan kondisi yang dinamis dari Kawasan/Regional yang bersangkutan, yang berisikan keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan regionalnya, artinya mencakup keseluruhan kepentingan negara-negara yang ada di dalam kawasan tersebut di dalam menghadapi segala macam bentuk tantangan, gangguan, hambatan dan ancaman, terutama sekali yang datangnya dari luar kawasan <sup>49</sup>

Di samping itu ketahanan regional sangat ditentukan oleh derajat kemitraan antar negara-negara dalam kawasan yang sama. Derajat kemitraan ini pada gilirannya mengandung unsur saling percaya dan saling mengakomodasikan kepentingan negara lain sekawasan. Karena itulah Ketahanan Regional pada dasarnya mengedepankan *balance of interest*. <sup>50</sup>

### 2.2.3. Ketahanan Nasional

Istilah ketahanan nasional sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1948 yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno dalam amanat dan kursus-kursus politik di Aceh pada tanggal 16 Juni 1948. Dalam pidatonya Presiden Soekarno menyatakan apabila satu bangsa ingin menjadi bangsa yang besar dan kuat maka bangsa itu harus memenuhi tiga syarat yaitu harus mempunyai tiga macam Ketahanan nomor

<sup>49</sup> R.M. Sunardi, *op.cit.*, h. 69

<sup>50</sup> *Ibid.*

satu adalah ketahanan militer, ketahanan nomor dua ketahanan ekonomi dan ketahanan nomor tiga ketahanan jiwa.

Berdasarkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978/1983/1988 rumusan Ketahanan Nasional adalah sebagai berikut :

1. *Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dan kondisi tiap-tiap aspek dari kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya Ketahanan Nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjadi kelangsungan menuju kejayaan bangsa dan negara.*
2. *Untuk tetap memungkinkan berjalannya Pembangunan Nasional yang selalu harus menuju ketujuan yang ingin kita capai dan agar dapat secara efektif dielakkan hambatan-hambatan, tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman dan gangguan yang timbul, baik dari luar maupun dari dalam perlu dipupuk terus menerus ketahanan nasional yang meliputi segala aspek kehidupan bangsa dan Negara.*
3. *Berhasilnya Pembangunan Nasional akan meningkatkan Ketahanan Nasional. Selanjutnya Ketahanan Nasional yang tangguh akan lebih mendorong bagi Pembangunan Nasional.*

Sedangkan menurut GBHN 1993 rumusan Ketahanan Nasional adalah :

1. *Untuk tetap meningkatkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai dan agar dapat secara efektif dielakkan dari hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan yang timbul baik dari luar maupun dari dalam, maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional keterpaduan antara segala aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh.*
2. *Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Berhasilnya pembangunan nasional akan meningkatkan ketahanan nasional. Selanjutnya ketahanan nasional yang tangguh akan lebih mendorong pembangunan nasional.*
3. *Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan pertahanan keamanan.*

Sedangkan menurut R.M. Sunardi dalam Buku *Pembinaan Ketahanan Bangsa*, definisi Ketahanan Nasional ditinjau dari pendekatan makro adalah :<sup>51</sup>

*Berdasarkan pandangan makro definisi ontologi dari ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu mengembangkan kekuatan nasional di dalam mengatasi dan menghadapi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas dan kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan pembangunan nasional.*

*Implisit dalam definisi ontologi tersebut adanya pengakuan bahwa apabila dilihat dari dalam, ketahanan nasional tergambar dalam kualitas keuletan dan ketangguhan masyarakat bangsa, akan tetapi apabila dilihat dari luar ia akan berkesan sebagai bentuk kekuatan nasional. Karena sifat lahirnya yang mengesankan sebagai kekuatan itulah maka ketahanan nasional secara strategis berperan sebagai satu strategi penangkalan nasional dengan maksud menangkal kekuatan lain yang membahayakan bangsa dan negara.*

R.M. Sunardi kemudian menambahkan bahwa :

*Sistem penangkalan ditujukan untuk meniadakan keinginan pihak lain untuk berbuat sesuatu yang merugikan apapun juga akibatnya. Dalam keadaan dimana musuh telah menjadi virtual, maka sistem penangkalan terhadapnya harus pula bersifat virtual. Di sinilah relevansi dari Ketahanan Nasional pada masa kini maupun pada masa mendatang. Oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila di bidang strategi pada saat ini dikembangkan pula pemikiran yang berorientasi pada kemitraan seperti misalnya “participative security” atau “defense partnership” yang pada hakikatnya ditujukan pada satu pengaturan yang memiliki derajat keuletan yang dapat diandalkan.*

Dalam kaitannya dengan pembentukan peran Indonesia dalam ASEAN Regional Forum maka yang dimaksud dengan *participative security* atau *defense partnership* adalah kemampuan Indonesia untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengelola keamanan kawasan termasuk membentuk kemitraan untuk bersama-sama melakukan pengembangan pertahanan dengan dasar membangun kepercayaan bersama. Dalam ARF bentuk dari pengelolaan keamanan yang bersifat partisipatif adalah

<sup>51</sup> R.M. Sunardi, *op.cit.*, h. 63

publikasi buku putih pertahanan oleh negara-negara partisipan ARF termasuk juga upaya untuk melakukan transparansi dalam pengembangan kekuatan pertahanan. Misalnya melalui pemberitahuan kepada seluruh negara partisipan ARF apabila akan diadakan latihan perang maupun kerjasama militer yang lebih intens antar negara partisipan. Serta membuka kesempatan kepada negara lain untuk menjadi observer dalam latihan perang maupun untuk ikut aktif dalam mengembangkan kerjasama di bidang pertahanan namun tetap dalam kerangka pengembangan rasa saling percaya.

*Sistem penangkalan yang bersifat virtual tersebut digelar dalam ruang negara dan oleh karenanya merupakan satu bukti bahwa Ketahanan Nasional tidak lain adalah satu geostrategi yang sudah barang tentu sangat sarat bermuatan dengan kesadaran akan konsepsi ruang. Setelah runtuhnya tembok Berlin bertepatan pula dengan proses globalisasi, sangat dirasakan bahwa Ketahanan Nasional saja belum cukup untuk menjamin adanya perlindungan yang kokoh dan efektif terhadap pembangunan nasional. Diperlukan perlindungan tambahan atas sistem penangkalan nasional, yaitu yang berupa Ketahanan Regional yang menyempit sistem penangkalan terdapat yaitu Ketahanan Nasional. Bagi Indonesia yang paling vital adalah Ketahanan Regional ASEAN karena kawasan tersebut secara langsung berbatasan dengan wilayah negara RI. Karena itulah maka Ketahanan Nasional makro sebagai satu geostrategi benar-benar terapkan dalam politik pertahanan untuk membina hubungan dan kerjasama bilateral maupun regional*

*Karena itulah maka Ketahanan Nasional makro sebagai suatu geostrategi benar-benar terapkan dalam politik pertahanan untuk membina hubungan dan kerjsamasama bilateal maupun regional. Walaupun nampak dari luar dapat saja dipersepsikanj sebagai suatu bentuk kekuatan, namun pada dasarnya merupakan suatu konsepsi kemitraan karena dalam mewujudkan ketahanan itu harus terjalin interaksi positif antar entity negara atau unsur negara di dalam kawasan yang sama. Kita lihat bersama pada era tahun 90-an dan seterusnya prinsip kemitraan telah menjadi paradigma hubungan internasional. Perlu diingat bhawa interaksi positif antar entity ini sesungguhnya merupakan bentuk anatomi dari asas kekeluargaan ataupun asaa persatuan an kesatuan yang diaplikasikan secara luwes sesuai kondisi.*

Dalam menganalisis keterkaitan antara ASEAN Regional Forum (ARF) dengan ketahanan nasional Indonesia, maka secara spesifik hanya akan ditinjau dari segi gatra

pertahanan dan keamanan negara (Hankamneg) sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengembangan ARF.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional, maka RM Sunardi menggarisbawahi dua unsur penting yaitu keuletan dan ketangguhan. Sehingga pembinaan keuletan dan ketangguhan bangsa pada dasarnya merupakan kegiatan yang eksplisit dari pembinaan Ketahanan Nasional. *Terdapat empat kegiatan pokok yang terpadu yaitu : (1) mempertahankan kondisi keuletan dan ketangguhan yang telah tercapai; (2) memantapkan kondisi keuletan dan ketangguhan yang telah terapai; (3) meningkatkan kondisi yang belum baik atau belum mantap; serta (4) penanggulangan Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan yang mempengaruhi kondisi keuletan dan ketangguhan.*

Untuk aspek pertahanan dan keamanan negara maka bentuk pembinaan yang dibutuhkan adalah berupa :

- a. *Pembinaan individu berupa (1) memasyarakatkan upaya Hankam negara agar partisipasi meningkat dan (2) Meningkatkan upaya Pendidikan Pendahuluan Belan Negara (PPBN), (3) Pembinaan apresiasi individu terhadap peranan TNI dan (4) Menggalang animo masyarakat untuk menjadi anggota TNI.*
- b. *Dalam rangka pembinaan masyarakat dalam bentuk (1) Menggalang potensi masyarakat untuk kepentingan dukungan logistik wilayah dan (2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya Hankam dan Binkamtibmas*
- c. *Dalam rangka pembinaan kelembagaan dalam bentuk*
  - (1) *Melaksanakan ketentuan dalam UU No. 20/ 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia kemudian UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan juga UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.*
  - (2) *Pemantapan postur TNI dan postur komponen Hankam negara lainnya*
  - (3) *Pemantapan postur Polri sebagai pembina langsung Kamtibmas*
  - (4) *Dalam rangka pembinaan keterpaduan lintas Gatra berupa keterpaduan dalam perencanaan tingkat nasional maupun daerah dalam masalah upaya Hankam, keterpaduan dalam memonitoring masalah-masalah rawan melalui foru Muspida, dan penjabaran seluruh peraturan perundang-undangan terkait*
- d. *Dalam rangka pembinaan lingkungan*
  - (1) *Menjaga kesiapsiagaan komponen Hankam negara khususnya TNI*
  - (2) *Modernisasi TNI*
  - (3) *Kerjasama regional maupun internasional*

### 2.3. Tinjauan Pustaka

Tulisan dari **G.V.C. Naidu** mengenai “**Multilateralism and Regional Security : Can the ASEAN Regional Forum Really Make A Difference**” yang termuat dalam *Asia Pacific Issues Analysis from the East-West Center No. 45 August 2000* menggarisbawahi dua hal penting dalam perkembangan ARF. Pertama kehadiran ARF yang senantiasa dihubungkan dengan terjadinya perimbangan kekuatan antara tiga kekuatan besar di Asia Pasifik yaitu China-Amerika Serikat dan Jepang. China mendukung ARF dalam upaya mencegah dominasi AS dalam membentuk aliansi Sementara AS melihat ARF sebagai upaya untuk melengkapi penerapan strategi pengembangan kekuatan garis depan dan pengembangan keamanan bilateral. Sedangkan Jepang melihat kesempatan untuk meningkatkan profil politiknya di kawasan tanpa harus menonjolkan hubungan eratnya dengan AS.

Sementara hal penting yang kedua adalah pentingnya Peran ASEAN dalam ASEAN Regional Forum. Karena bagi ASEAN, menawarkan kesempatan untuk mengartikulasikan kepentingan sebagai kekuatan menengah. ASEAN memainkan peran yang krusial dan penting dalam upaya memfasilitasi dialog dan mencegah terjadinya ketidaksepahaman di samping berupaya untuk mempertahankan perimbangan kekuatan sebagai strategi menyeluruh. Kemanan Asia Pasifik dan masa epan dari multilateralisme akan terus berlangsung bergantung secara mendasar pada hubungan di antara kekuatan besar khususnya AS, Cina, Jepang, Rusia, India dan dinamika kekuatan politik di antara negara-negara tersebut.

Namun Naidu juga mengingatkan adanya tantangan yang akan dihadapi ARF di masa mendatang yaitu berupa kendala karena banyak anggota yang tidak ingin mempublikasikan Buku Putih Pertahanan mereka. Termasuk juga figur secara resmi dari anggaran pertahanan. Sehingga masih terdapat hambatan terutama dalam masalah keterbukaan dalam kerjasama pertahanan. Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu proses pengembangan *Confidence Building Meassures* dan juga langkah selanjutnya menuju kepada Diplomasi Preventif.

Tulisan lain yang akan digunakan sebagai tinjauan Pustaka dalam Thesis ini adalah dari **Shaun Narine** mengenai “**ASEAN and The ARF The Limits of the**

**ASEAN Way”**, *Asian Survey* Vol. 37 No. 10 Oct 97. Menurut Narine ARF masih sulit untuk dievaluasi sebab tujuan dan prosesnya terkadang tidak mudah untuk didefinisikan. Karena masing-masing negara partisipan memiliki perbedaan ekspektasi terhadap perkembangan ARF. Negara Barat berharap ARF dapat menyampaikan isu-isu secara langsung dalam kawasan dan memproduksi hasil yang kongkrit dalam area kerjasama militer. Sebaliknya China justru menghindari bentuk yang lebih terlembaga. Sementara ASEAN harus melangkah di antara ketidaksabaran negara Barat untuk mewujudkan ARF sebagai institusi yang terlembaga dan upaya untuk dapat mencegah kecurigaan China terhadap rencana negara-negara Barat tersebut. Karena itulah dalam setiap pertemuan ARF diputuskan untuk tidak mengadakan agenda formal dan pendekatan terhadap isu yang sensitif harus bersifat pendekatan dialog dan bukan konfrontasi.

Hal inilah yang menyebabkan ASEAN kemudian lebih memilih proses konsultatif dengan didorong upaya untuk menciptakan ASEAN mengembangkan teknik untuk mencapai tujuan dalam menggunakan kepentingan simbolis dan pendekatan tidak langsung untuk penyelesaian konflik. ASEAN tidak memiliki kapabilitas untuk menyelesaikan banyak isu di antara negara anggota tetapi memiliki kemampuan untuk memindahkan sejumlah isu sehingga tidak mengganggu masa depan kawasan. Karena itulah ASEAN mengembangkan tiga prinsip utama dalam mengembangkan ASEAN Regional Forum yaitu *restraint*, *respect* dan *responsibility*. *Restraint* atau menahan diri merujuk pada komitmen untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing anggota. Sedangkan *respect* atau penghormatan di antara anggota dilakukan melalui pola hubungan dialog konsultatif yang intensif. Terakhir *responsibility* mengandung arti kemampuan untuk menghormati dan memahami kepentingan negara sesama partisipan. Konsep ASEAN mengenai *flexible consensus* tidak menghendaki kesepakatan yang dipaksakan dari anggota ASEAN sejauh kebijakan kelembagaan tidak mengganggu kepentingan

Sedangkan tulisan dari Dominik Heller mengenai **“The Relevance of the ASEAN Regional Forum (ARF) for Regional Security in the Asia-Pacific”** yang termuat dalam *Contemporary Southeast Asia* 27, No. 1 (2005) menggarisbawahi

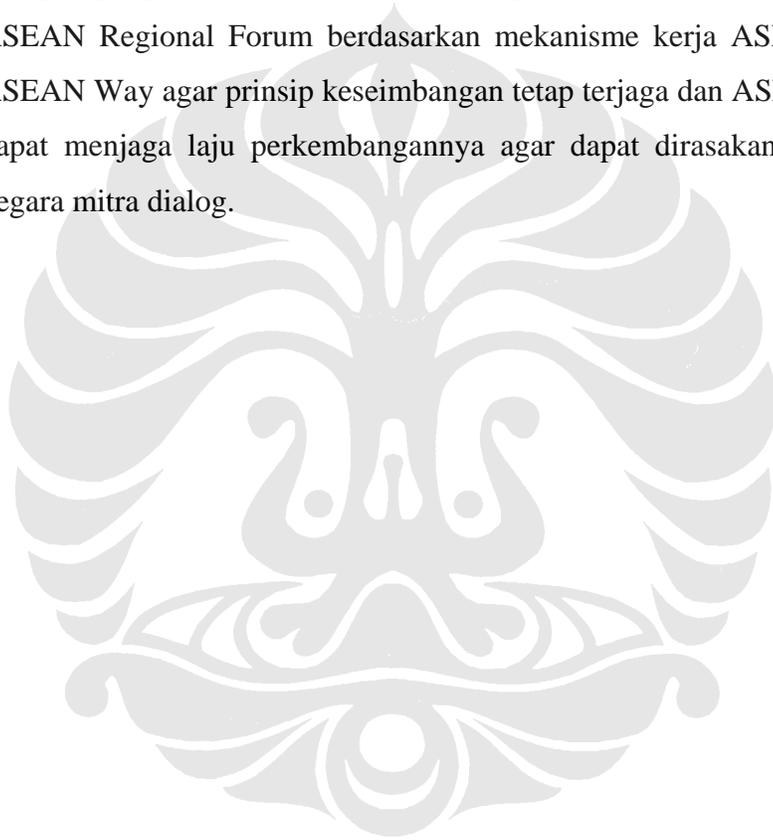
bahwa terbentuknya ASEAN Regional Forum merupakan operasionalisasi dari konsep konstruktivis yang banyak dikembangkan terutama oleh ilmuwan Hubungan Internasional dalam menganalisis kondisi keamanan pada masa pasca perang dingin. Oleh karena di dalam ASEAN Regional Forum terjadi proses pembelajaran nilai-nilai baik berupa pengembangan nilai-nilai dan norma ASEAN khususnya TAC dan ASEAN Way ke tingkat Asia Pasifik maupun pendekatan baru terhadap masalah keamanan melalui dialog konsultatif yang intensif. Namun di sisi lain Heller juga mencatat bahwa keberhasilan penerapan konsep konstruktivis dalam ARF bergantung pada kemampuan ASEAN untuk tetap mempertahankan pola kerja ARF yang lebih berlandaskan pada proses dibandingkan pemaksaan sebuah hasil akhir yang dapat menimbulkan konfrontasi antar negara partisipan.

Di sinilah sebenarnya ASEAN berupaya mengembangkan pola ketahanan regional yang terbukti selama lebih kurang 40 tahun telah membawa kawasan ASEAN kepada kondisi keamanan yang stabil dan dapat menunjang kebutuhan negara untuk meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Namun ASEAN sebagai *driving force* ASEAN Regional Forum tetap harus menghadapi tantangan yang berasal dari keinginan negara-negara Barat untuk membawa ASEAN Regional Forum kepada suatu bentuk yang lebih formal dan legal sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih mengikat terutama dalam upaya mengendalikan China dan juga peran negara-negara Barat yang lebih besar dalam melakukan proses institusionalisasi ARF.

Kemudian **Amitav Acharya** dalam tulisannya mengenai “**Making Multilateralism Work : The ASEAN Regional Forum and Security in the Asia-Pacific**” yang dimuat dalam buku **Amitav Acharya *Regionalism and Multilateralism : Essays on Cooperative Security in The Asia-Pacific*** (Times Academic Press, 2002) secara spesifik menyebutkan kontribusi yang dapat diberikan ARF terhadap pengelolaan keamanan regional tercakup dalam tiga langkah penting yaitu (1) dengan mempromosikan transparansi dalam intensitas strategis dan juga persepsi ancaman, (2) melalui pembangunan rasa saling percaya dan pemahaman bersama terhadap pelaksanaan pengembangan kekuatan militer yang dilakukan negara partisipan serta (3) melalui pengembangan kebiasaan untuk

melakukan kerjasama yang akan memfasilitasi proses penyelesaian konflik secara damai.

Namun Amitav juga mengingatkan bahwa dalam proses pengembangan ASEAN Regional Forum juga akan ditemui sejumlah kendala berkenaan dengan perbedaan kepentingan negara-negara mitra dialog dalam upaya mengembangkan ASEAN Regional Forum berdasarkan persepsi dan kebutuhan keamanan masing-masing negara. Karena itu Amitav tetap menekankan pentingnya peran ASEAN sebagai pengendali utama ASEAN Regional Forum untuk tetap mengarahkan ASEAN Regional Forum berdasarkan mekanisme kerja ASEAN khususnya pola ASEAN Way agar prinsip keseimbangan tetap terjaga dan ASEAN Regional Forum dapat menjaga laju perkembangannya agar dapat dirasakan nyaman oleh setiap negara mitra dialog.



**3. PERKEMBANGAN ASEAN REGIONAL FORUM (ARF)  
SEBAGAI FORUM KEAMANAN MULTILATERAL  
KAWASAN ASIA PASIFIK  
DAN KEBUTUHAN KETAHANAN NASIONAL INDONESIA  
DI BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN PERIODE 1994-2006**

Pada Bab 3 akan dijelaskan mengenai latar belakang pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) sebagai Forum Keamanan Multilateral pertama di kawasan Asia Pasifik dan perkembangannya sampai dengan tahun 2006. Kemudian juga akan dijelaskan mengenai perkembangan kebutuhan ketahanan nasional Indonesia khususnya gatra pertahanan dan keamanan sejak akhir dekade 90-an sampai sekarang. Bagian Pertama dalam Bab 3 berisi mengenai penjelasan hasil-hasil Sidang ASEAN Regional Forum mulai tahun 1994 sampai dengan 2006 termasuk hasil-hasil Pertemuan Inter-Sessional Group (ISG) dan juga Pertemuan *second track*. Penjabaran hasil-hasil Pertemuan ASEAN Regional Forum akan digunakan sebagai dasar untuk menganalisis esensi dan arti penting kehadiran ASEAN Regional Forum sebagai Forum Keamanan Multilateral satu-satunya yang membahas isu-isu keamanan di kawasan Asia Pasifik. Kemudian pada Bagian Kedua akan dibahas mengenai perkembangan kebutuhan ketahanan nasional Indonesia khususnya di bidang pertahanan dan keamanan yang dapat dilihat dari Doktrin Pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003 “Mempertahankan Tanah Air” dan Kaji Ulang mengenai Strategi Pertahanan Indonesia tahun 2004-2005. Penjelasan mengenai kebutuhan ketahanan nasional Indonesia akan dipakai sebagai bahan utama untuk menganalisis korelasi antara ASEAN Regional Forum dengan kebutuhan ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan dan juga untuk menganalisis esensi dan korelasi ASEAN Regional Forum bagi ketahanan nasional Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan.

### 3.1. Latar Belakang Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF)

Sejarah pembentukan ASEAN Regional Forum tidak pernah lepas dari penyelenggaraan Pertemuan Tingkat Tinggi negara-negara *Association Southeast Asia Nations* atau ASEAN ke IV di Singapura pada tahun 1992. KTT IV Singapura tersebut dianggap sebagai KTT yang fenomenal karena dalam KTT ASEAN tersebut negara-negara ASEAN mampu menghasilkan sejumlah terobosan baru terutama dalam meningkatkan peran ASEAN untuk menata kondisi keamanan regional yang mengalami perubahan pada masa paska perang dingin. Dalam KTT ke IV tersebut ASEAN secara lebih terbuka membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pengelolaan keamanan regional yang sebelumnya merupakan masalah yang sensitif bagi negara-negara ASEAN. Bahkan pada Deklarasi Bangkok 1967 yang merupakan Dokumen Pendirian ASEAN, peran politik dan keamanan ASEAN tidak dimasukkan dalam Tujuan ASEAN dalam Deklarasi.

Perubahan peran ASEAN pada masa pasca Perang Dingin banyak dipengaruhi dengan terjadinya perubahan pada konstelasi politik internasional terutama dengan terjadinya keruntuhan Bipolar karena salah satu kubu Uni Soviet membubarkan diri pada Desember 1991. Kemudian terjadinya pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari Partai Republik ke Partai Demokrat di bawah pimpinan Presiden William J. Clinton menyebabkan negara adidaya tersebut lebih memperhatikan langkah-langkah untuk memperbaiki perekonomian dalam negeri. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya *vacuum power* di kawasan Asia Tenggara yang sepanjang masa perang dingin memperoleh payung perlindungan dari Uni Soviet maupun Amerika Serikat melalui pendirian pangkalan militer di Vietnam dan Filipina.

Dalam keadaan *vacuum power* negara-negara ASEAN harus menghadapi ancaman baru dari peningkatan kapabilitas militer RRC. Terlebih RRC secara agresif menantang negara-negara ASEAN terhadap kepemilikan Kepulauan Spartyly dengan menerbitkan Peta Baru yang memasukkan seluruh wilayah Laut Cina Selatan sebagai bagian dari RRC. Karena itulah muncul fenomena konflik Spartyly antara RRC dengan tiga negara anggota ASEAN yaitu Malaysia, Brunei

Darussalam dan Filipina. Bahkan dengan Filipina pernah terjadi kontak senjata terbatas yang dikenal dengan peristiwa Mischief Reef. pada tahun 1995.

Semula negara-negara ASEAN berupaya melakukan akuisisi persenjataan terutama didukung dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan sejak dekade 80-an. Namun negara-negara anggota ASEAN kemudian lebih memilih untuk mengembangkan peran keamanan melalui pembentukan forum dialog yang akan membahas pengelolaan keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. Forum tersebut kemudian dikenal dengan nama ASEAN Regional Forum atau ARF. Forum ARF sendiri kemudian digagas pada tahun 1993 ketika diselenggarakannya Konferensi Tingkat Menteri ASEAN (*Annual Ministerial Meeting*) di Singapura dalam pertemuan *informal working dinner*.<sup>52</sup>

Pembentukan ARF dapat dikatakan sebagai peristiwa bersejarah khususnya bagi negara-negara anggota ASEAN. Oleh karena ASEAN kemudian mengembangkan ARF sampai mencakup kawasan Asia Pasifik. Dapat dikatakan bahwa ARF merupakan forum dialog multilateral utama di Asia Pasifik untuk membahas masalah-masalah stabilitas, kerjasama politik dan keamanan. ASEAN sendiri berupaya untuk tetap menjadi *driving force* bagi ARF.

ARF sendiri merupakan forum dialog resmi antar pemerintah dan merupakan bagian dari upaya membangun saling percaya di kalangan negara-negara Asia Pasifik untuk membicarakan kepentingan keamanan bersama sehingga semua pihak dapat membicarakan masalah-masalah keamanan regional secara lebih langsung dan terbuka.<sup>53</sup> Pembentukan ARF juga merupakan usaha ASEAN yang pertama untuk memultilateralisasi keamanan di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya. Multilateralisasi ini diharapkan dapat menjamin intensitas yang lebih besar dalam hubungan dan kerjasama antarnegara dan dalam bidang kepentingan dan masalah bersama dan dengan demikian landasan yang sama untuk mengembangkan hubungan kerjasama yang baik termasuk memperluas dipap saling percaya.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> F. Andrea, *op.cit.*, h. 76

<sup>53</sup> F. Andrea, "Peran Keamanan ASEAN Regional Forum", dalam Bantarto Bandoro, *op.cit.*, hal. 76

<sup>54</sup> CPF Luhulima, "Masa Depan ASEAN Regional Forum (ARF)", dalam *Ibid.*, h. 87.

### 3.2 Hasil-Hasil Pertemuan Tahunan ASEAN Regional Forum periode 1994-2006

Dalam upaya menjelaskan Hasil-Hasil Pertemuan ASEAN Regional Forum dari Tahun 1994-2006 maka inti kesepakatan yang dicapai dalam Pertemuan ARF dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**TABEL 3.1**

**RINGKASAN HASIL-HASIL PERTEMUAN TAHUNAN  
ASEAN REGIONAL FORUM 1994-2006**

| PERTEMUAN<br>TAHUNAN<br>ARF KE | TEMPAT DAN WAKTU<br>PENYELENGGARAAN | HASIL PERTEMUAN  |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| I                              | Bangkok, Thailand<br>25 Juli 1994   | <p>Menetapkan tujuan dan prinsip-prinsip <i>Treaty of Amity and Cooperation</i> dari ASEAN sebagai <i>code of conduct</i> antar negara peserta ARF dan sebagai instrumen diplomasi yang unik pembangun rasa saling percaya di tingkat kawasan, diplomasi preventif dan kerjasama keamanan</p> <p>Menerima hasil-hasil SOM khususnya di bidang pencegahan proliferasi WMD</p> <p>Mengembangkan studi mengenai konsep keamanan secara komprehensif termasuk aspek-aspek ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada kawasan Asia Pasifik</p> <p>Mengembangkan studi mengenai norma-norma internasional yang relevan dan prinsip-prinsip yang berlaku pada kerjasama politik dan keamanan baik di tingkat regional maupun internasional sehingga dapat ditemukan kontribusinya terhadap kerjasama politik dan keamanan di tingkat regional</p> |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | <p>Mempromosikan partisipasi negara ARF dalam Konvensi PBB mengenai Registrasi Persenjataan Konvensional (UN Arms Register)</p> <p>Melembagakan apabila memungkinkan pertemuan informal dari para pejabat senior dalam upaya mempelajari sejumlah paper yang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan ARF di masa mendatang</p> <p>Menetapkan kebutuhan untuk membangun pola-pola yang lebih konstruktif dan terukur dari hubungan-hubungan di kawasan Asia Pasifik, melalui penyelenggaraan pertemuan yang dapat mengekspresikan keyakinan untuk kelanjutan pengembangan kerjasama dalam penguatan dan peningkatan kerjasama di bidang politik dan keamanan di kawasan dalam rangka mencapai tujuan untuk perdamaian abadi, stabilitas, kesejahteraan kawasan maupun masyarakat di kawasan.</p> |
| II | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam<br>1 Agustus | <p>Perumusan ASEAN Concept Paper sebagai landasan kerja ARF</p> <p>Negara partisipan ARF akan melanjutkan kerjasama yang lebih erat dalam upaya menjamin dan memfasilitasi terbentuknya lingkungan yang damai, sejahtera dan stabil di kawasan Asia Pasifik</p> <p>ARF akan terus dikembangkan menjadi forum untuk dialog terbuka dan konsultasi tentang isu-isu keamanan dan politik regional, dalam mendiskusikan dan melakukan rekonsiliasi perbedaan pandangan di antara negara partisipan ARF dalam rangka mengurangi kendala dalam</p>   |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>masalah keamanan</p> <p>ARF merumuskan konsep dari keamanan komprehensif yang tidak hanya meliputi aspek militer tetapi juga isu-isu politik, ekonomi dan sosial</p> <p>Menetapkan ASEAN sebagai <i>driving force</i></p> <p>Menetapkan tiga tahap pengembangan ARF yaitu pembangunan rasa saling percaya, diplomasi preventif dan penyelesaian konflik secara damai.</p> <p>Penetapan partisipan ARF yang terdiri atas, negara anggota ASEAN, negara pengamat, konsultatif dan negara mitra dialog ASEAN. Permohonan keikutsertaan</p> <p>Penetapan struktur ARF yang terdiri atas Pertemuan Tahunan secara Rutin yang dihubungkan dengan the <i>ASEAN Ministerial Meeting dan Post Ministerial Conferences</i> yang akan dikelola oleh ARF-SOM</p> <p>Proses ARF akan melibatkan dua jalur. Kegiatan jalur pertama akan dikelola oleh Pemerintah Negara partisipan ARF sedangkan kegiatan jalur kedua akan dikelola oleh institusi strategis dan organisasi non pemerintah yang relevan dan disetujui oleh negara partisipan ARF. Kedua jalur akan dihubungkan melalui ARF Chairman</p> <p>Pembentukan Inter-sessional Support Group (ISG) dalam pengembangan Confidence Building khususnya dialog mengenai persepsi keamanan dan kebijakan pertahanan</p> |
|--|--|---|

|     |                                 |  |
|-----|---------------------------------|--|
|     |                                 | <p>seta Inter-Sessional Meeting (ISMs) yang akan mengelola kegiatan kerjasama termasuk Pertemuan Sela dan Peacekeeping.. ISG dan ISM akan dipimpin oleh wakil dari ASEAN dan non-ASEAN dan makan diadakan di antara Pertemuan Tahunan ARF-SOMs .</p> <p>Mendorong seluruh negara ARF untuk menangani dialog dan konsultasi dalam kerjasama keamanan dan politik termasuk pertukaran persepsi dalam keamanan secara bilateral, sub-regional dan regional.</p> <p>Peningkatan kontak dan pertukaran pejabat militer, pejabat akademi militer dan pelatihan.</p> <p>Meningkatkan keikutsertaan negara partisipan dalam <i>UN Conventional on Arms Register</i></p> <p>Pembahasan lebih lanjut mengenai <i>the ASEAN's 1992 Declaration on the South China Sea</i></p> |
| III | Jakarta, Indonesia 23 Juli 1996 | <p>Penetapan persyaratan dan kriteria bagi negara partisipan baru yang meliputi penerimaan terhadap prinsip-prinsip ARF, mendorong terjadinya perdamaian dan keamanan di kawasan, merupakan negara berdaulat dan upaya untuk mengendalikan jumlah partisipan untuk menunjang efektivitas</p> <p>Penambahan jumlah negara partisipan ARF dengan bergabungnya India dan Myanmar</p> <p>Dukungan terhadap Penandatanganan Perjanjian <i>Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone</i> ( SEANWFZ) oleh Kepala Negara ASEAN dan</p>  |

|    |                                   |  |
|----|-----------------------------------|--|
|    |                                   | <p>bertekad mengakhiri uji coba nuklir di kawasan Pasifik Selatan serta meningkatkan langkah-langkah pencegahan proliferasi nuklir terutama pengelolaan krisis nuklir di Semenanjung Korea.</p> <p>Mengembangkan hubungan di bidang Pertahanan melalui pertukaran pendidikan dan pelatihan militer</p> <p>Dukungan terhadap proses registrasi Senjata Konvensional melalui UN Register of Conventional Arms.</p> <p>Mendukung hasil-hasil Pertemuan Sela untuk masalah SAR dan untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian</p>   |
| IV | Subang Jaya Malaysia 27 Juli 1997 | <p>ARF akan terus dikembangkan sebagai forum multilateral dan kerjasama kawasan</p> <p>Dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan kawasan maka setiap negara juga wajib melakukan pembangunan ekonomi</p> <p>Menggarisbawahi pentingnya pengembangan hubungan positif di antara negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik</p> <p>Menerima pelaksanaan SEANFWZ dan mendukung penerapan Konvensi tentang Pembatasan Senjata Kimia dan Biologi. Termasuk juga menerima Resolusi PBB mengenai pengendalian persenjataan</p> <p>Memberikan perhatian kepada perkembangan masalah konflik Laut China Selatan dan konflik internal di Kamboja serta perkembangan krisis nuklir di Semenanjung Korea serta permasalahan pembuangan limbah di kawasan Asia Pasifik</p> |

|    |                               |   |
|----|-------------------------------|---|
| V  | Manila, Filipina 27 Juli 1998 | <p>Penerimaan Mongolia sebagai negara partisipan baru</p> <p>Menetapkan pembahasan keamanan melalui pendekatan yang komprehensif.</p> <p>Mendorong terjadinya reformasi di bidang ekonomi berkenaan dengan terjadinya krisis keuangan di beberapa negara Asia.</p> <p>Menggarisbawahi pentingnya pengelolaan hubungan di antara negara besar</p> <p>Mendukung dialog enam pihak untuk penyelesaian krisis semenanjung Korea, mendukung penerapan UNCLOS dalam pengelolaan konflik laut China Selatan dan langkah-langkah ASEAN untuk mengelola konflik internal Kamboja</p> <p>Terus mendukung pelaksanaan SEANWFZ, pelaksanaan Perjanjian Pembatasan Senjata Kimia dan Biologi, peningkatan jumlah negara yang meratifikasi CTBT sebagai langkah awal pencegahan proliferasi persenjataan nuklir dalam rangka mempromosikan perdamaian dan keamanan internasional.</p> |
| VI | Singapura 26 Juli 1999        | <p>Mendorong pelaksanaan CBM yang dapat membuat negara partisipan merasa nyaman dan memperkuat komitmen mereka untuk membuat keputusan melalui konsensus.</p> <p>Menyetujui bahwa hubungan yang stabil antara negara besar merupakan elemen yang menyatu dengan kebutuhan untuk mempertahankan stabilitas kawasan.</p>  |

|     |                                |  |
|-----|--------------------------------|--|
|     |                                | <p>Menetapkan bahwa terdapat korelasi positif antara krisis keuangan dengan keamanan kawasan.</p> <p>Menetapkan TAC sebagai instrumen utama kawasan dalam upaya memperkuat keamanan di kawasan</p> <p>Menyambut baik langkah-langkah pengelolaan masalah Laut China Selatan berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Laut Internasional dan UNCLOS dan mendorong negara-negara yang terlibat dalam dialog krisis semanjung Korea untuk membuat kebijakan yang mendukung tercapainya perdamaian dan keamanan di semenanjung Korea.</p> <p>Mendukung pelaksanaan dari Konvensi Ottawa mengenai pembatasan penggunaan, penyimpanan, produksi dan Transfer Ranjau Darat serta pembatasan Senjata Konvensional lainnya.</p> <p>Dimulainya pembahasan mengenai ancaman keamanan non-tradisional seperti masalah kebakaran hutan, bajak laut dan imigran ilegal.</p> |
| VII | Bangkok, Thailand 27 Juli 2000 | <p>Menyambut baik perkembangan dari pelaksanaan CBM dan juga perumusan langkah-langkah diplomasi preventif.</p> <p>Menyambut baik pembentukan Kelompok Pakar ARF dan juga pengembangan kerjasama Para Ketua ARF dengan institusi internasional lainnya termasuk pengembangan hubungan antara jalur pertama dan jalur kedua.</p> <p>Menyambut baik penerbitan dari Asia <i>Security Outlook</i> yang pertama termasuk pentingnya partisipasi dari</p>   |

|      |                             |  |
|------|-----------------------------|--|
|      |                             | <p>pejabat pertahanan dan militer dalam dialog ARF</p> <p>Mencatat perkembangan positif dari hubungan politik, ekonomi dan keamanan di kawasan Asia Pasifik dalam upaya terus mempromosikan stabilitas dan kerjasama kawasan.</p> <p>Menyatakan persetujuan bahwa proses demokrasi yang terintegrasi dan kesejahteraan ekonomi di Indonesia adalah hal fundamental bagi pemeliharaan keamanan di tingkat regional.</p> <p>Menyambut baik perkembangan domestik di Timor Timur melalui kehadiran UNTAET juga pengelolaan krisis di Semenanjung Korea dan Laut China Selatan. Serta mendorong terciptanya kestabilan di kawasan Asia Selatan berkaitan dengan konflik India-Pakistan</p> |
| VIII | Hanoi, Vietnam 25 Juli 2001 | <p>Menggarisbawahi pentingnya kontribusi ARF teradap perdamaian dan keamanan kawasan melalui penguatan CBM dan Diplomasi Preventif</p> <p>Merumuskan langkah-langkah untuk mencegah tumpang tindih antara konsep CBM dan Diplomasi Preventif</p> <p>Terus mendorong tercapainya perdamaian dan kestabilan di Laut China Selatan dan Semenanjung Korea</p> <p>Menyambut baik pergantian pemerintahan di Indonesia dan proses peacebuilding di Timor Leste melalui kehadiran UNTAET serta perkembangan implementasi dari SEANWFZ</p>   |

|    |   |  |
|----|---|--|
|    |   | Terus meningkatkan peran jalur pertama dan jalur kedua melalui penyelenggaraan sejumlah Pertemuan Sela dan Workshop yang membahas masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik   |
| IX | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam 31 Juli 2002 | <p>Mendorong peningkatan peran dari para Pejabat Pertahanan dan Militer dalam Forum ARF.</p> <p>Mengadopsi Konsep Paper tentang Diplomasi Preventif berdasarkan pembahasan pada jalur pertama dan kedua</p> <p>Sehubungan dengan peristiwa serangan teroris pada 11 September 2001, Para Menteri ARF sepakat bahwa kejadian tersebut akan berpengaruh terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik sehingga perlu lebih memperkuat kerjasama multilateral di antara negara partisipan ARF.</p> <p>Menyambut baik diselenggarakannya untuk pertama kali Pertemuan Sela mengenai Counter-Terrorism and Transnational Crime</p> <p>Komitmen bersama untuk memerangi terorisme melalui penguatan kerjasama antar negara ARF secara bilateral, regional dan internasional.</p> <p>Menyambut baik ditandatanganinya Perjanjian Damai di Bougenville dan juga pembentukan Loya Jirga sebagai bagian dari proses transformasi rezim di Afghanistan.</p> <p>Meningkatkan langkah-langkah pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal terutama dihubungkan dengan ancaman</p> |

|   |                                 |  |
|---|---------------------------------|--|
|   |                                 | terorisisme pasca 11 September 2001.   |
| X | Phnom Penh Kamboja 18 Juni 2003 | <p>Dalam rangka 10 tahun berdirinya ARF Para Menteri Luar Negeri ARF menggarisbawahi pentingnya kehadiran ARF sebagai wadah dialog ultilateral dan bilateral sebagai ajang konsultatif dalam mengembangkan prinsip-prinsip dialog dan kerjasama serta proses perumusan kebijakan melalui konsensus, prinsip non-intervensi serta berupaya membuat kondisi perkembangan yang nyaman bagi semua partisipan ARF</p> <p>Menyambut baik Deklarasi Anti Terorisisme yang merupakan Hasil KTT ASEAN</p> <p>Bekerjasama dengan Badan-Badan Internasional dalam memerangi terorisisme dan menyambut baik pendirian Pusat Counter Terrorism Asia Tenggara di Kuala Lumpur.</p> <p>Terus mendorong tercapainya perdamaian dan kestabilan di semenanjung Korea.</p> <p>Menyambut baik langkah-langkah perdamaian dan kerjasama antara India dan Pakistan juga penyelesaian konflik internal antara Pemerintah Sri Lanka dengan kelompok Tamil Elam serta mendukung Indonesia dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah yang berdaulat dari gangguan gerakan separatis</p> <p>Mengeluarkan pernyataan bersama mengenai kerjasama dalam mengantisipasi ancaman bajak laut dan pengelolaan keamanan maritim serta mengatasi ancaman terorisisme di perbatasan</p> |

|     |  |  |
|-----|--|--|
|     |  | Mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk aksi pengeboman di Bali Oktober 2002   |
| XI  | Jakarta Indonesia, 2 Juli 2004                             | <p>Menerima Pakistan sebagai anggota ke 24 ARF</p> <p>Menerima Hasil KTT ASEAN 2003 berupa Dokumen Bali Concord II yang merencanakan pembentukan ASEAN Community pada 2020.</p> <p>Menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan dari Code of Conduct Laut China Selatan dan terus mengupayakan tercapainya perdamaian di Semenanjung Korea.</p> <p>Menyatakan keprihatinan dan bela sungkawa terhadap korban masyarakat sipil akibat Serangan Militer AS ke Irak</p> <p>Mengajak semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi terorisme yang mengancam keamanan negara dan kawasan</p> |
| XII | Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos<br>29 Juli 2005 | <p>Langkah-Langkah Penanganan Bencana pasca Tsunami melalui Kerjasama antar Negara Partisipan ARF.</p> <p>Mendukung Perumusan Rencana Aksi dari <i>ASEAN Community</i></p> <p>Menyambut baik Proses Pemilihan Umum di Palestina dan Pembentukan Pemerintahan Baru di Irak</p> <p>Mendorong penerapan hukum internasional untuk menanggulangi ancaman terorisme dan juga meningkatkan upaya pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal.</p>   |

|      |  |   |
|------|--|---|
|      |  | Meningkatkan kerjasama dalam upaya mengantisipasi ancaman dari keamanan maritim dan bajak laut  |
| XIII | Kuala Lumpur, Malaysia<br>28 Juli 2006 | Mengutuk segala bentuk Serangan Israel terhadap Palestina dan keterlibatan Israel dalam konflik di Lebanon<br><br>Perluasan pembahasan terhadap isu-isu keamanan non-tradisional termasuk perdagangan gelap senjata ringan dan kecil<br><br>Berupaya mendorong proses demokrasi di Myanmar untuk meminimalisir konflik internal |

Kemudian secara lebih khusus akan dijelaskan secara singkat mekanisme dari ASEAN Regional Forum (ARF) berdasarkan teori keamanan kooperatif (*cooperative security*). ARF dapat dikatakan sebagai kerjasama keamanan kooperatif oleh karena mencerminkan karakter yang ada pada konsep keamanan kooperatif yaitu :

1. ARF merupakan bentuk kerjasama keamanan yang bersifat multilateral karena melibatkan banyak negara yang terdiri atas sepuluh Negara ASEAN dan 14 negara mitra dialog yang terdiri atas Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru, India, China, Jepang, Korea Selatan, Korea Utara, Rusia, Mongolia, Papua Nugini Kanada dan Pakistan.
2. Mekanisme ARF adalah berupa multilateral dialog melalui Pertemuan Tahunan yang senantiasa diadakan di negara-negara ASEAN yang membahas berbagai isu keamanan yang berkembang di kawasan Asia Pasifik.
3. ARF juga menerapkan mekanisme *multitrack* yang melibatkan aktor-aktor *second track* khususnya *epistemic communities* dalam upaya mengembangkan dialog keamanan secara lebih komprehensif di luar Pertemuan Tahunan seperti penyelenggaraan Inter-Sessional Meeting dua tahun sekali kemudian juga kegiatan Seminar dari Workshop yang diselenggarakan secara bersama oleh wakil Pemerintah dan *Epistemic Communities* sebagai *second track*.

4. Di dalam merumuskan kesepakatan pada setiap Pertemuan Tahunan ARF yang diikuti oleh menteri luar negeri negara-negara peserta, maka ARF menggunakan pola konsultatif, konsensus dan musyawarah berdasarkan ciri-ciri ASEAN Way. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik terutama di antara negara-negara besar yang dapat mengancam keberlangsungan dialog multilateral yang dibangun ARF sejak tahun 1994.
5. ARF juga mengembangkan karakter dari keamanan kooperatif yaitu *security with enemy or adversary* terutama yang diprakarsai oleh negara-negara ASEAN sebagai *driving force ARF*. Dalam hal ini negara-negara ASEAN berupa merangkul negara yang pada masa awal paska perang dingin dianggap sebagai ancaman keamanan kawasan Asia Tenggara yaitu China yang pernah terlibat konflik Laut Cina Selatan dengan empat negara ASEAN.
6. ARF juga digunakan oleh negara-negara ASEAN sebagai wadah keseimbangan antara kekuatan Amerika Serikat dan China serta Jepang yang apabila hubungan ketiga negara tersebut memburuk maka akan berdampak pada terancamnya stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik.
7. ASEAN sendiri melalui ARF berupaya mengembangkan langkah-langkah pengelolaan keamanan ke kawasan Asia Pasifik dan juga senantiasa membawa ARF dalam kendali ASEAN. Karena itu Pertemuan ARF kerap dilakukan setelah *Annual Ministerial Meeting ASEAN* dan selalu berlangsung di negara-negara ASEAN.
8. Melalui keikutsertaan negara-negara di kawasan Asia Pasifik termasuk juga negara-negara yang memiliki kepentingan terhadap kestabilan dan perdamaian di kawasan Asia Pasifik seperti Uni Eropa dalam Forum ARF sejak tahun 1994 sampai dengan 2006, tercermin bahwa telah terbangun keinginan untuk terus mempertahankan kebiasaan berdialog dalam menyelesaikan masalah keamanan kawasan. Misalnya dalam konteks pengelolaan sengketa Laut China Selatan, krisis nuklir di semenanjung Korea, uji coba senjata nuklir antara India dan Pakistan serta konflik internal yang memiliki potensi untuk mempengaruhi pada keamanan kawasan seperti masalah Timor Timur, Fiji dan juga Myanmar, Forum ARF telah berhasil menghasilkan langkah-langkah

positif ke arah perdamaian dan kestabilan kawasan melalui pembahasan secara terus menerus dalam Forum ARF. Sehingga sejak ARF didirikan sampai sekarang friksi keamanan dalam kasus-kasus di atas dapat diredam sehingga tidak menghasilkan konflik terbuka dengan menggunakan kekuatan militer. ARF juga telah menjadi institusi multilateral walaupun masih dalam struktur yang longgar dalam memfasilitasi pengembangan kebiasaan untuk menempuh jalan dialog daripada penggunaan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan kestabilan dan perdamaian kawasan seperti halnya yang dipersyaratkan dalam konsep keamanan kooperatif.

### 3.3. Dinamika Perkembangan ASEAN Regional Forum Periode 1994-2006

Kemudian dari Hasil-Hasil Pertemuan ASEAN Regional Forum sepanjang periode 1994 sampai dengan 2006 baik Pertemuan Tahunan maupun Pertemuan Sela dan Seminar maupun Workshop yang diadakan oleh negara-negara mitra dialog ARF maka dapat digambarkan dinamika perkembangan ARF sebagai berikut :

**TABEL 3.2**

#### **DINAMIKA PERKEMBANGAN ASEAN REGIONAL FORUM PERIODE 1994-2006**

| <b>ISU-ISU KEAMANAN YANG DIBAHAS</b>                                       | <b>JENIS ISU KEAMANAN</b>  | <b>INTI PEMBAHASAN</b>  |
|--|--|---|
| <b>ISU KEAMANAN YANG SELALU DIBAHAS DALAM SETIAP PERTEMUAN TAHUNAN ARF</b> | 1. Upaya untuk mencegah Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (WMD) dan senjata konvensional | a. Mendukung Konvensi tentang pengendalian dan pembatasan senjata pemusnah massal seperti Perjanjian Non-Proliferasi (NPT) dan Konvensi mengenai Pelarangan Ujicoba Senjata Nuklir (CTBT).<br>b. Mendorong negara-negara mitra dialog untuk menghormati sejumlah konvensi tentang pencegahan proliferasi senjata pemusnah massal yang telah |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | <p>dibuat oleh PBB.</p> <p>c. Mendukung terbentuknya kawasan bebas senjata nuklir khususnya di Asia Tenggara pada tahun 1995 <i>melalui Southeast Asia Nuclear Weapons Free Zone(SEANWFZ)</i></p> <p>d. Mendorong negara-negara partisipan ARF untuk melaksanakan registrasi persenjataan konvensional pada <i>UN Register on Conventional Arms (UNRCA)</i></p>   |
|  | 2. Konflik Laut Cina Selatan antara China dan negara-negara Asia Tenggara   | Dirumuskannya Code of Conduct tentang pengelolaan kawasan Laut Cina Selatan   |
|  | 3. Krisis Nuklir di Semenanjung Korea   | <p>a. Mendorong dilanjutkannya dialog six party</p> <p>b. Mendorong penerapan non-proliferasi di semenanjung Korea</p> <p>c. Terus mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian di semenanjung Korea.</p>  |
|  | 4. Pengembangan pola-pola kerjasama kawasan yang lebih konstruktif dan berlandaskan pada <i>confidence building measures (CBMs)</i> dan Diplomasi Preventif | <p>Perumusan langkah-langkah penerapan CBMs berupa</p> <p>A. Prinsip-prinsip</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sekumpulan prinsip-prinsip dasar untuk menjamin rasa saling pengertian dan pendekatan terhadap hubungan antar negara di wilayah serta</li> <li>2. Mengadopsi pendekatan yang komprehensif terhadap keamanan</li> </ol> <p>B. Transparansi</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan dialog mengenai persepsi keamanan, termasuk pernyataan secara sukarela dari posisi kebijakan pertahanan;</li> </ol> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>4. Publikasi Dokumen Pertahanan seperti Buku Putih Pertahanan atau Dokumen sejenis adalah sangat diperlukan untuk menciptakan rasa saling menghormati di antara pemerintahan dalam kawasan;</p> <p>5. Berpartisipasi dalam Konvensi PBB mengenai Registrasi Persenjataan;</p> <p>6. Melakukan komunikasi secara terus menerus termasuk kunjungan tingkat tinggi dan kegiatan bersama yang bersifat aksi-reaksi;</p> <p>7. Pertukaran siswa akademi militer, staf pengajar maupun pertukaran program pelatihan;</p> <p>8. Memperbolehkan kehadiran secara sukarela pengamat dari negara ARF dalam latihan militer antara negara peserta ARF;</p> <p>9. Mengadakan seminar berkala untuk pejabat Departemen Pertahanan dan Pejabat militer yang akan membahas isu-isu keamanan internasional yang telah dipilih dan diagendakan sebelumnya.</p> <p>Kemudian dalam Lampiran B dari ASEAN <i>Concept Paper</i> juga kembali dijelaskan mengenai makna CBM yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Eksplorasi lebih lanjut dari registrasi persenjataan di tingkat regional;</li> <li>2. Pembentukan Pusat Kajian Keamanan Regional atau dalam bentuk koordinasi dari</li> </ol> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>pusat-pusat kajian keamanan yang telah ada;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pengumpulan data mengenai maritim;</li> <li>4. Pendekatan kooperatif terhadap <i>sea lines of communication (SLOC)</i> yang dimulai dengan pertukaran informasi dan pelatihan di wilayah tertentu seperti pelatihan SARS kemudian juga pengawasan bajak laut dan perdagangan obat-obatan terlarang;</li> <li>5. Mekanisme untuk memobilisasi bantuan pada saat terjadinya bencana alam;</li> <li>6. Pembentukan zona kerjasama di wilayah tertentu seperti Laut China Selatan;</li> <li>7. Pembentukan sistem untuk dapat memantau terjadinya peningkatan kapabilitas militer yang memiliki dampak di tingkat regional dan</li> <li>8. Mendorong industri persenjataan dan perdagangan senjata untuk lebih transparan dalam menyatakan tujuan ekspor senjata mereka</li> </ol> <p>Kemudian untuk tahap kedua yaitu Diplomasi Preventif dirumuskan pengertian dan langkah-langkah pelaksanaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan seperangkat pedoman untuk kebutuhan penyelesaian pertikaian secara damai yang</li> </ol> |
|--|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>berlandaskan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB dan TAC.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mempromosikan kesepakatan dan penerimaan terhadap tujuan dan prinsip-prinsip dalam ARF serta penerapannya untuk kebutuhan penyelesaian perselisihan seara damai seperti halnya yang telah dirumuskan oleh Resolusi Majelis Umum No. 47/53 (B) pada 9 Desember 1992.</li> <li>3. Mencari pengakuan dari negara-negara lain terhadap Deklarasi ASEAN mengenai Laut China Selatan dalam rangka memperkuat dampak politis maupun moral seperti halnya penerapan Program Aksi dalam ZOPFAN</li> </ol> <p>Sedangkan dalam Lampiran B pengertian Diplomasi Preventif dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan eksplorasi dan langkah-langkah serta cara-cara untuk pencegahan konflik</li> <li>2. Melakukan eksplorasi ide untuk menunjuk perwakilan khusus yang akan melakukan konsultasi dengan anggota ARF dalam upaya melaksanakan misi penemuan data, sesuai dengan permintaan pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan dan apabila dibutuhkan dapat</li> </ol> |
|--|--|--|

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   | <p>menawarkan jasa baik sebagai fasilitator</p> <p>3. Melakukan eksplorasi terhadap ide-ide untuk membentuk <i>a Regional Risk Reduction Center</i> seperti yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal PBB dan <i>The Agenda for Peace</i> dan direkomendasikan melalui Resolusi Majelis Umum No. 47/120. Pusat kajian tersebut dapat memfasilitasi pengumpulan database untuk kebutuhan pertukaran informasi.</p>   |
| <p><b>ISU-ISU KEAMANAN KHUSUS YANG DIBAHAS DALAM PERTEMUAN TAHUNAN ARF</b></p> | <p>Munculnya Konflik Internasl di negara-negara Asia Pasifik yang dikhawarikan dapat mengganggu stabilitas keamanan kawasan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Konflik Fiji antara etnis India dan etnis Fiji</li> <li>b. Konflik antara Pemerintah Junta Militer Myanmar dengan Kelompok Demokrasi di bawah pimpinan Aun Sang Suu Kyi termasuk di dalamnya masalah pelanggaran Hak Asasi</li> <li>c. Masalah Timor Timur</li> </ol> | <p>Negara-Negara Partisipan ARF menghimbau agar pihak-pihak yang berkonflik segera dapat melaksanakan proses resolusi konflik melalui jalan damai khususnya untuk masalah konflik internal di Fiji.</p> <p>Sedangkan untuk masalah Myanmar, negara-negara partisipan ARF menghimbau Pemerintah Junta Militer untuk segera melaksanakan proses demokrasi di Myanmar serta membebaskan Aung San Suu Kyi yang sejak tahun 2004 kembali dimasukkan ke dalam tahanan rumah.</p> <p>Sementara untuk masalah Timor Timur negara-negara partisipasn ARF mendukung keterlibatan misi PBB baik UNTAET dan UNAMET dalam melaksanakan proses referendum dan juga pembentukan Pemerintahan Sementara paska lepasnya Timor Timur dari Indonesia.</p> <p>Namun di samping itu negara-</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | negara partisipan ARF juga mendukung kebijakan Indonesia terhadap masalah Timor Timur yang dinilai membantu menciptakan situasi keamanan yang kondusif paska terlepasnya Timor Timur dari Indonesia  |
|  | Kesalahan Pengeboman NATO di wilayah Serbia dalam upaya menghentikan serangan Serbia ke Kosovo yang mengakibatkan hancurnya Kedutaan RRC dan meninggalnya tiga orang diplomat RRC  | Perbaiki rumusan kesepakatan yang berupaya memadukan kepentingan AS dan negara-negara Eropa anggota NATO dalam upaya menciptakan perdamaian di Kosovo dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi dengan keprihatinan bahwa tindakan pengeboman tersebut ternyata membawa korban dari pihak Kedutaan RRC.  |
|  | Ujicoba senjata nuklir antara India dan Pakistan pada tahun 1998   | Menghimbau kedua belah pihak untuk mentaati konvensi tentang pembatasan ujicoba senjata nuklir (CTBT) dan dapat segera menandatangani Perjanjian CTBT.   |
|  | Krisis Ekonomi yang melanda kawasan Asia Tenggara yang dapat berpengaruh pada keamanan kawasan   | Mengupayakan langkah-langkah pencegahan maupun penanggulangan krisis melalui dukungan finansial dan kerjasama ekonomi yang lebih intens di antara negara-negara partisipan ARF.  |
|  | Peristiwa serangan teroris ke AS 11 September 2001 dan peledakan bom di daerah wisata Pulau Bali pada 12 Oktober 2002 yang dengan segera menangkat ancaman kegiatan jaringan terorisme internasional sebagai isu keamanan utama pada abad ke 21. | Mendukung pelaksanaan sejumlah konvensi PBB yang berhubungan dengan pencegahan perluasan aksi teror dan menyatakan keprihatinan terhadap korban aksi terorisme baik di AS maupun di Indonesia<br>Komitmen bersama negara-negara partisipan ARF untuk memerangi terorisme baik di tingkat global maupun regional.<br>Menyusun langkah-langkah kerjasama dalam mencegah ancaman perluasan jaringan terorisme di kawasan Asia Pasifik |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | melalui Pembentukan Pusat Counter Terrorism dan Trans-National Crime. (CT-TC)  |
|  | Bencana Alam Tsunami yang melanda Indonesia, Thailand dan Sri Lanka yang merupakan ancaman keamanan manusia  | Mengerahkan partisipasi seluruh negara-negara partisipan ARF untuk membantu korban bencana alam Tsunami termasuk juga Gempa Bumi yang melanda Yogyakarta.<br>Mengupayakan langkah-langkah pengembangan <i>early warning system</i> terhadap bencana Tsunami terutama di wilayah-wilayah yang rawan akan bencana Tsunami  |
|  | Munculnya ancaman keamanan baru dari isu-isu keamanan non-tradisional seperti <i>piracy</i> , <i>illegal imigran</i> dan juga perdagangan ilegal senjata kecil dan ringan secara gelap di kawasan Asia Pasifik | Menyusun langkah-langkah antisipasi atau pencegahan terhadap perluasan ancaman keamanan non-tradisional melalui workshop, seminar dan working group mengenai tiga isu yang diprioritaskan oleh ARF sebagai ancaman keamanan non-tradisional yaitu <i>piracy</i> , <i>illegal imigran</i> dan perdagangan senjata ilegal di samping isu utama tentang terorisme |

### 3.4. Hasil-Hasil penting lainnya yang dicapai ASEAN Regional Forum dalam Pertemuan Tahunan maupun Pertemuan Intersessional serta Workshop dan Seminar .

Di samping inti dari dinamika perkembangan dalam Pertemuan Tahunan ARF maka menarik pula untuk dijelaskan mengenai hasil-hasil yang dicapai ARF dalam Pertemuan di luar Pertemuan Tahunan yang juga melibatkan second track termasuk juga proses perluasan negara mitra dialog ARF dan permasalahan khusus yang menjadi pembahasan spesifik dalam pertemuan tahunan ARF.

Sebelum diselenggarakannya Pertemuan ARF ketiga di Jakarta diselenggarakan Pertemuan ARF *Inter-Sessional Support Group* dalam CBM yaitu di Tokyo 18-19 Januari 1996 dan di Jakarta 15.1-6 April 1996. Hasil kedua Pertemuan tersebut adalah adanya kesepakatan untuk memberikan rekomendasi kepada ARF *Senior Officials Meeting* di Yogyakarta untuk terus mendorong keberlanjutan dari dialog mengenai

persepsi keamanan kemudian publikasi Buku Putih Pertahanan, pertukaran informasi untuk masalah pertahanan serta mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan registrasi persenjataan konvensional melalui *United Nations Register on Conventional Arms* (UNRCA).

Kemudian pada tanggal 4-7 Maret 1996 di Honolulu, Hawaii juga diadakan pertemuan *The ARF Inter-Sessional on Search and Rescue (SAR) Coordination and Cooperation in The Asia-Pacific Region*. Dalam Pertemuan tersebut dibahas beberapa masalah pokok seperti Publikasi Konvensi-konvensi tentang *International SAR*, kemudian mengadakan Pelatihan Regional SAR, mengadakan koordinasi dan kerjasama dalam SAR Militer dan Sipil. Hasil dari Pertemuan ARF SAR adalah langkah-langkah untuk meningkatkan pertukaran fasilitas pelatihan dan pakar SAR di kawasan untuk meningkatkan kapabilitas personil SAR membangun kerjasama lebih lanjut di antara institusi pelatihan dan memfasilitas arus informasi, memperluas program-program pelatihan bilateral dan multilateral dan juga membuat standarisasi dari pedoman SAR, pelatihan dan prosedur di antara negara mitra dialog ARF.<sup>55</sup>

Pada tanggal 1-3 April 1996 juga diselenggarakan Pertemuan *The ARF Inter-Sessional* untuk Operasi Pemeliharaan Perdamaian. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai perkembangan dari Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB yang dapat melibatkan negara dialog ARF kemudian juga pelatihan untuk operasi pendukung perdamaian dan juga pembahasan mengenai kesepakatan membangun *standby force*.

Sebelum Pertemuan ARF ke IV juga diselenggarakan *The ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief* di Wellington Selandia Baru pada 19-20 Februari 1997. Dalam Pertemuan tersebut disepakati untuk meningkatkan kerjasama dalam melakukan pertukaran informasi dan pengalaman para pakar serta penelitian dan pelatihan dalam rangka penanganan bencana alam. Kemudian pada tanggal 6-8 Maret 1997 diselenggarakan *The ARF Inter-Sessional Support Group On Confidence Building Measures* di Beijing. Permasalahan Pokok yang didiskusikan mencakup pertukaran pandangan mengenai lingkungan keamanan regional dan persepsi keamanan, pertukaran informasi mengenai kerjasama CBM regional, pertukaran pandangan mengenai kebijakan pertahanan, pertukaran pandangan mengenai program konversi pertahanan, pertukaran

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, p. 41

informasi mengenai latihan militer di antara negara mitra dialog ARF. Kemudian juga bahasan khusus yang berkaitan dengan UNRCA, upaya-upaya untuk mendorong terjadinya pembatasan dan perlucutan senjata, CBM di bidang non-militer kemudian implementasi dari kesepakatan CBM.<sup>56</sup>

Dalam Pertemuan ISG-CBM di Beijing tersebut sempat muncul perdebatan antara China dan aliansi AS- Jepang terhadap masalah perumusan lingkungan di kawasan Asia Pasifik. China sempat mengkritik dipertahankannya aliansi AS-Jepang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan kondisi keamanan pada masa paska perang dingin.<sup>57</sup> Namun di sisi lain seperti yang dinyatakan beberapa diplomat dan pejabat militer dari ASEAN China juga mulai menunjukkan sikap kooperatif terutama dalam mengembangkan transparansi menuju CBM.

Sementara itu menurut staf ahli Menteri Pertahanan dan Keamanan RI Laksamana Purnawirawan RM Sunardi, masih terdapat persoalan yang mengganjal dalam pelaksanaan CBM. Pertama menyangkut latihan militer gabungan bersama dua negara atau lebih. Dalam kerangka pembangunan CBM hendaknya penyelenggara latihan militer tersebut mengundang negara lain sebagai pengamat. Dalam hal ini RRC ternyata lebih kooperatif namun banyak delegasi lain yang menolak dan tidak ingin latihan militer gabungannya disaksikan oleh negara lain. Isu rawan lain adalah kerjasama maritim karena perkembangan dan pembangunan ekonomi bergantung pada perdagangan lintas laut sehingga harus dijamin keamanannya. Namun justru banyak negara yang tidak mau melibatkan diri dalam kerjasama maritim dan menganggap masalah ini sudah dibahas oleh diplomasi jalur kedua<sup>58</sup>

Pada tanggal 26-28 Maret 1997 juga diselenggarakan Pertemuan Kedua *dari Inter-Sessional ARF Meeting* dan koordinasi dan kerjasama SAR. Dalam pertemuan tersebut para negara mitra dialog ARF menetapkan bahwa operasi SAR secara esensi adalah misi kemanusiaan. Kemudian ditetapkan pula bahwa seluruh kegiatan SAR termasuk fasilitas kapal laut dan pesawat terbang untuk kepentingan operasi SAR berada di bawah kewenangan *International Maritime Organization* (IMO). Dalam pertemuan

<sup>56</sup> *Ibid.*, p. 58-59

<sup>57</sup> “Dari Sidang ARF tentang CBM : Cina-AS berbeda pendapat Soal Lingkungan Reamanan Regional”, *Kompas* 9 Maret 1997

<sup>58</sup> *Ibid.*

tersebut juga diputuskan bahwa setiap negara mitra dialog ARF wajib memberikan bantuan SAR baik berupa fasilitas kapal laut maupun pesawat udara tanpa membedakan status kewarganegaraan korban. Dicapai pula pemahaman bersama bahwa efektivitas dari pelayanan SAR adalah sangat penting karena menyangkut masalah keselamatan jiwa dan juga meminimalisir penderitaan pada saat terjadi kecelakaan baik di laut, darat maupun udara.

Namun proses penyelamatan tersebut juga tetap memperhatikan ketentuan hukum yang telah dibuat. Karena itu pertemuan tersebut juga mendorong peningkatan dari kemampuan SAR di antara negara partisipan ARF dan mendorong peningkatan kerjasama regional dan koordinasi di dalam kerangka kerjasama ARF dan CBM. Termasuk di dalamnya adanya proses penyederhanaan dari penyediaan fasilitas pendukung kemudian standarisasi dari prosedur dan pelatihan SAR serta pencapaian tujuan secara terintegrasi dan pematangan koordinasi.

Sementara itu pada tanggal 10-14 Maret 1997 di Kuala Lumpur dan 7-11 April 1997 di Palmerston North juga diadakan *The ARF Inter-Sessional Meeting on Peacekeeping Operation*. Pertemuan di Kuala Lumpur merekomendasikan bahwa *The ARF ISM on Peacekeeping Operation* akan diperluas pada tahun-tahun mendatang mencakup penyelenggaraan workshop, pelatihan, termasuk peningkatan standar pelatihan dengan melakukan peningkatan kerjasama dengan Departemen PKO Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tanggal 7-8 November 1996 juga diselenggarakan Seminar mengenai *Preventive Diplomacy* di Paris. Pada seminar yang diikuti oleh perwakilan mitra Dialog ARF ditetapkan kembali prinsip-prinsip dari Diplomasi Preventif berdasarkan Piagam PBB, TAC dan Prinsip-prinsip *Peaceful Coexistence* dan juga Deklarasi Manila tentang Laut Cina Selatan. Kemudian seminar tersebut juga menetapkan definisi dari diplomasi preventif yang berlandaskan pada definisi yang ada pada dokumen PBB tentang *Agenda for Peace* yang ditulis oleh mantan Sekretaris Jendral PBB Boutros-Bhoutros Ghali pada tahun 1992. Kemudian area perhatian dari diplomasi preventif meliputi konflik perbatasan, proliferasi senjata konvensional dan senjata pemusnah masalah, ancaman isu-isu non-konvensional yang bersifat transnasional seperti peredaran obat-obatan terlarang,

terorisme, penyelundupan degradasi lingkungan, perompakan dan perpindahan penduduk secara ilegal.

Kemudian di Jakarta pada tanggal 6-7 Desember 1997 juga diselenggarakan Seminar tentang Non Proliferasi. Seminar tersebut diselenggarakan oleh Jalur kedua ARF yang merupakan Institut Strategis. Masalah yang menjadi perhatian dalam seminar tersebut adalah tantangan dari upaya untuk melakukan non-proliferasi terhadap senjata pemusnah masal di kawasan Asia Pasifik dan langkah-langkah yang dapat diadopsi untuk memperkuat upaya meminimalisir kendala-kendala dalam non-proliferasi dan juga mendorong terjadinya perlucutan senjata yang berkelanjutan. Seminar tersebut merekomendasi bahwa negara partisipan ARF harus didroong untuk menandatangani sejumlah Perjanjian Pembatasan dan Perlucutan Senjata kemudian juga menyadarkan negara partisipan ARF akan pentingnya membangun norma-norma dari pembagunan reactor nuklir untuk perdamaian.

Sedangkan untuk kegiatan jalur kedua sebenarnya telah banyak hasil yang telah dicapai seperti dalam pertemuan jalur kedua *Council on Security and Cooperation in Asia Pacific (CSCAP)* namun belum mendapat persetujuan dari jalur pertama. Kesepakatan lain yang merupakan hasil pertemuan jalur kedua adalah pelaksanaan kegiatan *West Pacific Naval Symposium* yang menghasilkan kerjasama yang tidak berbeda dengan CSCAP. Sehingga masih perlu diupayakan adanya komunikasi antara *track two* dengan *track one*.

Perkembangan lain dalam Sidang ARF ke IV di Kuala Lumpur adalah kesepakatan negara-negara ARF yang dituangkan dalam *Defense Policy Statement (DPS)*. Dalam pernyataan tersebut para peserta ARF di Kuala Lumpur akan meningkatkan proses transparansi terhadap masalah-masalah pertahanan dan keamanan. Termasuk transparansi persepsi masing-masing peserta ARF terhadap perkembangan isu dan kondisi keamanan di negara masing-masing. Serta bagaimana para peserta ARF memandang lingkungan strategis keamanan dan strategi keamanan mereka dalam mengelola keamanan kawasan..<sup>59</sup>

DPS sebenarnya dapat dianggap cuplikan dari buku putih pertahanan negara, Dalam hubungannya dengan kewajiban untuk mempublikasikan buku putih pertahanan

---

<sup>59</sup> “Buku Putih Pertahanan Akan Membuat Masalah Sekuriti Transparan”, *Suara Pembaruan*, 27 Juli 1997

sebagai bagian dari CBMs, ARF masih mengalami kendala karena buku putih pertahanan negara peserta tidak diterbitkan setiap tahun termasuk masih adanya kendala dalam kesepakatan mengenai kegiatan latihan militer gabungan dan juga transparansi pengembangan peralatan militer maupun dialog strategis yang dilakukan. Walaupun banyak negara yang kelihatan ragu mempublikasikan Buku Putih Pertahanan namun sebenarnya dengan memberikan masukan kepada DPS secara sukarela atau tanpa paksaan telah melahirkan sebuah kemajuan dalam CBM khususnya langkah-langkah transparansi sehingga dapat meminimalisir kekhawatiran antar negara ARF.. Transparansi sendiri seharusnya tidak membuat suatu negara menjadi sasaran empuk untuk serangan karena rahasia pertahannya terungkap. Sebaliknya justru meningkatkan rasa saling percaya dan saling pengertian yang lebih tinggi terhadap kebutuhan pertahanan di antara negara peserta ARF dan lebih memudahkan ARF untuk merancang rencana strategis di masa mendatang..

Sebelum Sidang Tahunan ARF di Manila, diadakan pertemuan Pejabat Senior Departemen Luar Negeri dan Pertahanan dari 20 anggota ARF di Manila 20-22 Mei 1998 (*Senior Official Meeting* atau SOM) untuk mendiskusikan berbagai isu yang akan menjadi agenda utama pembahasan pada Sidang ARF ke V mulai dari non-proliferasi nuklir sampai dengan ketegangan di Semenanjung Korea. Dalam Pertemuan para pejabat senior ARF tersebut Korea Selatan juga akan menjelaskan kepada ARF mengenai pembicaraan di Jenewa untuk mencapai perdamaian langgeng di Semenanjung Korea. Di samping itu dalam pertemuan SOM ARF, para pejabat senior ARF juga sepakat untuk menjadikan krisis nuklir India sebagai agenda utama Sidang Tahunan ARF serta pembahasan mengenai dampak keamanan dari krisis moneter Asia. India sendiri berencana menjelaskan masalah uji coba nuklir pada Sidang ARF setelah mendapat kecaman internasional mengenai uji coba senjata nuklir yang dilakukan pada awal Mei 1998.

Para Menlu ARF yang menghadiri Sidang ARF di Manila juga menyatakan keprihatin dan menyesalkan percobaan nuklir di Asia Selatan. Di samping itu para Menlu ARF juga menyambut secara hati-hati Pemilu Kamboja setelah terjadinya konflik internal pada tahun 1997. Semula sebenarnya para Menlu ARF akan mengeluarkan pernyataan kecaman terhadap masalah percobaan nuklir yang dilakukan India. Namun Indonesia dan beberapa anggota ASEAN tidak menghendaki ARF mengecam negara anggota.

Indonesia kemudian melakukan pendekatan terhadap seluruh peserta ARF agar tidak menggunakan kata-kata kecaman dalam pernyataan hasil akhir Sidang, Pendekatan Indonesia ternyata cukup berhasil oleh karena para Menlu ARF akhirnya hanya menyatakan keprihatinan yang mendalam dan sangat menyesalkan uji coba nuklir di Asia Selatan karena dianggap dapat meningkatkan ketegangan dan bayang-bayang ancaman perlombaan nuklir.<sup>60</sup>

Namun mengenai masalah reformasi di Indonesia, Lauro Baja Ketua Pertemuan Pejabat Senior ARF menyatakan ARF tidak secara khusus membahas prospek pemerintahan yang menggantikan Soeharto sambil menambahkan bahwa terlalu dini untuk membuat prediksi terhadap masalah tersebut. Situasi Indonesia dewasa ini dibahas hanya dalam konteks berupa briefing oleh pimpinan delegasi Indonesia atas kenyataan berdasarkan fakta yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia. Masalah lain yang dibahas adalah kemungkinan masuknya Mongolia dan Korea Utara dalam ARF.<sup>61</sup>

Sepuluh Menteri Luar Negeri ASEAN juga sepakat untuk tetap mempertahankan prinsip *non-interference* sebagai bagian dari TAC.. Sementara Menlu Singapura yang akan menjadi Tuan rumah Sidang ARF ke VI menyatakan bahwa proses ARF sedikit mengalami kendala dalam meningkatkan pembahasan dari CBM ke diplomasi preventif dalam Sidang ARF ke V oleh karena anggota-anggotanya belum menyetujui peningkatan langkah dari CBM kepada Diplomasi Preventif. Meskipun ASEAN menganggap ARF sudah masuk ke Tahap Diplomasi Preventif namun sejumlah negara lain seperti China menilai ARF Masih belum menyelesaikan Tahap CBM.

Di samping itu juga dicatat keberhasilan dari pelaksanaan kegiatan Track I dan Track II untuk intersessional selama bulan Juli 1998-Juli 1999 termasuk di dalamnya pertemuan *Intersessional Support Group* on CBM di Honolulu pada 4-6 November 1998 dan Bangkok 3-5 Maret 1999. Demikian juga penyelenggaraan dalam Pertemuan sela tentang *Disaster Relief* di Moskow tanggal 11-13 April 1999 dan juga Pertemuan Para Pakar ARF (*ARF Eminent/Experts Group*) untuk Disaster Relief di Bangkok 29 Januari 1999.

<sup>60</sup> “ARF Sesalkan Percobaan Nuklir di Asia Selatan”, *Media Indonesia* 28 Juli 1998

<sup>61</sup> “Forum Keamanan Asia Kecam India, Tetapi Hati-Hati Terhadap Indonesia”, *Suara Karya*, 23 Mei 1998.

Demikian pula dengan kegiatan *Track Two* yang meliputi penyelenggaraan *The ARF Workshop tentang Disaster Management* di Bangkok 25 sampai dengan 28 Januari 1998, *Council on Security and Cooperation in Asia Pacific (CSCAP) Seminar* (sebagai *track two*) mengenai Diplomasi Preventif di Bangkok 28 Februari sampai dengan 2 Maret 1999 dan Konferensi tentang *Comprehensif Security and Cooperation* tingkat Asia Pasifik di Vladivostok tanggal 25-27 April 1999

Pertemuan ARF di Singapura diselenggarakan di tengah-tengah seruan kepada ARF untuk menerapkan pendekatan yang lebih efektif dalam menyelesaikan berbagai pertikaian. Untuk meningkatkan peran ARF menjadi Forum kerjasama keamanan dan politik kawasan, ASEAN ingin menerapkan diplomasi preventif dan meninggalkan gaya membangun kepercayaan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan dengan keamanan. menanggapi tantangan akibat perubahan politik dan keamanan yang cepat di kawasan ini, ARF harus menggerakkan gagasan dan aktivitasnya ke depan seperti yang dikatakan Menlu Luar Negeri Indonesia Ali Alatas. Strategi ARF saat ini menekankan pada upaya penyelesaian perselisihan melalui usaha membangun kepercayaan. Pentingnya untuk mengembangkan relevansi dan efektivitas ARF dalam mengatasi tantangan yang dihadapi kawasan ini di tengah-tengah perubahan lingkungan politik dan keamanan seperti yang dinyatakan oleh para Menteri Luar Negeri ARF. Namun pernyataan tersebut juga memperingatkan bahwa upaya memajukan proses ARF harus dilakukan dengan ceta yang sesuai bagi semua anggota dan berdasarkan konsensus.<sup>62</sup>

Para Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan “kemitraan strategis” di antara kekuatan besar seperti AS, China, Jepang dan Rusia adalah sumbangan vital untuk perdamaian, keamanan, stabilitas dan keamkmuran di Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara. Sementara itu Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright menyerukan agar Asa mencari jalan untuk memerangi korupsi dan kronisme. Albright juga memperingatkan terlalu cepat untuk menyatakan bahwa kawasan Asia telah berhasil keluar dari krisis.

---

<sup>62</sup> “ARF Harus Lakukan Pendekatan Lebih Efektif Untuk Selesaikan Berbagai Perselisihan” *Suara Karya*, 26 Juli 1999.

Ketegangan di kawasan Selat Taiwan dan Laut Cina Selatan mendominasi pembicaraan di Forum Regional ASEAN pada Pertemuan ARF di Singapura.<sup>63</sup> Dalam pertemuan tersebut Menteri Luar Negeri China Tang Jiazuang memperingatkan seluruh peserta untuk tidak ikut campur tangan dalam masalah Taiwan. Menteri Luar Negeri China Jiazuang juga menambahkan bahwa teritori dan kedaulatan China tidak dipisahkan dan tidak membiarkan adanya pelanggaran dan campur tangan. Kemudian ditegaskan pula oleh Menteri Luar Negeri Tang bahwa apabila muncul tindakan mendukung kemerdekaan Taiwan dan upaya lain oleh pasukan asing untuk memisahkan Taiwan dari induknya warga dan pemerintah China tak akan tinggal diam.<sup>64</sup>

Tang juga menambahkan bahwa AS pada saat ini harus berhati-hati agar tidak mengataan sesuatu yang mungkin hanya akan menyulut semangat kemerdekaan Taiwan. Para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan kembali sikap mereka terhadap kebijakan Satu China secara resmi mengakui Beijing sebagai pemerintah China yang sah. Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga menambahkan bahwa ASEAN tidak akan mengomentari konflik China-Taiwan karena akan berdampak pada masalah kehilangan kredibilitas di mata pemerintah China.

Penutupan Sidang ARF sempat tertunda satu jam akibat pertentangan tentang krisis Kosovo antara Menteri luar negeri AS dan Uni Eropa dengan rekan-rekannya dari China, India dan Rusia. Tetapi kompromi akhirnya tercapai juga berkat peranan Ali Alatas sebagai menteri luar negeri paling senior di Asia. Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright dan perwakilan Uni Eropa berkeberatan atas keberadaan paragraf 9 tentang pemboman NATO atas Yugoslavia termasuk atas Kedutaan Besar China di Beograd. Namun Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas menyatakan bahwa keberatan tersebut tidak beralasan sebab pemboman sudah dibahas pada makan malam ARF tanggal 25 Juli juga tingkat SOM ARF di Singapura 20-21 Mei 1999. Alatas juga menanyakan bagian mana pada paragraf 9 yang menjadi keberatan negara-negara NATO.<sup>65</sup>

Paragraf tersebut menyebut bahwa ARF sangat menyesalkan pemboman itu yang dianggap sebagai pelanggaran wilayah kedaulatan negara lain dan melanggar Piagam

<sup>63</sup> "ASEAN Stresses importance of regional security", *The Jakarta Post* 24 Juli 1999

<sup>64</sup> "Forum Regional ASEAN Sorot Taiwan dan Spratly : Cina Minta Amerika Sedikit Bicara", *Republika* 27 Juli 1999

<sup>65</sup> "Penutupan Sidang ARF Sempat Tertunda Sejam", *Kompas*, 27 Juli 1999

PBB, Juga disebutkan penyesalan mendalam ARF terhadap pemboman Kedutaan Besar RRC yang menewaskan tiga korban dan merusak gedung tersebut. Paragraf tersebut didukung oleh ASEAN juga tiga negara besar Rusia, China, India. Menlu AS Albright berkilah bahwa pemboman NATO dapat dibenarkan sebab bertujuan lenghentikan pelanggaran HAM rezim Slobodan Milosevic terhadap warga Kosovo. Akhirnya Menteri Luar Negeri Ali Alatas melakukan intervensi dalam mengupayakan kompromi antara kedua pihak Dengan cara membacakan kembali kalimat per kalimat dari paragraf 9. Akhirnya keberatan Amerika Serikat dan Uni Eropa ditampung dengan tambahan kalimat berbunyi “Mendesak semua pihak bekerjasama dengan PBB mengakhiri keagatan perang dan kejahatan terhadap masalah kemanusiaan dan supaya rakyat Kosovo dapat menikmati Hak Asasi Manusia (HAM)”<sup>66</sup>

Sementara itu menurut Nugroho Wisnumurti yang saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri RI bahwa Peristiwa Pemboman yang dilakukan secara sepihak oleh NATO membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) merasa terpinggirkan. Karena itulah pernyataan bersama para wakil negara partisipan ARF berupaya untuk mengingatkan kembali pentingnya langkah-langkah masyarakat internasional untuk menghargai DK PBB, Lebih jauh lagi Menteri Luar Negeri China Tang Jiaxuan juga menuding pemboman itu sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB. Sementara Menteri Luar Negeri Rusia Igor Ivanov menilai peristiwa pemboman tersebut sebagai ancaman terhadap stabilitas dan perdamaian di Asia Pasifik.

Nugroho Wisnumurti yang mewakili Menteri Luar Negeri RI mengungkapkan pula sikap negara-negara ARF yang menghargai upaya Pemerintah Indonesia menyiapkan penentuan pendapat di Timor Timur. Sementara Menteri Luar Negeri RI Ali Alatas mengingatkan bahwa masalah Timor Timur adalah masalah yang sangat kompleks karena melibatkan emosi dan obsesi kedua kelompok yang bertikai yang berulang kali menyerang. Apabila tidak dikelola dengan baik maka dikhawatirkan akan terjadi lagi kekerasan terutama jika hasil akhir referendum menunjukkan tipisnya perbedaan persentase antara yang memilih tonomi dengan yang memilih merdeka. Ditambahkan

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

oleh Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri RI bahwa Indonesia sudah cukup menderita karena masalah pengelolaan pengungsi dari Timor Timur ke Timur Barat..

Sementara Menteri Luar Negeri AS Madeleine Albright menambahkan bahwa penggelaran personel *United Nations Mission in East Timor (UNAMET)* merupakan kemajuan positif. Namun AS tetap memprihatinkan berlanjutnya kekerasan yang akan menciptakan suasana intimidasi. Karena itu Pemerintah AS meminta Pemerintah Indonesia memenuhi kewajibannya menciptakan suasana yang aman pada referendum.

Keprihatinan ARF terhadap pengembangan peluru kendali nuklir Korea Utara berkaitan dengan adanya sinyal bahwa negara ini akan meluncurkan rudal jarak jauh untuk kedua kalinya. Para Menteri Luar Negeri ARF juga mencatat perkembangan di Semenanjung Korea masih memprihatinkan dan setuju agar pihak-pihak yang terlibat uangan sampai menerapkan kebijakan yang dapat merusak keamanan dan stabilitas. Berkaitan dengan terjadinya peningkatan ketegangan di Laut Cina Selatan karena tumpang tindih klaim atas Kepulauan Spratly, para Menteri Luar Negeri ARF menilai perlu ada *code of conduct* untuk mengelola klaim yang tumpang tindih. Menteri Luar Negeri AS menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat dapat menyelesaikan masalah sesegera mungkin. Juga menyangkut masalah kebebasan navigasi di wilayah ini karena Laut Cina Selatan merupakan jalur sangat penting dimana 70% pasokan minyak ke Jepang melewati halur ini, Para Menteri Luar Negeri ASEAN saat itu juga tengah membahas *code of conduct* untuk masalah Spartly. Cina juga siap membahas *code of conduct* yang dianggap sebagai langkah yang mengejutkan.<sup>67</sup>

Lebih lanjut para Menteri Luar ARF sepakat bahwa melalui penyelenggaraan Forum Keamanan terkemuka Asia mereka bertekad untuk meningkatkan kerjasama dalam mengupayakan perdamaian yang lestari di kawasan Asia dan berjuang keras untuk mengatasi serangkaian masalah yang menjadi ancaman stabilitas. Para Peserta Sidang ARF di Bangkok tersebut juga menyambut masuknya Korea Utara sebagai anggota ke 23. Menteri Luar Negeri Thailand Surin Pitsuwan selaku pemimpin Sidang ARF ke VII menyatakan bahwa seluruh negara peserta ARF menyatakan keyakinannya bahwa tambahan anggota terakhir ke dalam ARF akan memberikan sumbangan yang lebih besar kepada perdamaian dunia, meningkatkan rasa saling pengertian dan saling kepercayaan

<sup>67</sup> "Lansekap Baru Perimbangan Kekuatan di Asia Pasifik", *Kompas*, 1 Agustus 1999.

bagi kawasan Asia Pasifik. Menteri Luar Negeri Pitsuwan kemudian menambahkan bahwa setelah berjuang selama enam tahun dan menghadapi tantangan luar biasa, saat inilah merupakan momen yang tepat bagi ARF untuk tinggal landas menuju tahap selanjutnya.<sup>68</sup>

Dalam pertemuan Bangkok juga diputuskan untuk lebih memperhatikan masukan dari Pertemuan ARF ke VI tahun 1999 mengenai kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara pelaksanaan CBM dengan diplomasi preventif.. Untuk mengatasi hal tersebut maka menlu ARF memutuskan untuk menunjuk Thailand mewakili ARF dalam melakukan dialog dengan PBB, *Organization of African States* (OAS) dan *Organization on Security and Cooperation in Europe* (OSCE) sebagai pihak-pihak yang juga melaksanakan CBM dan diplomasi preventif. Sementara jalur kedua ARF juga diharapkan dapat membahas masalah tersebut dalam Seminar atau Workshop para pakar yang dapat menghasilkan masukan untuk mengatasi tumpang tindih dari kedua pengertian tersebut.<sup>69</sup>

Sebelum Pertemuan ARF ke VII di Bangkok, juga telah diselenggarakan Pertemuan *The ARF Inter-Sessional Support Group on CBM* di Tokyo pada 13-14 November 1999 dan Singapura 5-6 April 2000. Dalam kedua pertemuan tersebut dibahas secara lebih terperinci dan detail isu-isu yang pernah dibahas dalam Pertemuan ARF ke VI di Singapura seperti masalah Proliferasi Persenjataan Nuklir khususnya komitmen negara-negara partisipan ARF untuk menghormati *Non-Proliferation Treaty* (NPT) dan juga *Comprehensive Test-Ban Treaty* (CTBT), perkembangan kondisi keamanan di Semenanjung Korea khususnya isu nuklir Korea Utara kemudian perkembangan situasi di Laut Cina Selatan terutama dikaitkan dengan penerapan *United Nations Convention on Law of Sea* (UNCLOS) termasuk juga perkembangan integrasi ASEAN menjadi ASEAN 10.

Di samping itu juga dibahas keterkaitan CBMs dengan fenomena kejahatan transnasional di kawasan serta kemungkinan terjadinya tumpang tindih antara CBMs dengan diplomasi preventif. Dalam Pertemuan ARF ke VII tersebut juga dilakukan pertukaran pandangan mengenai situasi politik dan keamanan kawasan termasuk

<sup>68</sup> ASEAN Regional Forum Document Series 1994-2004, *op,cit*, p.191

<sup>69</sup> "ASEAN fills Asia Security Vacuum", *The Jakarta Post*, 12 Agustus 2000

pembahasan mengenai perkembangan masalah Timor Timur paska jajak pendapat dan proses pembentukan pemerintahan baru di bawah pengarahannya UNTAET. Dalam pertemuan tersebut juga muncul sejumlah proposal dari negara peserta ARF misalnya proposal China untuk memindahkan CBM dalam *Regional Maritime Information Center* dari prioritas kedua menjadi prioritas utama (*basket two to basket one*), kemudian proposal Singapura untuk bersama-sama dengan AS menjadi tuan rumah penyelenggaraan pelatihan mengenai *Combined Humanitarian Assistance Response Training*, proposal Republik Korea Selatan untuk mensponsori penyelenggaraan Joint ARF Seminar on *Civil-Military Relations in Peace Support Operation* bersama Kanada dan juga penyelenggaraan *Workshop on Asia Pacific Security*. India juga mengajukan proposal untuk menyelenggarakan *Workshop on Anti Piracy* dan penyampain proposal dari Thailand guna mengadakan seminar mengenai *The Law of Armed Conflict* dan proposal Kanada untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Jepang dalam seminar mengenai *Conventional Weapons*.

Pada tanggal 4-6 Mei 2000 diselenggarakan *The Fourth ARF Inter-Sessional Meeting on Disaster Relief* di Vietnam. Pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah berfokus pada upaya peningkatan mekanisme kerja dalam penanganan masalah bencana alam termasuk menerima proposal dari negara partisipan untuk menyediakan fasilitas teknis dalam mendukung mekanisme kerja penanggulangan bencana alam di kawasan Asia Pasifik.

Sebelum dimulainya Pertemuan Tingkat Tinggi ARF, Cina menyatakan akan memanfaatkan ARF di Bangkok untuk mengemukakan keberatannya atas rencana sistem pertahanan antirudal (*Theater Missile Defense* atau TMD) AS bagi Asia Timur Laut. Dalam pelaksanaan program TMD di Asia Timur Laut Washington melakukan uji coba program Pertahanan Rudal Nasional (*National Missile Defense* atau NMD). Program tersebut ditujukan untuk melindungi pasukan AS dan sekutu-sekutunya di Asia dari serangan rudal yang berasal dari negara musuh seperti Korea Utara, Iran dan Irak. China dan Rusia bersama-sama menentang program NMD Kedua negara mengatakan program tersebut akan memicu kembali perlombaan senjata. Cina mengatakan AS melebih-lebihkan potensi ancaman Korea Utara meski pada Agustus 1998 Pyongyang

meluncurkan rudal ke Jepang. AS juga yakin bahwa rudal-rudal Korut akan digunakan untuk menghancurkan kota-kota di AS pada 2005.<sup>70</sup>

Beijing juga mengkhawatirkan kerjasama AS dan Jepang dalam TMD akan melindungi Taiwan. China menganggap Taiwan adalah provinsi yang memberontak dan mengancam akan melakukan penyerbuan jika pulau tersebut mendeklarasikan kemerdekaan atau menuna pembicaraan tentang penyatuan kembali wilayah tersebut. China juga berharap negara-negara Asia Tenggara memanfaatkan forum ini untuk menjaga wilayah Laut Cina Selatan dari perselisihan dengan negara-negara ASEAN. Isu Spratly tetap dianggap sebagai isu bilateral oleh China.

Sementara itu berkaitan dengan perkembangan masalah Timor Timur, Menteri Luar Negeri Surin Pitsuwan juga menambahkan bahwa anggota-anggota ARF menyatakan dukungannya bagi kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan nasional Indonesia. Namun menyerukan tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah pengungsi Timor Timur dalam kegiatan milisi. Sementara itu Selandia Baru, Papua Nugini dan Australia menyatakan keprihatinannya terhadap masalah Timor Timur namun gambaran menyeluruh masih jauh lebih positif karena situasinya tidak semakin memburuk. Dalam Forum ARF ke VII di Bangkok dibahas mengenai kematian seorang penjaga perdamaian PBB di Timor Timur dan mendesak masyarakat internasional untuk membantu proses rehabilitasi dan pembangunan kembali wilayah tersebut.<sup>71</sup>

Sehubungan dengan kasus tersebut sebenarnya Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono telah meminta kalangan internasional untuk tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Pemerintah TNI maupun pimpinan TNI di Jakarta dan Denpasar hingga ditemukan bukti sesungguhnya pelaku yang menewaskan Personil Pasukan Perdamaian PBB William Manning dari kesatuan Selandia Baru di Timor Timur 24 Juni lalu.<sup>72</sup> Sedangkan Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab menyatakan Pemerintah Indonesia akan mengajak Pemerintah Selandia Baru untuk melakukan investigasi bersama atas meninggalnya tentara Selandia Baru tersebut. Dalam Pertemuan ARF tersebut Direktur Jenderal Departemen Luar Negeri RI Nugroho Wisnumurti mewakili Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda menjelaskan kepada forum mengenai

<sup>70</sup> "Cina Manfaatkan ARF untuk Pertanyakan Rencana TMD", *Suara Pembaruan*, 22 Juli 2000.

<sup>71</sup> "ARF Dukung Indonesia", *Suara Karya* 28 Juli 2000.

<sup>72</sup> "ARF Sesalkan Insiden Timtim : Tak Adil Menuding TNI", *Kompas*, 28 Juli 2000

perkembangan kondisi di Timor Timur yang dilanjutkan dengan pernyataan keprihatinan dari Selandia Baru, Australia dan Thailand mengenai perkembangan situasi keamanan terakhir di Timor Timur dengan fokus pada kegiatan milisi. Penyesalan atas insiden tersebut serta desakan untuk melakukan tindakan kolektif mengatasi masalah pengungsi juga disampaikan dalam Pertemuan ARF di Bangkok namun lebih jauh para menteri luar negeri ARF menyambut baik kecenderungan positif yang terjadi serta kerjasama antara Indonesia dan UNTAET.<sup>73</sup>

Dalam membahas perkembangan kondisi keamanan di Timor Timur, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengatakan untuk menjaga stabilitas wilayah, Indonesia harus menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan pengungsi dan juga kegiatan milisi. Sehubungan dengan tewasnya tentara penjaga perdamaian Selandia Baru di Timor Timur, Menteri Luar Negeri Australia dan Selandia Baru juga mendesak Indonesia menyelesaikan masalah pengungsi di tempat-tempat penampungan di wilayah Indonesia di Nusa Tenggara Timur untuk menghindari lahirnya milisi-milisi baru.

Sehubungan dengan semakin berkembangnya ancaman keamanan dari kejahatan transnasional maka para menteri luar negeri ARF sepakat untuk menyusun program kerjasama untuk mengantisipasi meluasnya kejahatan transnasional, khususnya perdagangan obat-obatan terlarang, perompakan, perdagangan wanita dan anak serta senjata ringan. Para menteri luar negeri negara peserta ARF juga mencatat dampak serius masalah lain seperti pencucian uang, korupsi dan kejahatan dunia maya.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Korea Utara Paek Nam Sun mengatakan diterimanya Korea Utara dalam Forum ARF adalah pertanda keinginannya untuk bersatu kembali dengan Korea Selatan dan pemulihan hubungan dengan bekas musuh-musuh Korea Utara pada masa Perang Dingin. Pemerintah Korea Utara juga memiliki keinginan untuk mengupayakan pembangunan sebuah Asia yang merdeka, damai dan sejahtera. Namun Menteri Luar Negeri Korea Utara Paek menambahkan bahwa perdamaian di Semenanjung Korea bergantung pada pengakhiran campur tangan kekuatan asing. Lebih lanjut Paek memuji tentang membaiknya hubungan dengan Korea Selatan dewasa ini dan berharap bahwa KTT Pyongyang yang telah berlangsung pada bulan Juni 2000 yang

---

<sup>73</sup> *Ibid.*

mempertemukan Pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan akan memberikan semangat baru bagi upaya reunifikasi di Semenanjung Korea<sup>74</sup>

Dalam Pertemuan di Bangkok, para Menlu ARF juga menekankan pentingnya untuk mengantisipasi ancaman keamanan yang ditimbulkan oleh arus globalisasi terutama pada masa paska perang dingin. Menteri Luar Negeri Thailand Surin Pitsuwan menegaskan bahwa semua pihak setuju bahwa telah terjadi perubahan yang mendasar pada kondisi keamanan paska perang dingin dimana semakin banyak aktor yang bermain terutama di kalangan aktor non-negara.

Di samping itu semakin mengglobalnya pemakaian teknologi informasi juga cenderung akan semakin membuat masalah keamanan menjadi semakin rumit. Indikasinya adalah penggunaan teknologi informasi yang canggih untuk mendukung kegiatan yang mengancam keamanan kawasan. Sementara Menteri Luar Negeri China Tang Jiaxuan menambahkan bahwa arus globalisasi juga membawa dampak pada semakin meningkatnya permasalahan ekonomi terutama kesenjangan ekonomi yang dapat melahirkan gerakan-gerakan pemberontak baik yang bernuansa separatisme maupun menggunakan budaya seperti agama dan etnis sebagai dasar perjuangannya yang tidak saja mengancam kondisi domestik negara tetapi juga dapat berdampak pada keamanan regional.<sup>75</sup>

Sebelum Pertemuan puncak ARF ke VIII, juga telah dilakukan pertemuan *The ARF Inter-Sessional Support Group on CBM* di Seoul Korea Selatan pada 1-3 November 2000 dan Kuala Lumpur, Malaysia pada 18-20 April 2001. Pembahasan dalam kedua pertemuan tersebut adalah penajaman dari hasil-hasil Pertemuan ARF ke VII di Bangkok termasuk di dalam penetapan peran dari the ARF Chair kemudian proses pembentukan kelompok pakar ARF dan juga penerbitan *Annual Security Outlook*.

Kemudian di tempat yang sama juga diselenggarakan Pertemuan *The ARF Experts Group Meeting on Transnational Crime* pada tanggal 30-31 Oktober 2000 di Korea Selatan dan 16-17 April 2001 di Malaysia. Pertemuan tersebut adalah untuk pertama kalinya diadakan sehubungan dengan meningkatnya perhatian ARF terhadap kejahatan transnasional yang menjadi isu keamanan kawasan yang dominan memasuki

---

<sup>74</sup> *Ibid*

<sup>75</sup> "Globalization Poses Security Risks : Forum", *The Jakarta Post*, 28 Juli 2000

abad ke 21. Pada pertemuan mengenai kejahatan transnasional tersebut ditetapkan tiga bentuk kejahatan transnasional yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang memiliki dampak terhadap keamanan kawasan an membutuhkan kerjasama di antara negara-negara ARF untuk melakukan langkah-langkah antisipasi. Ketiga kejahatan transnasional tersebut adalah *Piracy, Illegal Migration dan Illicit Trafficking of Small Arms*. Dalam pertemuan di Seoul, sejumlah negara telah memasukkan laporan mengenai perkembangan masalah kejahatan transnasional yang berkaitan dengan keamanan negara masing-masing khususnya berkaitan dengan tiga kejahatan transnasional yang telah disepakati membawa dampak terhadap keamanan kawasan Asia Pasifik.

Mengomentari mengenai masalah perkembangan perumusan langkah-langkah diplomasi preventif dalam ASEAN Regional Forum, Amitav Acharya pakar keamanan Asia Tenggara menyatakan bahwa prosedur diplomasi preventif ARF bagaimanapun juga harus terus dilanjutkan dapat upaya mengatasi konflik antar negara dan bukan sebaliknya meningkatkan perselisihan pendapat antar negara. Acharya juga menyatakan bahwa ARF dapat meminimalisir kepercayaan negara-negara Asia Pasifik pada perjanjian militer bilateral yang eksklusif untuk melangkah kepada kerjasama multilateral yang lebih terbuka. Hal ini dikarenakan ARF berbeda dari institusi multilateral gaya Eropa yang lebih mengutamakan proses kelembagaan dan legalistik. ARF bukan merupakan institusi legalistik dan berupaya menghindari pendekatan yang mengikat dalam pengelolaan kerjasama keamanan di Asia Pasifik. Acharya juga berpendapat ARF telah berhasil melibatkan dua pemain kunci regional yakni AS dan Cina yang keduanya semula enggan bergabung ke dalam wadah keamanan multilateral.<sup>76</sup>

Sehubungan dengan terjadinya serangan terorisme di Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, maka ARF menyambut baik hasil-hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan dua workshop dengan topik *Financial Measures against Terrorism* di Honolulu pada 24-26 Maret 2002 dan *Prevention Terrorism* di Bangkok 17-19 April 2002 Para Menteri Luar Negeri ARF juga menyatakan bahwa dalam upaya mengembangkan keamanan di tingkat regional dan internasional, maka serangan teroris pada tragedi 9/11 membawa dampak yang besar terhadap kondisi keamanan secara menyeluruh. Karena itulah negara-negara peserta ARF dihimbau untuk semakin

---

<sup>76</sup> "Forum Regional ASEAN Proleh Legitimasi Atasi Konflik Regional", *Koran Tempo*, 26 Juli 2001

memperkuat kerjasama keamanan dalam upaya memerangi terorisme. Para Menteri luar negeri ARF juga sepakat untuk mendukung seluruh Resolusi Dewan Keamanan PBB yang berhubungan dengan upaya untuk Mencegah dan Memerangi kegiatan Terorisme yang dikeluarkan terutama paska 11 September 2001. Para Menteri luar negeri ARF juga mengeluarkan pernyataan bersama mengenai langkah-langkah untuk memerangi bantuan finansial terhadap kegiatan terorisme (*ARF Statement on Measures Against Terrorist Financing*).<sup>77</sup>

Isi pernyataan tersebut mencakup langkah-langkah untuk melakukan pembekuan aset teroris, implementasi dari standar internasional dalam kaitannya dengan penerapan hukum internasional, kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan tenaga ahli, bantuan teknis, serta sistem pelaporan reguler. Dalam hal ini ARF akan mengadakan kerjasama dengan badan-badan internasional seperti IMF, World Bank, FATF, FSF dan *Basile Committee of Banking Supervisor*.

Di samping itu para peserta Pertemuan ARF ke IX juga menyambut baik penyelenggaraan untuk pertama kalinya Pertemuan *Inter-Sessional on Counter Terrorism and Transnational Crime (ISM on CT-CT)* Kegiatan Inter-Sessional tersebut akan menambah jumlah Pertemuan Inter-Sessional ARF yang sebelumnya terdiri atas Inter-Sessional Meeting untuk CBMs dan Disaster Relief. Di samping itu para Menteri luar negeri ARF juga menyambut baik diselenggarakannya Pertemuan Khusus Tingkat Menteri ASEAN yang membahas Program Kerja untuk masalah Terorisme di Kuala Lumpur dan penandatanganan *The Agreement on Information Exchange and the Establishment of Communication Procedures among Indonesia, Malaysia and the Phillipines* pada 7 Mei 2002.<sup>78</sup>

Selain membahas isu-isu yang berkaitan dengan ancaman kegiatan terorisme internasional, para Menteri luar negeri ARF juga tetap melakukan pembahasan lanjutan mengenai langkah-langkah mempromosikan CBMs dalam penanganan kondisi keamanan di Semenanjung Korea. Demikian pula dengan langkah-langkah untuk terus mengembangkan kerjasama dalam pengelolaan keamanan di wilayah Laut Cina Selatan melalui penerapan *code of conduct of the South China Sea* Para Menteri luar negeri ARF

---

<sup>77</sup> ASEAN Regional Forum Document Series 1994-2004, *op.cit.*, p. 277

<sup>78</sup> *Ibi.*, p. 269.

juga menyambut baik hasil-hasil dari KTT ASEAN ke 7 termasuk Pertemuan ASEAN+3 yang ke V dan ASEAN+1 pada 5-6 November 2001 di Brunei Darussalam terutama dalam upaya memperkuat proses reformasi ekonomi, integrasi dan kerjasama ekonomi kawasan.

Negara-negara peserta ARF juga menyambut baik proses kemerdekaan Timor Lorosae pada tanggal 20 Mei 2002 dan memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan negara yang merdeka. Para menteri luar negeri ARF juga terus mendorong masyarakat internasional untuk melakukan bantuan terhadap proses rekonstruksi dan pembangunan the Democratic Republic of East Timor di seluruh wilayah serta terus mendukung aktivitas the *United Nations Mission in East Timor* termasuk memberikan apresiasi terhadap dukungan Pemerintah Indonesia terhadap kemerdekaan Timor Timur dan pembangunan hubungan diplomatik bilateral yang harmonis.

Sebelum dilaksanakannya Pertemuan ARF ke IX kembali diselenggarakan *Pertemuan Inter-Sessional ARF Support Group on CBMs* di New Delhi India pada 19-21 Desember 2001 dan Ha Noi Vietnam 22-24 April 2002. Dalam pertemuan tersebut langkah-langkah secara lebih terperinci mengenai penerapan CBMs terhadap isu-isu yang menjadi agenda utama pembahasan dalam Pertemuan ARF sebelumnya di Hanoi. Dalam pertemuan tersebut juga mulai dibahas masalah Terorisme yang dikaitkan dengan perhatian terhadap masalah Kejahatan Transnasional di kawasan yang sebelumnya telah ditetapkan untuk membatasi pada tiga isu yaitu *Piracy, Illegal Imigrant dan Illicit Trafficking on Small Arms*.

Kemudian pada tanggal 17-19 April 2002 juga diadakan *ARF Workshop on Prevention of Terrorism* di Bangkok Thailand. Dalam workshop tersebut negara-negara partisipan ARF menggarisbawahi pentingnya untuk mengantisipasi dampak global dari kegiatan terorisme dimana seluruh negara ARF termasuk negara di luar ARF tidak ada yang dapat terbebas dari ancaman dan serangan terorisme. Negara-negara ARF juga menyetujui bahwa terorisme akan menjadi ancaman yang serius dalam jangka panjang terhadap keamanan baik di tingkat nasional, regional dan internasional dan juga akan dapat menjadi ancaman yang buruk terhadap kondisi ekonomi termasuk langkah-langkah pembangunan ekonomi yang dilakukan negara-negara ARF.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> *Ibid.* p. 298

Workshop tersebut kemudian juga menghasilkan rekomendasi ARF berupa : (1) upaya untuk memberikan kepada *ARF Chair* daftar *national counter-terrorism agencies* yang relevan dan ringkasan dari langkah-langkah yang telah dilaksanakan baik di tingkat nasional, bilateral maupun multilateral dalam upaya mengantisipasi masalah terorisme, termasuk pengembangan kerjasama ARF untuk masalah terorisme di masa mendatang; (2) memberikan dukungan kepada peran dari para ketua ARF dalam melakukan kerjasama dengan pihak-pihak di luar ARF dalam kerangka *counter-terrorism*; (3) membangun jaringan kerjasama di bidang penerapan hukum, imigrasi dan bidang-bidang lain yang relevan dalam upaya pertukaran informasi dan kegiatan intelijen termasuk penggunaan kemampuan teknologi informasi dan jaringan komunikasi; (4) memberikan dukungan kepada sesama negara ARF dalam mengembangkan kapabilitas *counter-terrorisme* domestik melalui pengembangan kerjasama dengan institusi regional dan internasional yang relevan; (5) Melaksanakan pertukaran pengalaman dan konsultasi secara terus menerus termasuk penentuan langkah-langkah praktis penanganan terorisme dan (6) mengupayakan langkah-langkah penanggulangan ancaman terorisme di masa mendatang khususnya yang berkaitan dengan aspek keamanan maritim dan pelayaran internasional melalui penyelenggaraan workshop dan seminar.<sup>80</sup>

Sebelumnya pada tanggal 4 Oktober 2001 di Bandar Sri Begawan Brunei Darusalam Para Ketua ARF juga mengeluarkan pernyataan bersama sehubungan dengan tindakan Terorisme 11 September 2001 yaitu Negara-Negara dan Organisasi yang berpartisipasi dalam ARF mengutuk tindakan terorisme di AS pada tanggal 21 September 2001 yang telah membawa korban ribuan orang, tindakan terorisme internasional telah memberikan ancaman yang nyata terhadap perdamaian dan keamanan internasional membutuhkan langkah-langkah untuk melindungi dan mempertahankan seluruh penduduk dunia dan juga perdamaian dan keamanan dunia. Perlu pula dicatat bahwa penyebab mendasar dari fenomena tersebut harus segera ditemukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan internasional terorisme, Pemerintah negara-negara ARF akan menggunakan seluruh cara yang dimungkinkan dan dibutuhkan untuk mencari, menangkap dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap serangan tersebut dan mencegah terjadinya serangan berikut kemudian ARF akan merumuskan

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

langkah-langkah serta cara-cara untuk melakukan kerjasama di masa mendatang dalam upaya memerangi terorisme dan juga tindakan-tindakan yang berhubungan dengan kegiatan tersebut.

Dalam menanggapi perkembangan masalah terorisme delegasi China mengingatkan dalam Forum ARF bahwa langkah penting dalam mengantisipasi perluasan ancaman terorisme adalah mencari akar kegiatan terorisme yang biasanya berasal dari masalah ketidakadilan terutama di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri China Tang Jiaxuan menyatakan bahwa dalam menggunakan ARF sebagai forum keamanan untuk memerangi masalah terorisme dan mengelola keamanan regional maka perlu dibentuk kerjasama keamanan atas dasar rasa percaya, persamaan dan prinsip saling menguntungkan. Menteri luar negeri China Jiaxuan menambahkan bahwa telah menjadi tanggungjawab bersama untuk menjaga stabilitas dan pembangunan pada masa paska perang dingin terutama di kawasan Asia Pasifik. Lebih lanjut Menteri Luar Negeri China juga menekankan perlunya untuk membangun tatanan internasional yang adil dalam upaya mengantisipasi dominasi perang AS terutama dalam memerangi terorisme dan berharap bahwa ASEAN dapat memainkan peran yang dominan dalam mengembangkan kerjasama untuk memerangi ancaman terorisme.hin ARF.<sup>81</sup>

Hal lain yang menarik dalam Pertemuan ARF di Hanoi adalah desakan ARF terhadap Pakistan untuk menghentikan kelompok militan yang kerap melakukan tindakan kekerasan terhadap India. Sementara India terus melanjutkan upayanya untuk menghalangi Pakistan yang telah mengajukan aplikasi untuk bergabung dengan ARF sampai Pakistan akan menerapkan sistem demokrasi dan menghentikan tindak terorisme terhadap India. India menuduh Pemerintah Pakistan telah mensponsori sejumlah tindak kekerasan yang dilakukan kelompok militan terhadap India terutama di wilayah Kashmir dan berasumsi bahwa kelompok militan tersebut memiliki jaringan dengan kelompok Al-Qaeda yang sejak peristiwa 11 September 2001 sebagai tersangka utama di balik penghancuran Gedung WTC dan Pentagon<sup>82</sup>

Sementara Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menyatakan bahwa isu terorisme menjadi pembahasan yang dominan dalam Pertemuan ARF ke VIII.

<sup>81</sup> "China Asks Its Neighbors to "treat" Root Causes of Terrorism", *The Jakarta Post*, 1 Agustus 2002

<sup>82</sup> "Asian Security Forum Urges Pakistan to end terrorism", *The Jakarta Post*, 1 August 2002

Sebagai dampaknya adalah diperlukan sejumlah langkah-langkah untuk mengantisipasi ancaman terorisme tersebut. Salah satunya adalah kesepakatan ARF untuk melakukan upaya pembekuan aset keuangan kelompok teroris. Setiap negara anggota ARF juga dihimbau untuk dapat segera membangun unit intelijen dalam upaya menyelidiki dana-dana terorisme dan kemudian melakukan langkah pembekuan. Termasuk mengkaitkan antara pendanaan terorisme dengan penyelidikan kegiatan terorisme. ARF akan meningkatkan kerjasama dengan *International Monetary Fund* (IMF), Bank Dunia dan lembaga keuangan global lainnya terutama dalam membekukan aset keuangan terorisme. Untuk mencegah aliran dana kelompok teroris, ASEAN sepakat membentuk jaringan kuat intelijen dan kerjasama.<sup>83</sup>

Dalam Pertemuan ARF seluruh delegasi sepakat untuk mengutuk tindak terorisme dan akan terus melakukan upaya memerangi terorisme. Namun dalam Pertemuan ARF di Brunei Darussalam juga terungkap kenyataan bahwa sejauh ini sebagian anggota ARF dinilai kurang memperlihatkan komitmen jelas melawan terorisme. Bahkan sebelum Pertemuan ARF ke IX sempat dipertanyakan pula tentang keseriusan Indonesia melawan terorisme terutama oleh AS. Namun pada akhirnya Menteri Luar Negeri AS yang semula menyembunyikan kekecewaan terhadap Indonesia, akhirnya memberikan apresiasi tinggi atas keseriusan Indonesia melawan terorisme. Memang semakin tersingkap bahwa Indonesia ternyata sangat serius melawan terorisme. Hanya saja Indonesia lebih memilih cara tertutup sehingga tidak menimbulkan efek publikasi yang tinggi.<sup>84</sup>

Pertemuan ARF di Banda Sri Begawan yang merupakan pertama bagi ARF sejak tragedi 11 September yang juga digunakan sebagai arena mempertegas komitmen bersama melawan terorisme. Para menteri luar negeri ARF sepakat bahwa serangan terorisme bisa terjadi kapan dan dimana saja tidak terkecuali di kawasan Asia Pasifik. Hal ini dikarenakan telah diindikasikan bahwa jauh sebelum tragedi 11 September, sudah beredar informasi intelijen bahwa gerakan terorisme sudah bergeser dari Timur Tengah ke kawasan Asia Pasifik. Diakui oleh para delegasi ARF bahwa Gerakan terorisme sulit dipatahkan jika tidak ada komitmen yang serius untuk mengantisipasi kegiatan terorisme.

<sup>83</sup> "Regional Forum Adopts Measures to Choke Off Terrorist Financing", *The Jakarta Post*, 1 Agustus 2002

<sup>84</sup> "Meski Penting, Topik Terorisme Bukan Satu-Satunya Agenda ARF", *Kompas*, 1 Agustus 2002

Upaya mematahkan gerakan terorisme tidaklah mungkin berhasil jika dilakukan sendiri-sendiri oleh setiap negara di kawasan.<sup>85</sup>

Kaum teroris dengan cepat bisa berpindah dan bergerak leluasa ke negara atau kawasan lain, karena itu ruang geraknya dibatasi di sebuah negara atau kawasan. Melalui sistem jaringan, kaum teroris dapat pula menyusun rencana dan melancarkan serangan dari negara tetangga misalnya. Upaya melawan terorisme tidak mungkin efektif juga masih ada negara yang menolerir kehadiran kaum teroris. Karena itulah Pertemuan ARF di Bandar Sri Begawan menjadi salah satu tonggak penting untuk membangun komitmen bersama negara-negara peserta ARF guna melawan ancaman terorisme regional maupun internasional.

Di samping membahas tentang ancaman terorisme Pertemuan ARF di Bandar Sri Begawan juga terus membahas isu semenanjung Korea, krisis Kashmir, dan ketegangan RRC-Taiwan. Ketiga persoalan tersebut dirasakan terus berlarut-larut sehingga mengundang keprihatinan mendalam dari seluruh peserta ARF. Oleh karena apabila ketiga permasalahan tersebut tidak segera dicarikan jalan keluarnya maka akan membawa dampak yang sangat besar terhadap stabilitas keamanan kawasan.

Kemudian dalam upaya melawan terorisme di kawasan Asia Pasifik akan menemui banyak hambatan jika isu Semenanjung Korea, perseteruan India-Pakistan dan ketegangan China-Taiwan tidak segera dapat diselesaikan. Oleh karena mulai muncul kekhawatiran bahwa dalam situasi keamanan yang tidak stabil karena masih adanya ketegangan dan persengketaan antar negara di kawasan Asia Pasifik, akan dapat dimanfaatkan oleh kaum teroris. Sehingga penting untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terhadap perluasan ancaman terorisme di Asia Pasifik secara paralel dan simultan dengan langkah-langkah pengelolaan ketegangan dan permusuhan yang terjadi antara India dan Pakistan untuk masalah Kashmir, krisis Nuklir di Semenanjung Korea dan konflik antara RRC dan Taiwan.

Dalam peringatan 10 tahun ARF para menteri luar negeri ARF juga memberi catatan secara khusus mengenai : (1) Manfaat dari ARF sebagai wadah untuk melakukan dialog multilateral dan bilateral serta sebagai area konsultatif dan pembentuk serta pengembangan prinsip-prinsip dialog dan kerjasama secara efektif serta keberhasilan

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

ARF dalam mempertahankan mekanisme konsensus dalam proses pengambilan keputusan, penerapan prinsip non-intervensi dan juga pengembangan langkah-langkah ke depan dengan laju yang dirasakan nyaman oleh seluruh pihak yang terlibat; (2) keinginan yang kuat di antara para partisipan ARF untuk mendiskusikan isu-isu keamanan dalam bentuk multilateral dialog; (3) pembangunan rasa saling percaya melalui kegiatan kerjasama; (4) pengembangan kebiasaan untuk berdialog dan berkonsultasi dalam menangani isu politik dan keamanan; (5) mempromosikan transparansi dalam langkah-langkah ARF melalui pertukaran informasi berkaitan dengan kebijakan pertahanan termasuk penerbitan buku putih pertahanan secara bersama dan (6) pengembangan jaringan di antara pihak-pihak baik yang mewakili institusi keamanan nasional maupun institusi pertahanan dan militer di antara partisipan ARF.<sup>86</sup>

Pada pertemuan ARF yang ke 10, para menteri luar negeri ARF juga terus membahas isu-isu keamanan yang selama ini kelihatannya menjadi agenda tetap pertemuan ARF seperti kondisi keamanan di Semenanjung Korea dengan senantiasa memberikan dorongan kepada pihak Korea Utara untuk melakukan kerjasama dengan Badan Energi Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency* atau IAEA) dan juga mempertimbangkan keputusan Korea Utara yang telah keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi. Kemudian para Menteri luar negeri ARF juga menyambut baik penandatanganan *the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* oleh ASEAN dan China di Phnom Penh 4 November 2002 yang diharapkan dapat lebih menjamin stabilitas keamanan di kawasan Laut Cina Selatan di masa mendatang. Termasuk terus memberikan perhatian dan dukungan terhadap terjadinya proses demokratisasi di Myanmar walaupun juga menunjukkan keprihatinan terhadap penahanan kembali tokoh Demokrasi Aung San Suu Kyi oleh pemerintah Junta Militer.

Dalam pertemuan ARF ke X juga dibahas isu-isu keamanan baik yang berkaitan dengan konflik internal seperti yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Indonesia, kemudian juga di Sri Lanka antara kelompok separtis Tamil Elam dengan Pemerintah Sri Lanka. Demikian pula para Menlu ARF senantiasa mendukung terjadinya proses perdamaian di Bougainville Papua Nugini termasuk langkah-langkah persiapan Pemilu serta perbaikan kondisi sosial dan ekonomi di

---

<sup>86</sup> ASEAN Regional Forum Document Series 1994-2004, *op.cit.*, p. 303

kepulauan Salomon paska konflik. Masalah Timor Leste juga tetap menjadi perhatian dalam pertemuan ARF di Phnom Penh terutama dukungan terhadap pengembangan hubungan bertetangga baik antara Timor Leste dengan Indonesia termasuk langkah-langkah pembangunan ekonomi, sosial dan politik di negara baru Timor Leste

Namun fokus pembahasan tetap pada masalah terorisme yang justru cenderung semakin meningkat ancamannya setelah terjadinya peristiwa bom Bali pada Oktober 2002 kemudian sejumlah peledakan bom di Riyadh Saudi Arabia dan Casablanca Maroko yang diduga memiliki hubungan dengan kelompok Al-Qaeda dan peristiwa 11 September 2001. Dalam kaitannya dengan kecenderungannya meningkatnya ancaman serangan terorisme tersebut, para menteri luar negeri ARF terus mendorong terjadinya langkah-langkah kerjasama dengan PBB dalam melaksanakan kebijakan Counter-Terrorism dan mendukung pembentukan *the APEC Counter-Terrorism Task Force* termasuk dukungan terhadap kerjasama multilateral maupun bilateral negara peserta ARF.

Para menteri luar negeri ARF juga memberikan apresiasi terhadap hasil-hasil pertemuan *the Inter-Sessional meeting on Counter-Terrorism and Transnational Crime (ISM on CT-TC)* di Karambunai, Sabah, Malaysia pada tanggal 21-22 Maret 2003 termasuk mengadopsi *the ARF Statement on Cooperative Counter-Terrorism Action on Border Security* yang diusulkan oleh ISM on CT-TC. Para Menlu ARF juga menyambut baik dibentuknya *the Southeast Asia Regional Center for Counter-Terrorism (SEARCCT)* di Kuala Lumpur Malaysia dan kembali mengadopsi *ARF Statement on Cooperation Against Piracy and Other Threats to Maritime Security*. Inti dari pernyataan bersama ARF untuk mengantisipasi ancaman terhadap keamanan maritim adalah menghubungkan antara isu *Piracy* dengan ancaman lainnya terhadap keamanan maritim dengan ancaman serangan teroris di kawasan perairan yang strategis sehingga dibutuhkan kerjasama untuk mengantisipasi hal tersebut.<sup>87</sup>

Dalam Pertemuan ARF ke X para Menteri luar negeri ARF juga menekankan pentingnya untuk semakin memperkuat jaringan antara jalur pertama dan jalur kedua berdasarkan *Canada's concept paper* mengenai *Strengthening Linkages between Track I and Track II in the ARF Context*. Sebelumnya pada tanggal 3-5 Juni 2003 di Darwin Australia juga diselenggarakan *ARF Workshop on Managing the Consequences A Major*

<sup>87</sup> ASEAN Regional Forum Document Series 1994-2004, *op.cit.*, p. 307

*Terrorist Attack* yang intinya adalah memperkuat kerjasama ARF untuk mengantisipasi perluasan serangan teroris. Kemudian pada tanggal 16 Oktober 2002 para ketua ARF juga mengeluarkan pernyataan bersama berkaitan dengan serangan teroris dalam bentuk peledakan Bom di daerah Pariwisata Bali Indonesia. Dalam pernyataan bersama tersebut para ketua ARF menyatakan keprihatinannya terutama karena sebagian besar korban ledakan bom adalah turis asing yang tengah berlibur di Bali dan mengutuk serangan tersebut sebagai tindakan kriminal yang tidak berprilaku manusiawi sehingga menyebabkan jatuhnya ratusan korban. Negara peserta dan organisasi yang terkait dengan ARF juga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam terhadap Pemerintah Indonesia atas tragedi bom Bali dan sekali lagi mengutuk tindakan tersebut sebagai tindak kriminal yang sama sekali tidak adil walaupun dilakukan dengan alasan tertentu. ARF juga terus mendorong langkah-langkah lebih lanjut untuk mengembangkan kerjasama dalam upaya memerangi tindakan kriminal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Namun dalam Pertemuan ARF kali ini terdapat sedikit ganjalan akibat ketidakhadiran Korea Utara. Sebelum berlangsungnya Pertemuan ARF ke X Pemerintah Korea Utara telah menyatakan mengundurkan diri dari Forum ARF. Ketidakhadiran Korea Utara dalam forum tahunan ARF dianggap menghambat keberlanjutan dari upaya para negara partisipan ARF untuk terus mendorong terciptanya dialog dalam menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea.<sup>88</sup>

Sementara itu Pertemuan ARF ke X juga dimanfaatkan oleh Negara-Negara Barat meningkatkan tekanan kepada Myanmar agar membebaskan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Menteri Luar Negeri AS Colin Powell juga mendesak negara-negara Asia Tenggara menambah tekanan kepada Myanmar. Dalam pernyataan bersama, para anggota ARF pada akhir pertemuan di Phnom Penh menghimbau pemerintah militer Myanmar untuk membebaskan pemimpin oposisi. ARF menanti dicabutnya pembatasan yang dikenakan kepada Daw Aung San Suu Kyi dan para anggota Partai *National League of Democracy* (NLD) yang ditahan di utara negara. Para anggota ARF juga mendesak Myanmar untuk melakukan kembali upaya rekonsiliasi nasional dan mengadakan dialog di kalangan semua pihak untuk menuju pada tahap transisi damai ke arah demokrasi. Para menteri luar negeri ARF juga terus memberikan dukungan terhadap utusan khusus

---

<sup>88</sup> "Korut Mundur dari Diskusi ARF", *Kompas*, 12 Juni 2003

Sekretris Jenderal PBB Razali Ismail yang menjadi mediator perundingan antara Aung San Suu Kyi dan junta Militer yang sempat terhambat.<sup>89</sup>

Menteri Luar Negeri Kanada Bill Graham juga mengatakan bahwa negaranya kemungkinan akan mengambil tindakan yang lebih keras terhadap Myanmar setelah mencabut tarif preferensial. Menteri Luar Negeri Kanada menyatakan bahwa Pemerintah Kanada percaya para jenderal harus mengerti bahwa Suu Kyi harus dibebaskan dan dibebaskan sesegera mungkin dan diberi kesempatan untuk melanjutkan peran politiknya di Myanmar. Sementara itu Menteri luar negeri Australia Alexander Downer mengatakan bahwa Pemerintah Australia akan mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar Win Aung untuk mendesak pembebasan Suu Kyi, penyelenggaraan dialog terbuka dengan partai NLD serta implementasi pembaharuan konstitusional Akan tetapi menurut Downer sanksi bukanlah jawaban. Sementara Jepang juga mengecam Myanmar dan mengancam akan menarik bantuan ekonominya.<sup>90</sup>

Sementara itu di tengah memanasnya pembahasan mengenai masalah Myanmar, delegasi China tetap berupaya mendorong terciptanya forum keamanan yang melibatkan personil militer di Asia Pasifik. Pembentukan forum tersebut bertujuan untuk memberikan perhatian yang sama terhadap masalah keamanan yang menjadi perhatian masing-masing negara ARF. Menteri Luar Negeri China Li Zhaoxing menyatakan perlunya untuk mengembangkan pertemuan ARF juga menjadi pertemuan para pejabat militer melalui pembentukan Konferensi Kebijakan Keamanan.<sup>91</sup>

Kemudian sehubungan dengan rencana bergabungnya Pakistan dengan ARF, India telah mengajukan keberatan atas penghapusan moratorium yang memungkinkan Pakistan bergabung dengan ARF. Keberatan India tersebut dalam rangka merespon kesepakatan Menteri luar negeri ASEAN dalam AMM bahwa Pakistan dapat menjadi anggota ke 24 ARF. India berharap ARF tidak melanggar moratorium yang sepakati pada tahun 2000 untuk tidak menerima anggota baru. Menteri luar negeri India Yashwant Singha menyatakan bahwa dibutuhkan konsensus untuk menghapus moratorium dan sudah seharusnya dibicarakan pada pertemuan resmi ARF sehingga setiap anggota dapat

<sup>89</sup> “Barat Terus Menekan Myanmar soal Suu Kyi”, *Kompas*, 19 Juni 2003

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> “China Proposes New Security Forum”, *The Jakarta Post*, 19 Juni 2003

mengungkapkan pendapatnya.<sup>92</sup> Sebaliknya Pakistan menyambut baik keinginan ASEAN yang ingin memasukkan Pakistan ke ARF. Disepakati tindakan itu akan meningkatkan kerjasama melawan terorisme dan menuju penyelesaian perdamaian terhadap konflik lama antara India dan Pakistan perihal Kashmir.

Dalam pertemuan ARF ke XI tersebut, para Menteri luar negeri ARF menyambut baik Deklarasi ASEAN Concord II yang ditandatangani seluruh anggota ASEAN pada KTT ASEAN ke 9 di Bali Oktober 2003. Sehubungan dengan isi Deklarasi *ASEAN Concord II* tersebut, para Menteri luar negeri ARF menyatakan dukungannya terhadap rencana ASEAN untuk membentuk Komunitas ASAEN terutama upaya untuk mewujudkan Komunitas Kemananan ASEAN sebagai salah satu pilar Komunitas ASEAN Pada tahun 2020. Di samping itu para Menteri luar negeri ARF juga terus memberikan dukungan terhadap kedaulatan, integritas wilayah dan kesatuan nasional Indonesia sebagai negara tuan rumah termasuk mendorong perkembangan stabilitas, kesejahteraan ekonomi dan proses demokratisasi yang akan memberikan sumbangan yang signifikan terhadap perdamaian stabilitas dan pembangunan kawasan.<sup>93</sup>

Di samping agenda rutin seperti pembahasan mengenai perkembangan situasi keamanan di Semenanjung Korea, penguatan implementasi TAC sebagai *code of conduct* ARF dan juga implementasi *dari the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea*; masalah Irak juga menjadi salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan ARF ke X. Para Menteri luar negeri ARF menyatakan dukungannya terhadap proses pembentukan kembali pemerintah Irak yang berdaulat melalui Pemilu setelah terjadinya intervensi AS pada Maret 2003 yang menumbangkan pemerintahan Saddam Husein.

Di samping itu para Menteri Luar Negeri ARF juga menyambut baik hasil dari *the International Conference of Islamic Scholars (ICIS)* yang berlangsung di Jakarta pada 23-25 Februari 2004 terutama munculnya pernyataan kecaman terhadap tendak terorisme yang tidak dapat dibenarkan dari ajaran agama manapun terutama apabila mengatasnamakan Islam. Para Menlu ARF juga menyambut baik hasil-hasil dalam *the Joint Communique of the 4<sup>th</sup> ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC)* termasuk AMMTC+3 juga penandatanganan *Joint Declaration for*

<sup>92</sup> “India Menolak Masuknya Pakistan ke Forum Regional ASEAN”, *Koran Tempo*, 19 Juni 2003

<sup>93</sup> ASEAN Regional Forum Document Series, *op.cit.*, p. 364

*Cooperaton to Combating International Terrorism* antara ASEAN dan India pada Oktober 2003. Demikian pula para Menteri Luar Negeri ARF memberikan penghargaan terhadap hasil-hasil dari *the Convening of the Bali Regional Meeting on Counter-Terrorism* pada tanggal 4-5 Februari 2004 di Bali dan menyambut baik pembukaan *the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* di Semarang pada 3 Juli 2004 dalam upaya membangun kerjasama dalam penerapan hukum di tingkat regional terutama dalam menangani kejahatan transnasional khususnya kejahatan terorisme.<sup>94</sup>

Pada Pertemuan ARF ke X para Menteri Luar Negeri ARF juga mengeluarkan pernyataan bersama mengenai *Strengthening Transport Security Against International Terrorism* yang intinya adalah mengutuk setiap bentuk tindakan terorisme dan berupaya melakukan langkah-langkah kerjasama untuk melindungi kepentingan masyarakat internasional terhadap serangan terorisme terutama jalur transportasi baik darat, laut dan udara. Di samping itu para Menlu ARF juga mengeluarkan pernyataan bersama mengenai Non-Proliferasi. Dalam pernyataan bersama tersebut para Menteri luar Negeri ARF sepakat bahwa langkah-langkah proliferasi senjata pemusnah massal akan menghadirkan ancaman yang signifikan bagi keamanan negara dan perdamaian internasional.<sup>95</sup>

Di samping itu para Menteri Luar Negeri ARF juga mengkhawatirkan proses proliferasi yang melibatkan kelompok teroris sehingga dibutuhkan pendekatan seara multilateral terhadap masalah keamanan termasuk langkah-langkah pengendalian senjata dan non-proliferasi kemudian juga mendukung institusi internasional dalam melakukan verifikasi terhadap masalah proliferasi termasuk meningkatkan kerjasama dalam penanganan jalur-jalur perbatasan negara yang dianggap potensial untuk proses proliferasi.

Sebelumnya pada tanggal 11-14 April 2004 bertempat di Yangoon Myanmar diadakan Pertemuan *ARF Inter-Sessional Support Group on CBM* yang diantaranya juga membahas secara khusus meningkatnya ancaman keamanan non-tradisional khususnya terorisme dan juga kejahatan transnasional. Kemudian pada 30-31 Maret 2004 juga diadakan *The Second ARF Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* bertempat di Manila Filipina. Dalam pertemuan tersebut fokus

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> *Ibid.*, p. 397

pembahasan adalah bagaimana mengamankan jalur transportasi darat, laut dan udara dari kemungkinan serangan terorisme termasuk langkah-langkah kerjasama di antara negara-negara ARF.

Kemudian pada tanggal 16-17 Maret 2004 juga kembali diadakan Workshop ARF mengenai Diplomasi Preventif. Dalam Workshop tersebut kembali dibahas mengenai langkah-langkah konkrit untuk tujuan implementasi dari diplomasi preventif baik yang berkaitan dengan peran dari para Ketua ARF, pembentukan ARF unit di dalam Sekretariat ASEAN, peran dari kelompok pakar ARF dan peran dari organisasi jalur kedua. Di samping itu juga dibahas mengenai persepsi baru mengenai keamanan yang membutuhkan pemahaman bersama terutama dengan semakin maraknya ancaman keamanan non-tradisional.

Sebelum Pertemuan ARF ke XI di Jakarta telah muncul keputusan untuk memasukkan Pakistan sbagai anggota ARF itu direkomendasikan oleh Pertemuan Pejabat Tinggi ARF tanggal 12 Maret di Yogyakarta. Di samping itu para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam Komunike bersama pada pertemuan AMM ke 37 menyambut baik penegasan kembali tentang peran ARF sebagai forum utama untuk meningkatkan kerjasama politik dan keamanan di kawasan Asia Pasifik sekaligus juga berperan unyuk membangun perdamaian dan stabilitas di kawasan.<sup>96</sup>

Para Menteri Luar Negeri ASEAN juga memutuskan menjamin bahwa ASEAN akan tetap melanjutkan meningkatkan peranan kuncinya dalam mendorong momentum kerjasama guna memajukan proses ARF dan sumbangannya terhadap pemeliharaan perdamaian keamanan dan stbailitas di kawasan Asia Pasifik. Untuk itu para Menteri luar negeri ASEAN mengesahkan pembentukan sebuah unit ARF di dalam ASEAN Sekretariat yang dipercaya dapat lebih meningkatkan proses ARF terutama mengenai peranan kunci ASEAN di dalam ARF dan peningkatan peran Ketua ARF.

Para Menteri luar negeri ASEAN juga mengingatkan kembali akan pengangkatan moratorium dan akan mempertimbangkan lamaran untuk menjadi anggota baru ARF atas dasar kasus demi kasus. Dalam kaitan inilah para menteri luar negeri ASEAN menyambut baik kesediaan seluruh anggota ARF untuk menerima Pakistan sebagai anggota baru dan berharap keikutsertaan Pakistan dan ARF akan menyimbang bagi

---

<sup>96</sup> "Pakistan Jadi Anggota ARF yang Baru," *Kompas*, 1 Juli 2004

perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pakistan dan Jepang juga akan turut menandatangani TAC tanggal 2 Juli sebelumnya China dan India menandatangani TAC pada KTT ASEAN di Bali.

Sementara itu perwakilan Uni Eropa menghendaki forum keamanan tahunan ARF memainkan peran lebih kuat dalam menyelesaikan dan mencegah perselisihan di kawasan dari tingkatan diplomasi preventif menjadi resolusi konflik. Sejumlah negara peserta ARF termasuk Uni Eropa berpandangan bahwa ARF seharusnya bisa lebih meningkatkan jangkauan tujuannya. Karena itu diusulkan ARF perlu didukung oleh lembaga permanen guna lebih memberikan pengaruh dan mampu bekerja efektif. Uni Eropa menyambut pembentukan sekretariat yang lebih permanen dan bersedia mendukung unit baru tersebut. Javier Solana sebagai pemimpin delegasi Uni Eropa juga menyatakan kesediannya untuk mendiskusikan proposal Indonesia yang muncul pada bulan Februari 2004 agar ASEAN membuat pasukan perdamaian.<sup>97</sup>

Dalam Pertemuan ARF di Jakarta, terorisme dan upaya pencegahan penyebaran *Weapons Mass Destruction* (WMD) akan menjadi agenda pertama ARF. ARF merupakan forum unik yang diikuti oleh 24 negara diharapkan dapat menjadi contoh baik untuk kaasan lain di Afrika dan Timur Tengah dalam mengupayakan dialog keamanan sebagai upaya mempromosikan perdamaian dan stabilitas demikian dikatakan Juru Bicara Pemerintah Jepang Hatsuhsa Takashima.

Hal ini dikarenakan ARF memberi kesempatan kepada seluruh negara peserta untuk bertukar pandangan., bukan dengan pengaturan pengaruh, melainkan melalui dialog untuk mendengarkan gagasan atau keinginan dari delegasi lain. Dengan demikian forum ARF dapat berfungsi untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas. Ditambahkan pula bahwa sebagai pihak bisa ikut serta di dalamnya. Bagi Jepang ini merupakan satu-satunya forum untuk berdiskusi dengan Korea Utara di luar pertemuan spontan. ARF juga menerima Pakistan sebagai anggota padahal India telah bergabung terlebih dahulu. Inilah keunikan dimana pihak-pihak yang bertikai bisa berada di dalam satu forum.<sup>98</sup>

Menteri Luar Negeri Jepang Takashima juga menyatakan bahwa negara-negara peserta ARF perlu menyelesaikan masalah-masalah dengan cara damai dan untuk itu

---

<sup>97</sup> "Peran ARF Harus Diperluas", *Suara Pembaruan* 30 Juni 2004

<sup>98</sup> "ARF Bisa Diteladani Kawasan Lain", *Suara Pembaruan* 2 Juli 2004

dibutuhkan mekanisme yang dapat mengundang pihak-pihak yang berselisih ke dalam sebuah forum dialog keamanan seperti ARF menjadi penting. Keunikan lainnya dari ARF, forum ini diadakan di Asia yang berbeda dengan Eropa. Kawasan Asia masih memiliki beberapa potensi konflik maupun persengketaan regional yang harus diselesaikan melalui cara-cara damai.<sup>99</sup>

ARF pada awalnya bergerak pada tahap CBMs lalu bergerak ke diplomasi preventif dan akhirnya resolusi konflik. Saat ini ARF berada pada tahap reformasi ke diplomasi preventif. Bila berhasil ARF menjadi contoh yang sangat baik untuk wilayah Afrika dan Timur Tengah bahwa diplomasi dapat menyelesaikan persoalan. Dalam forum ini para Menteri luar negeri ASEAN dan negara-negara mitra dialog dapat mempengaruhi situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik dengan saling bertukar pandangan dan informasi mengenai masalah keamanan dalam upaya meningkatkan keterbukaan dan saking percaya.<sup>100</sup>

Pembahasan dalam Sidang ARF ke XII difokuskan pada upaya penanganan bencana terutama setelah terjadinya bencana Tsunami yang menimpa Indonesia, Thailand dan Sri Lanka pada 26 Desember 2004. Seluruh peserta sidang ARF menyatakan rasa simpati, solidaritas dan dukungan terhadap para korban Tsunami. Para Menteri luar negeri ASEAN juga menyambut baik sejumlah Pertemuan yang ditujukan untuk mengatasi masalah Tsunami seperti Pertemuan Khusus Para Pemimpin ASEAN pada 6 Januari 2005 dan Deklarasi dalam pertemuan tersebut untuk memperkuat bantuan bencana, rehabilitasi, rekonstruksi dan pencegahan terhadap bencana Gempa Bumi dan Tsunami pada akhir Desember 2004. Di samping itu para Menlu ARF juga menyambut baik hasil-hasil dari KTT PBB Mengenai penanggulangan Bencana yang diselenggarakan di Kobe 18-22 Januari 2005 dan juga pertemuan Tingkat Menteri dalam Kerjasama Regional untuk membangun Sistem Pencegahan Dini terhadap bencana Tsunami di Phuket Thailand 28-29 Januari 2005 dan juga rencana untuk menyelenggarakan

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

Konferensi Asia mengenai Penanggulangan Bencana Alam pada 27-29 September 2005 di Beijing<sup>101</sup>

Dalam kaitannya dengan dukungan terhadap langkah-langkah penanggulangan bencana alam setelah peristiwa Gempa Bumi dan Tsunami 26 Desember 2004, maka para Menteri luar negeri ARF sepakat untuk mengadakan kembali pertemuan *Inter-Sessional* mengenai Bencana alam dan juga isu-isu yang terkait pada tahun 2005-2006 dengan Indonesia dan China sebagai Ketua. Para Menteri luar negeri ARF juga mendukung adanya pengelolaan bersama masalah bencana alam di bawah pengarahannya PBB termasuk upaya rehabilitasi dan rekonstruksi baik jangka menengah maupun jangka panjang dan penggalangan dana bencana dari negara-negara donor.

Di samping masalah Tsunami, para Menteri luar negeri ARF juga menyambut baik dan mendukung perumusan dari Rencana Aksi Komunitas Keamanan ASEAN yang dikenal sebagai Program Aksi Vientiane yang disepakati pada KTT ASEAN ke 10 dan juga bagaimana para pemimpin ASEAN membagikan visi dan nilai-nilai bersama untuk menapai perdamaian, stabilitas, demokrasi dan kesejahteraan di kawasan. Para Menlu ARF juga menekankan pentingnya untuk tetap menjadi TAC sebagai *code of conduct* ARF dan menyambut baik penandatanganan TAC yang dilakukan oleh Republik Korea dan Federasi Rusia pada KTT ASEAN ke 10 November 2004 serta Mongolia dan Selandia Baru pada ASEAN PMC 28 Juli 2005 di Vientiane.

Sementara masalah keamanan di Semenanjung Korea, perkembangan politik domestik di Myanmar serta langkah-langkah ASEAN dan China untuk merumuskan dan mengimplementasikan Deklarasi Pengaturan Laut Cina Selatan tetap menjadi agenda utama yang dibahas dalam Pertemuan ARF ke XII. Di samping itu dalam Sidang Tahunan ARF ke 12 juga dibahas mengenai masalah Timur Tengah khususnya perkembangan di Palestina. Para Menlu ARF menyambut baik hasil Pemilihan Umum Palestina dan juga mendukung terciptanya proses perdamaian antara Israel dan Palestina. Di samping itu juga menyambut baik proses transisi pemerintahan di Irak dan juga hasil-hasil dari Konferensi Internasional tentang Irak di Brussel pada 22 Juni 2005.<sup>102</sup>

<sup>101</sup> "Chairman's Statement of The Twelfth Meeting of The ASEAN Regional Forum (ARF) Vientiane, 29 July 2005" diakses dari <http://www.aseansec.org/17642.htm>

<sup>102</sup> *Ibid.*

Dalam kaitannya dengan komitmen ARF untuk terus memerangi terorisme, para Menteri luar negeri ARF mengeluarkan kecaman terhadap serangan teroris di London dan Sharm el-Sheik dan menyampaikan rasa simpati terhadap korban dari serangan tersebut. Sehubungan dengan serangan tersebut para Menlu ARF juga terus mendorong penerapan hukum internasional dalam memerangi terorisme serta terus mendukung aktivitas dari *The Jakarta Center of Law Enforcement Cooperation*, *The Southeast Asia Regional Center for Counter-Terrorism* dan juga *The International Law enforcement Academy*.

Para Menteri luar negeri ASEAN juga mendukung langkah-langkah yang berkaitan dengan promosi keamanan maritim dan mencatat empat wilayah kunci untuk kerjasama lebih lanjut yaitu dalam bentuk kerjasama multilateral, pelaksanaan solusi dari keamanan dan keselamatan maritim, keamanan pelabuhan dan pelayaran serta penerapan teknologi keamanan dan keselamatan maritim. Para Menteri luar negeri ASEAN juga menyambut baik kesepakatan ASEAN dan Jepang dalam Kerjasama melawan Terorisme juga kesepakatan ASEAN dengan Republik Korea, Selandia Baru dan Pakistan dalam kerjasama untuk memerangi terorisme internasional.

Masalah non-proliferasi senjata pemusnah massal, dukungan terhadap pelarangan uji coba nuklir dan penghormatan terhadap wilayah bebas nuklir juga tetap menjadi agenda pembahasa dalam Sidang Tahunan ARF ke 12. Sementara itu masalah-masalah yang berkaitan dengan ancaman keamanan non-tradisional khususnya perdagangan senjata gelap dan penyelundupan atau perdagangan ilegal manusia juga menjadi perhatian penting dalam pertemuan ARF ke 12.

Dalam kaitannya dengan sejumlah Pertemuan Kelompok Kerja atau *Inter-Sessional Meeting* sepanjang Juli 2004 dan 2005, Para Menteri luar negeri ASEAN menyatakan kepuasannya terhadap keberhasilan sinergis antara diplomasi jalur pertama dan jalur kedua dalam menyelenggarakan sejumlah *Inter-Sessional Meeting*. Termasuk juga kontribusi yang diberikan para pejabat pertahanan misalnya dalam *ARF Security Policy Conference* di Beijing 4-6 November 2004 yang diketuai oleh Indonesia dan di Laos 18 dan 19 Mei 2005. Demikian pula dengan kelanjutan *Inter-Sessional Meeting on Counter Terrorism and Transnational Crime* di Bangkok 6-8 April 2005 serta sejumlah Workshop misalnya tentang Keamanan Maritim di Malaysia September 2004, CBM dan

Pengelolaan Perdamaian melalui Stabilitas dan Keamanan Kawasan termasuk Hubungan Sipil dan Militer di Jepang Maret 2005, juga Seminar mengenai *Cyber Terrorism* di Korea Selatan Oktober 2004 dan Seminar mengenai peningkatan kerjasama dalam mengantisipasi ancaman keamanan non-tradisional di China Maret 2005.

Kemudian dalam Pertemuan ARF ke 12 juga dirumuskan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam penguatan diplomasi preventif dan juga keberlanjutan penerapan CBM. Keberlanjutan penerbitan *the ARF Annual Security Outlook* kemudian juga memperkuat peran pejabat senior ARF dan kelompok pakar serta penguatan kerjasama antara jalur pertama dan jalur kedua termasuk pengembangan website ARF. Para Menteri luar negeri ARF juga menyambut baik dan menyetujui konsensus ASEAN dalam proses penerimaan Bangladesh sebagai negara ke 26 peserta ARF.

Dalam kaitannya dengan perkembangan ASEAN, para Menteri Luar Negeri ARF menyambut baik penandatanganan TAC oleh Australia dalam KTT ASEAN ke 11 Desember 2005 dan juga keputusan Perancis dan keinginan Uni Eropa untuk menandatangani TAC. Langkah-langkah denuklirisasi Semenanjung Korea tetap menjadi agenda utama pembahasan dalam sidang tahunan ARF ke 13 termasuk keprihatinan para Menteri luar negeri ARF mengenai uji coba rudal yang dilakukan Korea pada 5 Juli 2006 serta berharap bahwa Korea Utara dapat menerima Resolusi DK PBB No. 1695 15 Juli 2006 mengenai ancaman sanksi apabila Korea Utara terus melanjutkan program senjata nuklirnya.<sup>103</sup>

Dalam pertemuan ARF ke 13 agenda pembahasan juga terus diperluas kepada masalah keamanan di Timur Tengah berkaitan dengan munculnya tindak kekerasan militer yang dilakukan Israel terhadap Palestina dan juga konflik Lebanon. Di samping itu para Menteri Luar Negeri ARF juga mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap masalah sipil dan berharap bahwa hasil-hasil dari Konferensi Internasional mengenai Timur tengah di Roma 26 Juli 2006 dapat segera dilaksanakan. Lebih lanjut Para Menteri Luar Negeri ARF juga menghimbau Israel untuk mentaati Resolusi DK PBB 1515

---

<sup>103</sup> "Chairman's Statement of The Thirteenth Meeting of The ASEAN Regional Forum (ARF) Kuala Lumpur, 28 July 2006" diakses dari <http://www.aseansec.org/18599.htm>

mengenai proses perdamaian dan juga pentingnya untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas keamanan di Lebanon berdasarkan Resolusi DK PBB 1664 dan 1680.<sup>104</sup>

Kondisi politik domestik Myanmar yang masih belum menerapkan proses demokrasi juga tetap menjadi perhatian dari para Menlu ARF di samping masalah perkembangan perumusan Deklarasi Pengaturan Laut Cina Selatan oleh ASEAN dan China. Para Menlu ARF juga menyambut baik pembentukan pemerintah Irak pada tanggal 20 Mei 2006 dan berharap bahwa kondisi domestik Irak dapat menjadi lebih aman dan stabil.

Langkah-langkah mengantisipasi dan memerangi terorisme juga tetap menjadi agenda utama pertemuan tahunan ARF terutama setelah terjadi kembali serangan teroris di Mumbai pada 1 Juli 2006 yang mendapat kecaman dari para Menlu ARF. Para Menlu ARF menyambut baik penandatanganan Kerjasama ASEAN-Kanada dalam memerangi terorisme dan terus mendukung kegiatan *the Southeast Asia Regional Center for Counter-Terrorism* di Kuala Lumpur, *the International Law Enforcement Academy* di Bangkok dan *the Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation* di Semarang.

Keberhasilan penyelenggaraan sejumlah *Inter-Sessional Meeting* baik mengenai CBM dan Diplomasi Preventif, *Disaster Relief* dan juga *Counter-Terrorism and Transnational Crime* juga Konferensi ARF mengenai Kebijakan Keamanan yang merupakan sinergis antara jalur pertama dan jalur kedua juga mendapat apresiasi dari para Menlu ARF. Termasuk keberhasilan penyelenggaraan sejumlah workshop dan seminar seperti *Workshop on Civil-Military Operations* di Manila September 2005, *Seminar on Cyber Terrorism* di Cebu Oktober 2005, *Seminar on Missile Defense* di Bangkok Oktober 2005 kemudian *Workshop on Training for the Cooperative Maritime Security* di India Oktober 2005, *Workshop mengenai Small Arms and Light Weapon* di Phnom Penh November 2005, *Workshop on Capacity Bulding of Maritime Security* di Tokyo Desember 2005 dan juga *Seminar mengenai Non-Proliferation of Weapons of Mass Destruction* di Singapura 2006.

Penguatan peran pejabat senior ARF juga kelompok pakar serta publikasi *ARF Annual Security Outlook* dan dorongan untuk terus memperkuat kerjasama jalur pertama dengan jalur kedua tetap menjadi agenda ARF yang akan terus ditingkatkan paska

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

pertemuan ke 13. Termasuk kelanjutan dari pembentukan the *ARF Fund* terutama dalam merumuskan format standar terhadap the *ARF Fund Project Brief*, kemudian juga kesepakatan untuk menerima Sri Lanka sebagai peserta ARF ke 27 berdasarkan konsensus yang telah dicapai para Menlu ASEAN.

### **3.5. Ketahanan Nasional Indonesia ditinjau dari Gatra Pertahanan dan Keamanan**

Dalam upaya menjelaskan kebutuhan Indonesia dalam meningkatkan ketahanan nasionalnya khususnya di bidang pertahanan dan keamanan negara maka akan digunakan studi dokumen berupa doktrin pertahanan Indonesia, Buku Putih Pertahanan serta rencana strategis baik TNI maupun Polri yang berlaku sejak tahun 1994 sampai dengan 2006. Kemudian juga akan dijelaskan postur pertahanan maupun kepolisian yang dimiliki Indonesia sejak tahun 1994-2006.

#### **3.5.1. Dokumen tentang Perkembangan Kebutuhan Pertahanan dan Keamanan Indonesia sejak 1994-2006**

##### **3.5.1.1. Doktrin Hankam 1991 dan Doktrin TNI-ABRI Sad Daya Dwi Bakti 1994**

Doktrin pertahanan Indonesia yang berlaku pada tahun 1994 sampai dengan masa Reformasi adalah doktrin pertahanan yang dibuat pemerintahan Indonesia pada tahun 1991 yang dikenal sebagai Doktrin Hankam ABRI. Doktrin tersebut ditetapkan oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan L.B. Moerdani melalui Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan No : KEP/17/x/1991 tentang Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. Hal baru yang dimunculkan dalam Doktrin Hankam 1991 adalah penyiapan medan pertahanan.

Doktrin Hankam 1991 menyiapkan medan pertahanan yang diproyeksikan dalam tiga lapis yaitu :

*Lapis pertama adalah medan pertahanan penyanggah yang berada di luar garis batas zona ekonomi eksklusif dan lapisan udara di atasnya; Lapis kedua adalah medan pertahanan utama, yang direncanakan sebagai meda perasi yang menentukan, yaitu laut zona ekonomi eksklusif sampai dengan laut territorial dan lapisan udara di atasnya; Lapis ketiga adalah daerah-daerah perlawanan yang berada pada wilayah kompartemen-kompartemen strategis darat; termasuk wilayah perairan nusantara dan lapisan udara di atasnya, yang dibangun atas dasar sejumlah daerah pangkal pertahanan dan perlawanan sebagai intinya.*

Di Lapis Pertahanan I, TNI melakukan operasi militer yang mengandalkan operasi penciptaan kondisi dan operasi intelijen strategis. Kedua operasi ini digelar untuk memungkinkan dilakukannya strategi tempur konvensional yang bersifat ofensif strategis dan defensif strategis. Kemudian di Lapis Pertahanan II, TNI melakukan operasi militer yang mengkombinasikan strategi ofensif dan defensif. Di lapis pertahanan ini, TNI mengandalkan gabungan kekuatan TNI AL dan TNI AU sebagai kekuatan pemukul utama. Kemudian di Lapis Pertahanan III, TNI mengandalkan TNI-AD sebagai kekuatan pemukul utama. Strategi militer yang diterapkan di lapis pertahanan ini adalah operasi perlawanan wilayah dan operasi serangan balas yang mengandalkan Operasi Darat Gabungan sebagai operasi militer utamanya.

Konsep pertahanan berlapis yang diproyeksikan Doktrin Hankam 1991 mendapat bentuk baru dalam Doktrin Penampilan TNI ABRI “Sad Daya Dwi Bakti.” Doktrin yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata RI No: KEP/05/III/1994 ini memproyeksikan konsep pertahanan mendalam dan berlapis yang akan menentukan gelar pelibatan kekuatan militer. Gelar pelibatan yang ditampilkan mendalam dan berlapis terdiri dari tiga kategori yaitu :

1. Palagan Terpadu Pertahanan yang terdiri atas Strategi Militer berupa :
  - a. Gelar pelibatan hankam untuk menghadapi ancaman luar negeri
  - b. Palagan luar digelar sebagai andalan awal untuk kewaspadaan dini dan penanggulangan awal Sishankamrata
  - c. Palagan antara digelar sebagai andalan utama ruang manuver, untuk memenangkan waktu dan merebut inisiatif, bila perlu dengan mengorbankan ruang.
  - d. Palagan dalam digelar sebagai andalan terakhir yang dipertahankan dengan segala resiko, sesuai dengan tekad dan niat semesta untuk tidak kenal menyerah
2. Palagan Terpadu Keamanan
  - a. Gelar pelibatan hankam untuk mengatasi ancaman dari dalam negeri

- b. Palagan daerah digelar sebagai andalan awal untuk pewartpadan dini dan penindakan awal Sishankamrata
- c. Palagan kompartemen digelar sebagai andalan utama ruang manuver untuk memelihara iniatif dan mempersempit ruang gerak ancaman nyata, dengan tekanan terus-menerus untuk penumpasan secara tuntas.
- d. Palagan nasional digelar sebagai andalan akhir bagi tekad dan niat semesta untuk tidak kenal menyerah.

### 3. Pakridan Terpadu Sosial Politik

- a. Gelar pelibatan sosial politik untuk menanggulangi segenap permasalahan sospol
- b. Pakridan luar digelar sebagai andalan awal untuk pewartpadaan dini dan penindakan awal sistem sosial politik
- c. Pakridan antara digelar sebagai andalan utama ruang manuver pelibatan berlanjut untuk penggalangan stabilitas sosial politik dan dinamika tata kehidupan nasional.
- d. Pakridan dalam digelar sebagai andalan akhir bagi tekad dan niat Sospol ABRI untuk menjamin dan mempertahankan tata kehidupan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Untuk melakukan tiga gelar pelibatan tersebut, Doktrin Sad Daya Dwi Bakti memperkenalkan konsep “Dimensi Operasi TNI-ABRI”. Yang terdiri dari enam dimensi operasi. Dimensi pertama adalah dimensi operasi darat dengan konsepsi pertanaan dan keamanan pulau-pulau bear dan rangkaian pulau-pulau kecil. Dimensi kedua adalah dimensi operasi laut dengan konsepsi pertahanan keamanan laut teritorial Nusantara. Dimensi ketiga adalah dimensi operasi udara dengan konsepsi pertahanan udara nasional. Dimensi keempat adalah dimensi terpadu. Dimensi kelima adalah dimensi operasi pemeliharaan perdamaian dunia dengan konsepsi keperansertaan dalam pasukan perdamaian PBB. Dan dimensi terakhir adalah dimensi operasi sosol dengan konsepsi sosial politik TNI-ABRI.

### 3.5.1.2. Strategi Keamanan dan Pertahanan Indonesia pada masa Reformasi.

Ketika Indonesia memasuki era reformasi pada tahun 1998, maka terjadi pula proses reformasi di sektor keamanan. Proses reformasi di sektor keamanan diawali dengan penyusunan regulasi-regulasi politik di bidang pertahanan negara. Di tahun 2000 MPR mengeluarkan TAP VI dan TAP VII MPR yang mengatur posisi TNI dan POLRI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. TAP MPR No. VI Tahun 2000 berisi tentang Pemisahan TNI dan Polri dan TAP MPR nomor VII tahun 2000 berisi tentang Peran TNI dan Peran Polri. Kemudian Pemerintah bersama DPR RI juga berhasil merumuskan regulasi mengenai kebijakan pertahanan nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2002. Langkah tersebut diikuti dengan perumusan regulasi khusus untuk TNI yaitu UU No. 34/2004 dan UU POLRI No. 2/2002.

Secara substansial UU RI Nomor 3 Tahun 2002 mengatur wewenang dan tanggungjawab Menteri Pertahanan, peran dan tugas TNI, wewenang dan tanggungjawab Panglima TNI, nilai-nilai demokratis, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan hidup, peran DPR dalam pertahanan negara, hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Kemudian UU No. 2 Tahun 2002 mengenai Keamanan Nasional pada intinya memuat pedoman bagi kepolisian dalam melaksanakan tugasnya untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat dan membantu proses penegakan hukum.

#### 3.5.1.2.1. Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003<sup>105</sup>

Pada Tahun 2003 Pemerintah juga mempublikasikan Buku Putih Pertahanan dengan judul Mempertahankan Tanah Air Memasuki Abad ke 21. Secara singkat Buku Putih Pertahanan tersebut berisi mengenai reformasi nasional dan pertahanan negara kemudian konteks strategis baik tingkat nasional, regional maupun global, kemudian perkiraan ancaman dan kepentingan strategis pertahanan yang terdiri atas perkiraan ancaman, kepentingan nasional dan kepentingan strategis pertahanan Indonesia.

<sup>105</sup> “Mempertahankan Tanah Air” Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003 (Jakarta : Departemen Pertahanan RI, 2003)

Kemudian pada Bab Lima juga dirumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan pertahanan negara yang terdiri atas konsep strategis, penggunaan kekuatan pertahanan, kerjasama pertahanan dan pembangunan kekuatan pertahanan. Buku Putih Pertahanan ditutup oleh Bab keenam yang secara khusus membahas dukungan Anggaran yang terdiri atas dukungan Anggaran Pertahanan saat ini dan Proyeksi ke Depan.

Dalam kaitannya dengan kebutuhan peningkatan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan negara, maka akan dijelaskan secara singkat isi Buku Putih khususnya berkaitan dengan persepsi Indonesia terhadap lingkungan strategis kemudian perkiraan ancaman dan juga strategi penyelenggaraan pertahanan negara. Dalam Buku Putih Bab Tiga mengenai konteks strategis disebutkan bahwa dalam tingkat strategis, isu politik, ekonomi dan tindakan ilegal lintas negara, memiliki jangkauan wilayah nasional, regional serta global dan isu tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap keamanan nasional, regional dan global. Indonesia yang merupakan negara terbuka tidak bebas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Kondisi politik, ekonomi, sosial dan keamanan Indonesia yang terbentuk selama ini, tidak berdiri sendiri namun dipengaruhi juga oleh faktor eksternal. Isu domestik yang dihadapi Indonesia pada dekade terakhir ini tidak terlepas dari kontribusi faktor-faktor eksternal, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga faktor yang saling berhubungan perlu dicermati.

Di tingkat Global berakhirnya perang dingin ternyata belum menjamin terwujudnya keamanan dan perdamaian dunia. Justru muncul tantangan baru berupa konflik antar etnis/ras, terorisme, pencucian yangm penyelundupan manusia, perdagangan ilegal dan perdagangan obat-obatan terlarang yang diklasifikasikan sebagai ancaman non-tradisiional dan merupakan ancaman terhadap keamanan domestik, regional dan global. Sementara ancaman tradisional seperti senjata pemusnah masal, sengketa antar negara dan perlombaan senjata tetap merupakan isu laten. Tantangan yang yang muncul adalah proses globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi yang telah menghadirkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat.

Akses informasi memang semakin mudah dan cepat dan dapat mencapai tempat lain tanpa memandang jarak dan batas negara. Namun dampak dari perkembangan tersebut adalah tereduksinya batas-batas kedaulatan dan wilayah negara termasuk juga kewenangan negara dalam mengantisipasi derasnya arus globalisasi.

Kemudian sejak terjadinya Tragedi 11 September 2001, masalah terorisme internasional dengan segera menjadi isu keamanan yang dominan. Muncul bentuk baru perang yaitu perang melawan terorisme yang juga menjadi ancaman asimetris dan ancaman yang nyata bagi keamanan internasional memasuki abad ke 21. Kerjasama keamanan antar negara kemudian semakin diarahkan untuk memerangi terorisme termasuk desakan dari negara besar khususnya Amerika Serikat agar setiap negara memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan *counter-terrorism* baik melalui penerapan hukum maupun peningkatan kapabilitas perangkat keamanan dan pertahanan. Terorisme juga kemudian dikaitkan dengan fenomena kejahatan transnasional yang sekaligus dikategorikan sebagai ancaman keamanan non-tradisional seperti pencucian uang, perdagangan senjata gelap dan juga *piracy*.

Sementara itu di tingkat regional khususnya kawasan Asia Pasifik yang merupakan lingkungan strategis regional yang paling berpengaruh bagi Indonesia karena Indonesia berada di dalam kawasan tersebut, Tantangan yang kemudian dapat menjadi ancaman muncul dari perubahan konstelasi politik internasional yang terjadi setelah perang dingin berakhir. Runtuhnya Uni Soviet dan menurunnya peran keamanan Amerika Serikat di Asia Pasifik, menimbulkan kondisi *vacuum power* atau hilangnya jaminan payung keamanan yang sepanjang masa perang dingin diberikan oleh kedua negara adidaya tersebut. Di sisi lain munculnya kekuatan baru khususnya China yang pada masa paska perang dingin berupaya untuk mengembangkan kebijakan keamanan yang lebih agresif melalui modernisasi kekuatan militer dan juga pembuatan peta wilayah baru yang menimbulkan permasalahan khususnya dengan negara-negara Asia Tenggara. Meningkatnya ketegangan di

Semenanjung Korea dengan munculnya tantangan persenjataan nuklir Korea Utara juga membawa dampak pada kondisi keamanan di Asia Pasifik.

Sementara itu masalah keamanan tradisional seperti konflik laten antara China dan Taiwan kemudian perselisihan wilayah perbatasan di antara negara-negara Asia Tenggara juga masih mewarnai kondisi keamanan Asia Pasifik pada masa paska perang dingin. Isu keamanan tersebut masih ditambah dengan semakin meningkatnya ancaman kejahatan transnasional atau lintas batas yang berkaitan dengan keamanan non-tradisional.

Sedangkan di tingkat nasional, Indonesia harus mengalami perubahan kondisi keamanan yang banyak dihubungkan dengan terjadinya proses reformasi sejak tahun 1998. Tantangan, Ancaman, Gangguan dan Hambatan muncul dari sejumlah peristiwa baik yang bersifat laten seperti perlawanan gerakan separatis di Aceh dan Papua, kemudian konflik etnis dan agama yang terjadi antar komunal seperti di Sampit, Poso dan Maluku cenderung mengalami peningkatan sejak era reformasi. Masalah keamanan lain adalah menguatnya kelompok fundamentalis maupun radikal yang dihubungkan dengan kepercayaan religi tertentu yang kemudian melakukan aksi-aksi yang mengganggu stabilitas dan keamanan domestik. Bahkan sejak peristiwa 11 September 2001, fenomena Fundamentalisme dan Gerakan Radikal yang terjadi di Indonesia maupun di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Thailand kemudian ditemukan benang merahnya dengan jaringan terorisme internasional.

Karena itulah dalam Bab ke IV Buku Putih Pertahanan Indonesia 2003 dirumuskan sejumlah perkiraan ancaman dan gangguan terhadap pertahanan Indonesia di masa mendatang dalam konteks strategis yang meliputi (1) Terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam negeri; (2) Gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia; (3) Aksi Radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan

dengan kekuatan-kekuatan luar; (4) Konflik komunal kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun dapat berkembang menjadi kondlik antar suku, agama maupun ras/keturunan dalam skala luas; (5) Kejahatan lintas negara seperti penyelundupan barang, senjata, amunisi dan bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, pencucian yang dan bentuk-bentuk kejahatan terorganisasi lainnya; (6) Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain; (7) Gangguan keamanan laut seperti pembajakan dan perompakan, penangkapan ikan secara legal, pencemaran dan perusakan ekosistem; (8) Gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah udara dan terorisme melalui sara transportasi udara; (9) Perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, pembuangan limbah bahan racun dan berbahaya; (10) Bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa

Kemudian dirumuskan pula kepentingan strategis pertahanan Indonesia yang pada dasarnya adalah terwujudnya penyelenggaraan pertahanan yang mampu menjamin upaya pemenuhan kepentingan nasional. Oleh karena itu, maka pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertanakan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar negeri maupun yang timbul di dalam negeri. Berdasarkan perkiraan ancaman serta kepentingan nasional Indonesia, maka kepentingan strategis pertahanan ke depan meliputi kepentingan strategis yang bersifat tetap, kepentingan strategis yang bersifat mendesak dan kerjasama internasional di bidang pertahanan.

Dalam menjamin kepdtngan yang bersifat tetap yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan dan kehormatan bangsa dari setiap ancaman baik yang berasal dari luar maupun yang timbul di dalam negara, maka penyelenggaraan pertahanan dilaksanakan dengan sistem kesemestaan. Melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya, serta sarana dan prasarana nasional sebagai satu kesatuan pertahanan.

Sedangkan kepentingan strategis pertahanan Indonesia yang bersifat mendesak mencakup : (1) Memerangi dan mengatasi ancaman terorisme internasional yang melancarkan aksinya di dalam negeri maupun di luar negeri dengan cara bersama-sama dengan kekuatan dunia lainnya; (2) Mengatasi ancaman dan gangguan separatisme bersenjata yang diprioritaskan pada dua wilayah bergolak yakni di Aceh untuk menghadapi Gerakan Aceh Merdeka, dan di Papua untuk menghadapi Organisasi Papua Merdeka; (3) Menghadapi aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras, agama serta ideologi selain Pancasila yang dapat membahayakan keselamatan dan kehormatan bangsa dan pemerintah; (4) Menyelesaikan konflik komunal dan membantu rehabilitasi di sejumlah daerah bergolak yang terjadi di Maluku, Sulawesi Tengah (Poso) dan Kalimantan (Tengah dan Barat). Selain itu, kepentingan strategis pertahanan negara juga diarahkan untuk mencegah kemungkinan timbulnya konflik komunal baru di seluruh wilayah NKRI; (5) Mengatasi dan mencegah kejahatan lintas negara, yang terjadi di wilayah darat, laut dan udara serta (6) Membantu Pemerintah Sipil (Pemerintah Daerah) dalam mengatasi bencana alam, aksi terorisme, konflik komunal, kerusuhan sosial atau tindakan lain yang menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi pemerintahan dan pelayanan masyarakat (seperti transportasi, layanan pendidikan dan layanan kesehatan).

Indonesia juga kemudian merumuskan kepentingan Kerjasama Internasional dengan dasar bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan dengan dunia luar dalam upaya mewujudkan kepentingan nasionalnya. Oleh Karena itu kebijakan pertahanan juga diarahkan dalam kerangka menjalin hubungan dengan negara-negara lain baik regional maupun global. Kerjasama internasional untuk kepentingan pertahanan negara Indonesia, diletakkan atas prinsip-prinsip kerjasama pemerintah dengan pemerintah, memfokuskan kepentingan pembangunan dan meningkatkan pengembangan sektor pertahanan negara, maupun untuk tujuan menciptakan stabilitas keamanan regional dan global. Dalam kerangka tersebut, sektor pertahanan Indonesia akan senantiasa

menyumbangkan pemikiran strategis dalam memecahkan isu keamanan, maupun melalui keterlibatan secara fisik di bawah bendera PBB. Sedangkan keterlibatan sektor pertahanan di luar PBB dilaksanakan sejauh tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip-prinsip bangsa Indonesia. Keterlibatan sektor pertahanan secara fisik tersebut dilaksanakan atas keputusan politik pemerintah.

Kemudian dalam Buku Putih Pertahanan juga dijelaskan mengenai Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pertahanan Negara. Dalam memasuki abad 21 Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dengan tiga pilar utama yaitu penggunaan kekuatan pertahanan, kerjasama internasional di bidang pertahanan dan pembangunan kekuatan pertahanan. Karena itulah dibutuhkan kebijakan penyelenggaraan pertahanan atas dasar masing-masing pilar. Secara tradisional tentara adalah salah satu kekuatan nasional negara disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan militer. Dalam tugasnya TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). OMP adalah operasi militer dalam menghadapi kekuatan militer negara lawan baik berupa invasi, agresi maupun infiltrasi. OMSP adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan separtisme (*counter insurgency*), tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, tugas kemanusiaan dan tugas perdamaian.

Perkembangan dan kecenderungan dalam konteks strategis memberi indikasi bahwa ancaman tradisional berupa agresi atau insasi sesuatu negara terhadap negara lain sangat kecil kemungkinannya. Kecenderungan keamanan global memunculkan ancaman baru, yakni ancaman keamanan yang bersifat tradisional yang dilakukan aktor non-negara. Ancaman keamanan non-tradisional tersebut pada awalnya merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban publik, Namun pada tingkat eskalasi tertentu ancaman dapat berkembang sampai kepada taraf yang membahayakan keselamatan bangsa.

Untuk mencegah dampak yang lebih luar dan mengatasi ancaman yang mungkin timbul, diperlukan kehadiran kekuatan militer.

Diperkirakan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih banyak kemungkinannya berasal dari ancaman non-tradisional baik yang bersifat lintas negara maupun yang timbul di dalam negeri. Oleh karena itu kebijakan strategi pertahanan Indonesia untuk menghadapi dan mengatasi ancaman non-tradisional merupakan prioritas yang mendesak. Oleh karena itu, kebijakan pertahanan negara untuk menghadapi ancaman non-tradisional dilaksanakan dengan OMSP yang dipertanggungjawabkan kepada TNI sesuai amanat UU No. 3 Tahun 2002. Namun dalam melaksanakan OMSP TNI tidak akan mengambil alih peran instansi pemerintah yang lain dan tidak selalu berperan secara tunggal. Sesuai bentuk ancaman, OMSP dilaksanakan TNI dengan memprioritaskan tindakan preventif dibandingkan dengan tindakan represif untuk menghindari jatuhnya korban dan dampak negatif yang lebih besar.

Namun dalam perumusan penggunaan kekuatan pertahanan, walaupun prakiraan ancaman lebih mengarah pada ancaman non-tradisional, Indonesia tetap akan mengembangkan kekuatan pertahanan dalam upaya menghadapi ancaman tradisional. Bagi Indonesia menghadapi setiap bentuk perselisihan dengan negara lain, akan selalu diupayakan sebesar-besarnya melalui penyelesaian secara damai dan sejauh mungkin menghindari penggunaan kekuatan militer. Perang sebagai bentuk penyelesaian permasalahan akan menimbulkan korban dan penderitaan bagi umat manusia. Sebagai bangsa yang cinta damai Indonesia mengutamakan tindakan pencegahan dengan mengoptimalkan upaya diplomatik dalam kerangka *Confidence Building Measure* (CBM) dan *Preventive Diplomacy*. Penggunaan kekuatan militer untuk tujuan perang merupakan tindakan terpaksa yang harus dilakukan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak membuahkan hasil.

Untuk menghadapi setiap ancaman dan gangguan militer dari luar, kekuatan pertahanan negara disusun dalam Komponen Utama yaitu TNI, didukung Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung yakni segenap sumber daya nasional yang dimiliki bangsa Indonesia. Penggunaan kekuatan

TNI yang meliputi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara serta komponen pertahanan lainnya untuk tujuan perang dilakukan atas keputusan politik pemerintah sebagaimana di atur dalam undang-undang dan disesuaikan dengan sasaran serta tingkat eskalasi ancaman yang dihadapi.

Selain itu dalam Buku Putih Pertahanan juga dirumuskan mengenai langkah-langkah penggunaan kekuatan menghadapi ancaman Keamanan Non-Tradisional. Misalnya dalam memerangi tindak terorisme TNI berpedoman pada Pasa 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai payung hukum. Landasan hukum lain adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Terorisme yang telah disetujui DPR menjadi Undang-Undang. Secara konkrit penanganan ancaman terorisme dapat bersifat mendahului Preemptif), mencegah (preventif, dan menekan (represif). Upaya preemptif dilaksanakan melalui suatu kegiatan infiltrasi atau operasi untuk menghancurkan basis-basis teroris yang berada di wilayah NKRI, termasuk kegiatan untuk mengungkapkan jaringan teroris secara tuntas, Untuk menunjang upaya tersebut maka penyiapan pasukan khusus anti teror yang diperlengkapi dan dilatih maupun peningkatan kemampuan satuan intelijen penting dilaksanakan.

Sedangkan upaya preventif dimaksudkan untuk mencegah wilayah dan segenap bangsa Indonesia, termasuk warga bangsa lain yang berada di Indonesia dari korban keganasan teroris, Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka langkah-langkah kewaspadaan melalui deteksi dan cegah dini oleh TNI baik dalam hubungan satuan maupun individu akan tersu dikembangkan. Dalam rangka preventif, kegiatan pengamanan VIP (*Very Important Person*), obyek dan instalasi vital, sarana dan prasarana publik, fasilitas negara dan fasilitas penting lainnya akan ditingkatkan. Kegiatan yang bersifat menunjang kegiatan deteksi dan cegah dini seperti *surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya akan dilengkapi secara bertahap dan berlanjut.

Kemudian upaya represif dilaksanakan melalui kegiatan counter-terroris dalam bentuk operasi militer untuk menumpas jaringan teroris di

seluruh wilayah NKRI. Operasi militer dimaksud antara lain meliputi serangan komando ke markas atau basis-basis teroris untuk melumpuhkan para teroris, serta pembebasan sandera dan kegiatan operasi lain untuk menumpas teroris secara tuntas. Pelaksanaannya melalui koordinasi lintas instansi dan bila dibutuhkan secara lintas negara.

Sedangkan untuk menghadapi ancaman non-tradisional lain seperti gerakan separatisme, TNI lebih banyak melakukan pendekatan persuasif. Hal ini dimaksudkan untuk menyadarkan pihak-pihak separatis untuk bersatu kembali dalam kerangka NKRI. Sedangkan dalam mengatasi ancaman gerakan radikal maka kehadiran TNI pada dasarnya adalah melaksanakan tugas OMSP dalam bentuk membri bantuan kepada Polri. Apabila spektrum ancaman meningkat menjadi ancaman terhadap keamanan nasional yang ditimbulkan oleh aksi-aksi radikal, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Demikian pula dalam mengatasi konflik komunal dan kerusakan sosial, maka TNI akan melakukan tuga perbantuan kepada Pemerintah Sipil dan Polri. Sedangkan untuk mengatasi ancaman rompakan dan pembajakan di laut maka TNI akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait termasuk mengembangkan kerjasama antar negara karena kejahatan tersebut bersifat lintas batas. Kerjasama yang telah dijalin antar negara adalah dengan Singapura, Malaysia dan Jepang yang akan tersu dilanjutkan dan dikembangkan di masa mendatang dengan memperhatikan kepentingan Indonesia.

Sementara itu untuk mengatasi masalah keamanan dari fenomena imigran ilegal, penangkapan ikan ilegal dan pencemaran laut serta penebangan kayu ilegal dan penyelundupan, maka TNI melakukan patroli pengawasan dengan bekerjasama dengan instansi domestik terkait. Mengingat bahwa ketiga kegiatan tersebut juga bersifat lintas negara maka kerjasama dengan negara lain juga penting dilaksanakan.

Dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan, maka pemerintah Indonesia juga melakukan kerjasama internasional di bidang pertahanan yang merupakan bagian integral dari

kebijakan luar negeri Indonesia sebagai salah satu jembatan membangun rasa saling percaya dengan bangsa-bangsa lain. Keterlibatan Indonesia secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara di dunia yang dilanda konflik dimana dalam pasukan perdamaian tersebut terdapat keterlibatan TNI dan Polri.

Sedangkan dalam rangka turut memelihara stabilitas regional, kerjasama pertahanan akan diprioritaskan pada kerjasama bilateral dengan negara-negara di Asia Tenggara dan dengan negara-negara sub kawasan Asia Pasifik. Misalnya melalui kerjasama dalam kerangka ASEAN maupun ASEAN Regional Forum dan Forum Dialog Pasifik Barat Daya yang merupakan wadah kerjasama kawasan yang penting dikembangkan di masa mendatang. Melalui forum-forum tersebut permasalahan-permasalahan kawasan akan dapat diselesaikan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, perimbangan kepentingan yang dibangun berdasarkan prinsip persamaan hak, saling menghormati dan tidak saling intervensi. Kerjasama bilateral di bidang pertahanan juga diarahkan untuk membangun rasa saling percaya dan memecahkan masalah-masalah keamanan yang dihadapi bersama. Masalah keamanan yang mendesak untuk ditangani bersama adalah mengatasi kejahatan lintas negara dan isu-isu keamanan perbatasan.

Indonesia telah mengembangkan kerjasama pertahanan baik dengan negara tetangga maupun dengan negara besar. Dengan Singapura misalnya Indonesia telah mengembangkan kerjasama pertahanan melalui latihan bersama antar matra, seperti antar Angkatan Darat (SAFKAR-INDOPURA), antar Angkatan Laut (EAGLE-INDOPURA dan antar Angkatan Udara (ELANG-INDOPURA). Selain itu kerjasama pertahanan juga dilaksanakan dalam bentuk perjanjian tentang *Military Training Area* (MTA) yang kemudian dikembangkan menjadi *Defence Cooperation Arrangement* (CDCA). Kemudian dengan Malaysia juga dikembangkan kerjasama pertahanan dalam bentuk latihan militer seperti KEKAR MALINDO, MALINDOJAYA, ELANG MALINDO, AMANMALINDO, DARSASA; sangat bermanfaat

dalam rangka meningkatkan hubungan pertahanan ke dua negara. Indonesia juga mengadakan kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat, Australia, Inggris dan Rusia. Kerjasama pertahanan tersebut baik dalam bentuk pembelian alutsista maupun juga dalam rangka pendidikan dan pelatihan militer.

Dalam upaya mengembangkan kebijakan pertahanan maka dibutuhkan postur pertahanan yang memadai. Dalam Buku Pertahanan Indonesia 2003, disebutkan bahwa Kekuatan Pertahanan saat ini didukung oleh Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Untuk Komponen Utama Personil TNI berjumlah 346.000 orang atau sekitar, 0,15% dari populasi Indonesia terdiri sekitar 265.000 prajurit TNI AD, 57.000 prajurit TNI AL dan 24.000 prajurit TNI AU. Jumlah kekuatan tersebut belum memenuhi kebutuhan. Permasalahan lain yang perlu diperhatikan juga adalah kesejahteraan prajurit yang masih rendah bahkan rata-rata masih di bawah standar. Sedangkan dari alutsista, Indonesia masih relatif tertinggal bila dibandingkan dengan kekuatan utama di Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran pertahanan untuk membeli alutsista.

Sementara itu Komponen Cadangan yang telah terbentuk masih merupakan model yang akan dikembangkan di masa yang akan datang dan masih dalam lingkup kekuatan matra darat. Kekuatan tersebut tersusun dalam kompi-kompi Bala Cadangan yang tersebar di 8 Komando Daerah Militer (Kodam) dengan jumlah keseluruhan 900 orang. Selain dalam bentuk Bala Cadangan, juga terdapat unsur Mahasiswa dan Alumni Mahasiswa yang mendapat pelatihan dasar kemiliteran yang tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa) dan Alumni Menwa. Hingga saat ini jumlah Menwa dan Alumni Menwa masing-masing sekitar 25.000 orang dan 62.000 orang. Di samping yang disebutkan di atas yang tergabung dalam kekuatan nyata Cadangan Pertahanan adalah anggota Veteran berjumlah sekitar 30.000 orang dimana sebagian sudah berusia lanjut.

Sementara itu komponen pendukung adalah segenap warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan Cadangan. Hal tersebut merupakan potensi kekuatan nasional yang bisa dirahkan sebagai pendukung Sistem Pertahanan Semester. Saat ini Komponen Pendukung masih merupakan kekuatan potensial yang memerlukan pengelolaan lebih lanjut sesuai dengan rencana pembangunan nasional.

### 3.5.1.2.2. Dokumen Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan (Strategic Defense Review) Tahun 2004<sup>106</sup>

Dalam Dokumen Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan juga dijelaskan kebutuhan pertahanan Indonesia dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional. Dimulai dari Visi dan Misi Nasional. Dimana tertulis dalam Dokumen tersebut bahwa Visi Nasional adalah :

1. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai.
2. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan dan hak-hak asasi manusia.
3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Sedangkan Misi terdiri atas :

1. Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai
2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera

Kemudin dicantumkan pula Visi dan Misi Pertahanan. Visi dan Misi Departemen Pertahanan dan TNI mempresentasikan arah pembangunan pertahanan negara yang diinginkan dalam membina dan membangun

<sup>106</sup> *Dokumen Strategic Defense Review Kaji Ulang Sistem Pertahanan Indonesia 2004* (Jakarta : Departemen Pertahanan RI, 2004)

komponen utama TNI, komponen cadangan dan komponen pendukung. Secara lebih rinci disebutkan bahwa Visi Departemen Pertahanan adalah menjadi institusi yang handal dalam kajian kebijakan pertahanan negara serta penyelenggaraan pembinaan dan pembangunan komponen pertahanan negara yang tangguh, modern, dinamis dan berwawasan masa depan yang mampu menjaga dan melindungi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan Misi adalah untuk dapat mewujudkan visi pembangunan pertahanan negara dan memerikan peluang untuk perubahan sesuai tuntutan lingkungan strategi, ditetapkan misi pembangunan pertahanan negara sebagai berikut memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan komponen pertahanan negara melalui pengembangan di bidang sistem, personel, material dan fasilitas yang sejalan dengan perkembangan lingkungan strategis.

### 3.5.1.2.3. Dokumen Menata Sistem Pertahanan (Kaji Ulang Pertahanan atau *Strategic Defense Review*) Tahun 2005<sup>107</sup>

Dalam Bab II dokumen Kaji Ulang Pertahanan kembali dijabarkan mengenai analisis lingkungan strategis sebagai dasar pengembangan sistem pertahanan Indonesia. Dalam upaya mencermati perspektif baru tentang Keamanan, dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Globalisasi menimbulkan gejala Fragmentasi-Integrasi dan Internasional-Domestik serta semakin menguatkan kekuatan sentripetal (kekuatan mengikat) maupun sentrifugal (kekuatan memcah) yang berpengaruh di tingkat lokal, nasional, regional bahkan mungkin global.
- b. Muncul sejumlah paradigma baru internasional yang menjadi acuan global seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, lingkungan hidup bahkan pasar bebas. Selain itu juga semakin sulit untuk terlepas dari fenomena transparansi global. Paradigma dan fenomena tersebut harus diwaspadai dan diantisipasi karena dapat mengakibatkan apa yang disebut Humanitarian Intervention, seperti telah pernah terjadi di Indonesia/Timor

<sup>107</sup> *Menata Sistem Pertahanan Kaji Ulang Pertahanan (Strategic Defense Review) 2005* (Jakarta : Departemen Pertahanan, 2005).

Timur pada akhir tahun 1999. Maka pilihan terbaik bagi Indonesia adalah meningkatkan *Nation Building* dan *Character Building* dengan cara memperkuat kekuatan yang mengikat dan melemahkan kekuatan yang memecah.

- c. Keamanan Nasional Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika geopolitik dan geostrategi sejumlah negara di kawasan yang harus dicermati dan disikapi secara cerdas untuk mencari cara bertindak yang terbaik bagi Kepentingan Nasional Indonesia. Dalam kaitan ini nampaknya perlu segera disusun formulasi Kepentingan Nasional Indonesia serta prioritasnya. Integritas Wilayah, Kedaulatan Nasional Indonesia dan Pemulihan ekonomi harus ditangani secara *all out* karena merupakan kepentingan survival Negara dan bangsa Indonesia.
- d. Menyimak perspektif baru di forum internasional tentang keamanan serta dinamika di tingkat nasional berupa transformasi menuju masyarakat yang demokratis dalam wadah negara Kesatuan republik Indonesia, maka diperlukan perspektif baru Keamanan Nasional Indonesia. Keamanan Nasional dalam arti besar mencakup Keamanan seluruh Negara, Bangsa dan Tanah Air sehingga subyek maupun obyeknya tidak tunggal. Obyek Keamanan Nasional meliputi Negara, Bangsa dan Tanah Air, masyarakat dan individu, sedangkan subyeknya meliputi Pertahanan Negara, Keamanan Negara, Keamanan Publik dan Keamanan Individu. Perspektif Keamanan Nasional Indonesia mempunyai visi keluar dan visi kedalam yang sinergis selaras dengan prinsip-prinsip keamanan global antisipatif dan kreatif atas dinamika perkembangan strategis global, regional maupun nasional.

Kemudian analisis lingkungan strategis di tingkat regional yang ditampilkan dalam Kaji Ulang Pertahanan masih berkisar pada ancaman keamanan yang bersifat non-tradisional. Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa pada lingkup regional, interaksi dan dinamika hubungan, peran kepentingan dan kemampuan negara-negara besar dunia mempengaruhi peta keamanan di Asia Pasifik terutama Asia Tenggara. Kecenderungan masalah

keamanan regional antara lain adanya berbagai konflik yang menyangkut klaim teritorial, keamanan jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut sampai ke masalah keamanan non-tradisional. Disebutkan pula Amerika Serikat dengan kekuatan militer, ekonomi, penguasaan teknologi dan dukungan politik dalam negeri, membangun negaranya sebagai suatu kekuatan dunia, mampu mempengaruhi isu keamanan kawasan dan global. China menjadi negara penting di kawasan karena perkembangan ekonomi dan sumber daya manusia yang besar. Jepang negara kuat di bidang ekonomi, pemasok hasil industri, pengimpor minyak dan gas bumi negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpengaruh besar di kawasan tersebut. Sikap politik dan kekuatan Jepang selalu diperhitungkan sebagai penyeimbang stabilitas keamanan kawasan. Uni Eropa sebagai organisasi negara-negara industrim dengan penyatuan mata yang negara-negara anggotanya, semakin memperkuat posisinya di dunia dan menjadi penting bagi negara-negara kawasan Asia tenggara sebagai pasar maupun pemasok bahan mentah.

Kemudian secara khusus juga dijabarkan mengenai Isu keamanan perairan kawasan. Dimana perairan kawasan Asia Pasifik merupakan perairan penting bagi pelayaran internasional. Isu keamanan perairan menjadi perhatian dunia khususnya negara pengguna jalur pelayaran perairan Asia Pasifik. Isu keamanan berupa pembajakan dan perompakan di laut, penyulundupan manusia, senjata, amunisi dan bahan peledak. Isu keamanan di perairan merupakan masalah yang kompleks karena bersifat lintas negara dan teorganisir rapi, juga karena menyangkut beberapa negara dan berbagai kepentingan, sehingga perlu kerjasama antar negara untuk mengatasinya.

Di samping itu juga dibahas Isu perbatasan antar negara. Penentuan harus batas suatu negara terhadap negara lain yang belum tuntas, dapat menjadi potensi permasalahan hubungan antar negara di masa datang. Di Kawasan Asia Tenggara kondisi tersebut dihadapi Indonesia yang berbatasan dengan sepuluh negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Filipina Vietnam, Papua Nugini, Australia, Palau dan Timor Leste. Masalah berkaitan dengan perbatasan antara lain masalah hilangnya pulau yerluat untuk

menentukan batas maritim, timbulnya friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan; masalah pelintas batas; penebangan kayu ilegal; masalah perjanjian batas landas kontinen dan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masalah *illegal fishing*; dan masalah persamaan budaya ikatan kekeluargaan antar penduduk di kedua sisi perbatasan yang menyebabkan klaim terhadap hak-hak tradisional.

Sedangkan analisis lingkungan strategis nasional menghasilkan penjelasan bahwa Keamanan Nasional Indonesia tidak dapat terlepas dari dinamika Geopolitik di Asia Pasifik dan hakekat dari Hubungan Bilateral maupun Multilateral. Bahwa hakekat hubungan bilateral adalah interaksi antara kepentingan nasional kedua negara berupa spektrum pelibatan yang wujudnya memberi dan menerima secara timbal baik, sedangkan hakekat hubungan multilateral adalah suatu forum dimana para negara pihak saling mengemukakan dan mendesakkan kepentingan nasionalnya yang wujudnya aliansi-aliansi adhoc sesuai subyek/topik yang dibahas. Forum Multilateral bukanlah forum mencapai keadilan murni, sehingga bagi Indonesia paling tidak harus memperhatikan geopolitik dan impelementasinya dari negara USA, China, Jepang dan India.

Pada lingkup domestik atau nasional, isu-isu domestik yang terjadi tidak lepas dari pengaruh eksternal (baik global maupun regional) dan pengaruh internal, antara lain, sisi negarit dari heterogenitas suku bangsa, situasi ekonomi yang menyebabkan beban hidup semakin berat, serta faktor politik dan sosial. Akumulasi dari faktor eksternal dan internal tersebut menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional yang pada skala luas dapat mengganggu stabilitas kawasan. Analisis lingkungan strategis tingkat nasional kemudian juga menghadirkan permamasalahan domestik yang potensial untuk menjadi Aancaman tantangan Gangguan dan Hambatan (ATGH) baik keamanan domestik yaitu Gerakan Separatis Bersenjata, Terorisme, Isu Konflik Komunal, Gerakan kelompok radikal, Kerusuhan Sosial, Gangguan Keamanan Laut serta Gangguan Keamanan Udara.

Dalam Kaji Ulang Pertahanan juga dirumusan Perkiraan Ancaman Terhadap Keamanan dan Kepentingan Nasional 5-20 Tahun Ke Depan. Dijelaskan bahwa Ancaman Nasional terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer terdiri dari ancaman tradisional dan ancaman non-tradisional. Ancaman tradisional berupa invasi atau agresi dari luar, sedangkan ancaman non-tradisional terdiri dari ancaman non-tradisional bersenjata dan ancaman non-tradisional tidak bersenjata.

Ancaman non tradisional bersenjata berupa : Separatisme, pemberontakan bersenjata, terorisme bersenjata, pelanggaran wilayah (darat, laut, udara), pembajakan, perompakan dan ancaman bersenjata lainnya. Sedangkan Ancaman non-tradisional tidak bersenjata berupa *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal trading*, terorisme tak bersenjata dan lain-lain. Sedangkan ancaman non militer adalah semua bentuk ancaman yang berada pada dimensi Ideologi, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya (Ipoleksosbud).

Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman non militer, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Berdasarkan perkiraan ancaman hasil *updating* persepsi ancaman *Strategic Defense Review (SDR)* tahun 2004, maka ancaman terhadap keamanan nasional dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. **Ancaman Non Militer.** Berdasarkan Matriks Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dihadapkan Skenario Lingkungan Strategis (*Strategic Environment Scenario-SES*) dengan menggunakan tiga skenario ancaman (*Best, Statusquo dan Worst*) adalah sebagai berikut :
  1. Terganggunya Kerjasama Ekonomi Internasional dalam bentuk Penolakan hasil Produksi, Ketidakpastian Hukum/Kebijakan Pemerintah dan Ketidakpastian Jaminan Keamanan

2. Ketidastabilan ekonomi nasional dalam bentuk Peraturan Daerah yang menghambat pertumbuhan ekonomi; perdagangan ilegal dan tekanan pasar luar negeri
3. Campur Tangan Negara Lain dalam bentuk Kepentingan asing melalui LSM Bayaran, Tekanan terhadap bentuk solusi ekonomi dan Tekanan terhadap proses peradilan.
4. Ketergantungan Terhadap Negara Lain dalam bentuk krisis pangan; rendahnya penguasaan teknologi produksi dan rendahnya kemampuan industri pertahanan
5. Ancaman Terhadap Hukum Nasional dalam bentuk duplikasi hukum nasional, merosotnya moralitas aparat penegak hukum dan independensi antara hukum adat dengan hukum nasional
6. Ancaman Lingkungan Hidup berupa pencemaran limbah, kerusakan ekosistem dan bencana alam.

UUD 1945 mengamanatkan bahwa pelaksana Sishankamrata adalah TNI dan Polri sebagai kekuatan utama sedang rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal tersebut mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan pembelaan terhadap kedaulatan bangsa dan negara, yang menjadi tumpuan kekuatan nasional adalah kedua institusi tersebut mengingat TNI dan Polri mempunyai kekuatan, kemampuan dan penggelaran teorganisir di seluruh wilayah negara. Di samping itu keduanya memiliki perlengkapan dan persenjataan yang dapat digunakan sebagai kebutuhan tempur. Sedangkan rakyat untuk dapat dijadikan sebagai anggota Rakyat Terlatih harus melalui rekrutmen yang diproses dengan beberapa persyaratan.

Sishankamrata pada dasarnya diselenggarakan untuk menjamin rasa aman dan keamanan seluruh masyarakat. Sebelum ancaman menjadi kenyataan, Sishankamrata harus dapat melakukan deteksi dini, menangkap, mencegah dan memonitor kemungkinan timbulnya ancaman (baik militer maupun non militer). Apabila ancaman menjadi kenyataan sistem ini harus mampu menanggulangi dan merehabilitasi akibat yang telah terjadi. Untuk

dapat mewujudkan rasa aman dan keamanan tersebut perlu konsep dan upaya nyata untuk membina, membangun dan menggunakan kekuatan pertahanan.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa Komponen Pertahanan Negara terdiri dari Komponen Utama, Komponen Cadangan dan Komponen Pendukung. Untuk menyelaraskan antara UUD 1945, UU No. 3/2002 dan Konsep Pertahanan Negara, maka dalam menghadapi ancaman non militer (ipoleksosbud) akan mengedepankan Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai sektor unggulan, sedangkan TNI dan Polri sebagai pendukung. Sebaliknya untuk menghadapi ancaman militer, maka TNI dan atau Polri sebagai *leading sector* sedangkan komponen lainnya sebagai pendukung. Untuk mewujudkan konsep ini perlu adanya rumusan pertahanan nir militer sebagai perpaduan konsep konsep pertahanan oleh masing-masing sektor.

#### **b. Ancaman Militer**

Ancaman dari luar negeri dan ancaman yang timbul di dalam negara selalu memiliki keterkaitan serta saling mempengaruhi sehingga sulit dipisahkan berdasarkan sumber timbulnya ancaman. Pemisahan tersebut hanya mungkin dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman. Dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan mengacu pada isu keamanan tradisional dan invasi dan isu keamanan non-tradisional atau ancaman kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Ancaman Militer Non Tradisional. Proses Globalisasi, kemajuan teknologi informasi menimbulkan perubahan besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Akses informasi semakin mudah dan cepat, menciptakan transparansi global, dimana batas-batas fisik kedaulatan suatu negara seakan-akan kabur dan menghadirkan dunia tanpa batas. Kemajuan teknologi memberi kemudahan-kemudahan kepada bangsa-bangsa di dunia dan menimbulkan isu keamanan baru menjadi semakin kompleks, menjadi ancaman keamanan non-tradisional seperti terorisme, konflik etnis, pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, Narkoba, imigran gelap

dan kejahatan lintas negara lainnya yang berkembang dalam skala intra-state maupun inter-state.

Kejahatan lintas negara meningkat cukup tajam, dan berkembang mengganggu keamanan kawasan serta hubungan antar bangsa, Peningkatan aktivitas kejahatan lintas negara antara lain didorong oleh masalah politik, kesenjangan ekonomi dan adanya jaringan berskala internasional yang terorganisir serta menjadi ancaman nyata. Bentuk ancaman militer non-tradisional antara lain :

- a. Ancaman Militer non Tradisional Bersenjata, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini meliputi terorisme bersenjata, konflik vertikal dan horizontal, gangguan keamanan laut.
- b. Ancaman Militer non Tradisional Tidak bersenjata, yaitu ancaman yang menggunakan kekuatan tidak bersenjata yang terorganisir yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Ancaman militer tidak bersenjata ini meliputi Terorisme lewat telepon, Narkoba, imigran gelap dan penyelundupan.

Ancaman Militer Non Tradisional berdasarkan Martiks Persepsi Ancaman Keamanan Nasional dihadapkan Skenario Lingkungan Strategis (*Strategic environment Scenario-SES*) dengan menggunakan tiga skenario ancaman (*best, status quo dan worst*) adalah sebagai berikut :

- a. Pelanggaran perbatasan dalam bentuk pelanggaran wilayah laut (ZEE); pelintas batas (wilayah darat) dan penerbangan gelap dan pengintaian.
- b. Pelanggaran hukum oleh aktor asing dan WNI dalam bentuk penyelundupan manusia, kayu, narkoba, elektronika; penyelundupan senjata dan jaringan terorisme internasional.

- c. Ancaman teknologi dalam bentuk *cybercrime*, ketergantungan teknologi dan *elektronic countermeasure dan deception*.
- d. Disintegrasi dalam bentuk provokasi dan membetuk opini; konflik komunal dan separatisme
- e. Gangguan stabilitas Kamdagri berupa perdagangan obat terlarang; kerusuhan dan pembangkangan massal serta terorisme
- f. Gangguan keamanan laut dan udara dalam bentuk pencurian sumber kekayaan alam; perompakan dan pembajakan
- g. Ancaman nuklir biologi dan kimia (Nukiba) dalam bentuk kimia, biologi dan nuklir.

## 2. Ancaman Militer Tradisional

Ancaman tradisional adalah jenis ancaman yang diperkirakan akan dihadapi Indonesia yang dilancarkan suatu negara dengan menggunakan kekuatan bersenjata baik dalam skala besar maupun skala kecil. Ancaman yang dilakukan terhadap Indonesia diklasifikasikan sebagai agresi dalam bentuk agresi militer yakni pengerahan kekuatan dan kemampuan militer dalam bentuk agresi militer yaitu pengerahan kekuatan dan kemampuan militer suatu negara untuk menyerang Indonesia. Agresi tu yang munhgkin akan dilakukan oleh suatu negara terhadap Indonesia diperkirakan berlangsung melalui beberapa bentuk. Mengacu pada UU No. 3/2002 tentang Pertahanan negara, maka bentuk agresi suatu negara antara lain, invasi, bombardemen, blokade, serangan unsur angkatan bersenjata, keberadaan unsur angkatan bersenjata negara lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bertentangan dengan kesepakatan bilateral atau internasional, tindakan suatu negara yang mengijinkan wilayahnya digunakan negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi ke Indonesia, pengiriman kelompok tentara negara lain yang melakukan tindakan kekerasan atau pengacauan di wilayah NKRI, pelanggaran wilayah, spionase, serta sabotase obyek vital.

- a. **Spionase.** Kegiatan spionase adalah umum dilakukan oleh hampir setiap negara, dan dilakukan di wilayah negara lain. Dengan demikian ancaman jenis ini akan sangat terbuka terjadi di masa mendatang. Dalam jangka panjang, jangka sedang dan jangka pendek sangat besar kemungkinannya dilakukan oleh hampir semua negara yang berkepentingan terhadap NKRI. Hal ini dimungkinkan oleh kepentingan politik seperti dalam rangka kepentingan diplomasi, politik dan pertahanan negara masing-masing.
- b. **Blokade.** Blokade dapat terjadi di tempat-tempat yang bernilai vital, misalnya terhadap pelabuhan, pantai, laut, selat atau terhadap wilayah udara NKRI yang dilakukan oleh negara lain. Blokade hanya mungkin dilakukan oleh suatu negara dengan kekuatan udara dan laut yang sangat menonjol, Dalam hal hanya negara sekelas AS yang mampu melakukannya. Australia atau negara lain sangat sulit untuk melakukannya. Dalam jangka panjang, sedang dan pendek kemungkinan kecil dilakukan oleh suatu negara sekitar kecuali AS sebagai negara adidaya. Itupun dengan alasan yang sangat sangat kuat, misalnya karena kepentingan AS terganggu atau tidak mendapat dukungan dari pemerintah RI, atau karena kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintahnya yang ingin menggunakan wilayah Indonesia namun Indonesia tidak kooperatif, atau akibat embargo militer yang berkepanjangan menyebabkan makin melemahnya kemampuan Alutsista TNI, sehingga sangat mudah diblokade AS demi kepentingan apapun selama menggunakan sebagian wilayah NKRI.
- c. **Bombardemen.** Bombardemen diselenggarakan dalam beberapa metode antara lain *“precision and deep interdiction-whose main target is overland, communication and whose main purpose is to prevent the arrival of enemy forces and supplies in the combat zones.* Jadi tujuan utamanya adalah untuk menangkal gerak maju pasukan musuh dan dukungannya menuju ke suatu daerah pertempuran, Bentuk bombardemen dapat dilakukan di darat, laut dan udara dengan

menggunakan kemampuan dan kekuatan persenjataan yang dimilikinya untuk menggempur kekuatan pertahanan lawan. Dalam UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara, Bombardemen adalah berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan angkatan bersenjata negara lain terhadap NKRI.

Dalam waktu mendatang metode ini dapat dilakukan oleh negara tertentu terhadap kekuatan atau wilayah NKRI. Namun metode ini hanya oleh negara besar yang memiliki kekuatan udara canggih yang mampu melakukannya seperti AS dan Australia, meskipun dalam jangka panjang, sedang dan pendek sekalipun sangat kecil kemungkinan dilakukan. Tindakan tersebut hanya mungkin dilakukan apabila kepentingan Amerika di Indonesia terancam, atau untuk memerangi jaringan terorisme internasional yang diperkirakan sangat kuat berada di Indonesia sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan *Pre-emptive strike*. Sedangkan bagi Australia tindakan ini sangat kecil kemungkinan dilakukan terkecuali apabila pembangunan stasiun roket di Pulau Christmas mendapat reaksi keras bahkan ancaman fisik dan gangguan dari pihak Indonesia, atau apabila terjadi isu Celah Timor makin meruncing dan tidak dapat disepakati kedua pihak, sehingga sangat merugikan kepentingannya,

- d. **Invasi/Agresi.** Kecenderungan yang paling mungkin hanyalah negara dengan kemampuan dan kekuatan militer dan didukung oleh kondisi ekonomi serta pengaruh internasional yang menonjol. Dalam hal ini negara atau negara-negara yang paling mungkin akan melakukan invasi adalah Amerika Serikat dan Australia. Selain itu tidak ada negara lain yang memiliki kemampuan seperti yang dimaksudkan di atas. Inggris, Jepang atau China sekalipun tidak akan mampu melakukan hal tersebut.

Dalam Kaji Ulang Pertahanan juga dijelaskan mengenai Doktrin Pertahanan Keamanan Negara. Doktrin Hankamneg tahun 1991 perlu dikaji ulang selaras dengan reformasi di bidang pertahanan negara. Lahirnya UU Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU Nomor 34 Tahun

2004 tentang TNI mengakibatkan perlunya menata kembali kebijakan pertahanan negara, sekaligus melakukan perubahan mendasar yang harus dijabarkan ke dalam sistem dan kebijakan pertahanan negara, peraturan perundangan dan doktrin serta petunjuk pelaksanaannya. Kebijakan pertahanan negara harus disusun berdasarkan konteks strategis baik global, regional dan nasional, khususnya menyangkut isu-isu keamanan yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Untuk mengatasi isu-isu keamanan tersebut dibutuhkan “kebijakan penggunaan kekuatan, pembangunan kekuatan dan kerjasama internasional bidang pertahanan.” Hal tersebut berpengaruh terhadap pembinaan Doktrin Hankamneg.

Doktrin pertahanan keamanan negara, sebagai suatu ajaran yang telah dipikirkan dengan teliti, diajarkan dan diyakini kemanfaatannya dalam penyelenggaraan pertahanan keamanan negara, sesungguhnya berada pada posisi memberikan arahan untuk menjaga kedaulatan dan menjamin keutuhan negara dan bangsa. Doktrin ini dimaksudkan sebagai pedoman dasar untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran bagi setiap warga negara, serta pedoman kerja bagi aparat pertahanan dan TNI, mengenai penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Tujuannya adalah agar diperoleh kesamaan pola pikir, pola sikap dan pola tindak sehingga terwujudnya daya tangkal bangsa yang tangguh yang sesuai dengan Pancasila UUD 1945 dan konsepsional Wawasan Nusantara serta Ketahanan Nasional.

Dalam rangka mengimplementasikan doktrin pertahanan keamanan negara diperlukan kebijakan-kebijakan pendukung yang harus selalu disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan sistem pertahanan keamanan dengan perkembangan ancaman yang mungkin terjadi, sehingga akan memperkecil timbulnya kegagalan dalam menjaga kepentingan nasional Indonesia.

Dalam hubungannya dengan kepentingan pertahanan keamanan negara dijelaskan bahwa kepentingan strategis pertahanan keamanan negara adalah kepentingan bersifat tetap; kepentingan bersiat mendesak dan kepentingan

kerjasama internasional. Kepentingan strategis tersebut meliputi kedaulatan negara, identitas dan integritas bangsa serta pengamanan pembangunan nasional, harus dapat menjamin peningkatan kesejahteraan dan keamanan bangsa secara terus menerus dalam mewujudkan cita-cita perjuangan sesuai rambu-rambu nilai luhur dan jati diri bangsa. Kepentingan Pertahanan Keamanan Negara terdiri atas kepentingan kesejahteraan dan kepentingan keamanan.

Kepentingan kesejahteraan dikaitkan dengan upaya terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual seluruh rakyat secara merata, yang didukung oleh kesempatan kerja dan usaha yang luas dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan kualitas kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan kepentingan keamanan dihubungkan dengan terjaminnya stabilitas keamanan dan kesinambungan perjuangan bangsa, melalui upaya pembinaan pembangunan nasional serta pemeliharaan perdamaian dunia pada umumnya dan Asia Tenggara pada khususnya. Perwujudan kondisi dinamis damai serta ketentraman bangsa dan negara Indonesia memerlukan upaya yang besar dan peran seluruh masyarakat.

Dalam Doktrin Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai bagian dari Kaji Ulang Pertahanan juga disebutkan mengenai penyelenggaraan perdamaian dalam bentuk hakikat penyelenggaraan perdamaian sebagai upaya, pekerjaan, kegiatan untuk mencapai terciptanya dan terpeliharanya perdamaian. Kemudian Tujuan perdamaian untuk menjamin terciptanya dan terpeliharanya keadaan damai yang kondusif guna terwujudnya kesejahteraan bangsa dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Serta upaya penyelenggaraan perdamaian yang memerlukan kesabaran, kearifan dan keberanian yang meliputi :

1. Penyelesaian pertikaian secara damai. Penyelenggaraan perdamaian diupayakan melalui tindakan-tindakan pencegahan timbulnya pertikaian dengan negara lain dan penyelesaian setiap pertikaian yang terjadi melalui cara-cara damai/diplomasi.

2. Membina dan meningkatkan kerjasama internasional maupun regional untuk memelihara perdamaian dan mencegah terjadinya perang.
3. Membina dan meningkatkan ketahanan nasional maupun ketahanan regional untuk mewujudkan keamanan di seluruh wilayah nasional pada khususnya serta di kawasan Asia Tenggara dan dunia pada umumnya.
4. Membina Rasa Saling Percaya (CBM). Membina dan menjaga kondisi saling percaya dengan negara lain khususnya negara tetangga dengan mengutamakan kepentingan bersama dan saling mengendalikan diri.
5. Membina dan meningkatkan daya tangkal bangsa dalam rangka mewujudkan rasa percaya diri.

Sedangkan dalam pembahasan mengenai Strategi Pertahanan Keamanan Negara dijelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan pembangunan kekuatan komponen pertahanan keamanan negara selalu dikaitkan dengan potensi sumber daya nasional yang tersedia dan dihadapkan kepada kemungkinan ancaman yang akan terjadi. Oleh karena itu strategi pertahanan keamanan negara selalu mempertimbangkan kondisi geografi, demografi, sumberdaya nasional yang tersedia dan perkembangan lingkungan strategis. Strategi Pertahanan keamanan Negara memuat Strategi Pembangunan Kemampuan dan Kekuatan Komponen pertahanan keamanan negara, Strategi Pembinaan Kemampuan dan Kekuatan komponen pertahanan keamanan negara, Strategi Penggunaan Komponen Kekuatan pertahanan keamanan negara serta Strategi Kerjasama Keamanan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

Mengingat jangka waktu 20 tahun cukup panjang, maka resiko terhadap kondisi dan fungsi Keamanan Nasional akan cukup besar apabila ditetapkan strategi yang kurang luwes untuk menghadapi masa dua daawarsa itu. Maka yang dirumuskan adalah arah yang akan

ditempuh sebagai strategi jangka panjang pertahanan keamanan negara. Upaya pertahanan keamanan negara akan senantiasa diselenggarakan dengan membina dan membangun seluruh daya dan kekuatan tangkal bangsa dan negara sehingga setiap saat mampu menghadapi setiap ancaman dalam bentuk dan wujud apapun. Daya dan kekuatan tangkal tersebut berupa TNI sebagai kekuatan utama yang relatif kecil tetapi kuat, dengan cadangan yang cukup dan kekuatan rakyat yang memenuhi persyaratan dapat dikerahkan secara cepat apabila diperlukan.

a. Arah strategi jangka panjang pertahanan dan keamanan negara mencakup arah bagi pembinaan kemampuan pertahanan keamanan negara dan sekaligus bagi pendayagunaan sumber daya nasional bertujuan untuk mendukung upaya pertahanan keamanan negara sebagai berikut :

1. Pembinaan Kemampuan Pertahanan dan Keamanan Negara dalam bentuk (a) Membina kemampuan seluruh rakyat Indonesia sebagai sumber dan pangkal kekuatan pertahanan keamanan negara dalam Sistem Perananan Keamanan Rakyat Semster; (b) Membangun kemampuan pertahanan keamanan negara, yaitu TNI yang kecil dengan kualitas yang tinggi dan (c) membangun kemampuan pertahanan keamanan negara yang lain yaitu kemampuan pengganda dan pendukung.
  2. Pendayagunaan Sumber daya Nasional bagi kepentingan kesmanan negara harus sekaligus memberikan daya dan nilai guna kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat selain memperhatikan manfaat jangka panjang dan kelestarian lingkungan.
- b. Kebijakan pelibatan seluruh kemampuan pertahanan keamanan negara dalam upaya bela negara senantiasa akan didasarkan pada
- c. Strategi penangkalan dan pertahanan mendalam

- d. Strategi defensif aktif untuk aspek pertahanan dan preventif aktif untuk aspek keamanan, serta akan tetap dijiwai oleh semangat perlawanan rakyat semesta.
- e. Untuk mendukung pola-pola strategi tersebut di atas, maka kemampuan yang akan diwujudkan dan dikembangkan adalah kemampuan pertahanan keamanan negara yang dapat menjaga kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasakan Pancasila dan UUD 1945, keamanan dan kesinambungan jalannya Pembangunan Nasional serta hasil hasilnya yang dalam keadaan tertib sipil, keadaan darurat atau perang dapat melaksanakan tugas mengatasi segala bentuk ancaman dengan dukungan logistik yang berlanjut. Kemampuan yang demikian pada garis besarnya memerlukan kekuatan pertahanan keamanan negara yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :
1. kekuatan Darat yang dapat melaksanakan pertahanan wilayah dengan pola pertahanan pulau-pulau besar, dan mengadakan serangan balas atas dasar perlawanan rakyat semester serta menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.
  2. Kekuatan Laut yang dapat melaksanakan pertahanan laut sampai garis batas luar perairan yuridiksi nasional seperti membantu pelaksanaan pertahanan wilayah, serangan balas, pertahanan udara, juga ikut menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.
  3. Kekuatan Udara yang dapat melaksanakan pertahanan udara di seluruh udara wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional serta membantu pelaksanaan pertahanan wilayah, serangan balas, pemeliharaan keamanan laut, juga ikut menjamin stabilitas keamanan dalam negeri.
  4. Kekuatan Non-Militer melaksanakan pertahanan Nir-Militer memelihara stabilitas keamanan dalam negeri, pengelolaan sumber daya nasional dalam mengatasi

ancaman Non-militer yaitu dengan mengedepankan Departemen di luar Departemen Pertahanan sebagai *leading sector*. Dalam hal ini Departemen Pertahanan sebagai pendukung upaya pertahanan Nir-Militer, Pembinaan perlu dilakukan dengan mengembangkan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Pertahanan Moral/mental. Membentuk sikap mental setiap warga negara sejak usia dini agar memiliki rasa patriotisme, nasionalisme, solidaritas nasional, agar terwujud kohesi nasional sehingga menjadi bangsa yang rela berkorban mempertahankan tanah airnya dari segala bentuk ancaman dan gangguan.
- b. Pertahanan Sosial Budaya. Dalam membangun pertahanan sosial, diperlukan pembinaan hubungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. Pertahanan Ekonomi. Kemajuan ekonomi (mikro dan makro) akan membawa masyarakat ke tingkat kehidupan yang lebih baik, yang pada gilirannya akan menumbuhkan kemandirian ekonomi dan mendukung kepentingan pertahanan (kekuatan ekonomi dengan posisi tawar dan daya saing).
- d. Pertahanan Politik. Kebijakan politik luar negeri dan politik dalam negeri harus berjalan selaras dengan Kebijakan pertahanan negara, dalam rangka mewujudkan ketahanan untuk mampu mengatasi campur tangan asing dan kepentingan golongan atau partai politik tertentu.

- e. **Pertahanan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).** Mengembangkan kemampuan Iptek untuk mewujudkan kemandirian Iptek. Upaya alih teknologi tetap menjadi pilihan dengan dukungan kebijakan pemerintah. Peningkatan kemampuan alat peralatan pertahanan bukan saja menjadi kepentingan Dephan dan TNI saja melainkan sudah menjadi kepentingan dunia usaha dan Perguruan Tinggi. Kemampuan teknologi pertahanan merupakan bagian integral dari kemampuan teknologi nasional, Oleh karena itu perlu upaya kerjasama antara Dephan/TNI dengan instansi terkait. Kerjasama ini melibatkan tiga pihak terkait yaitu jajaran Litbang, Perguruan Tinggi dan industri, Menteri BUMN sebagai pembina industri, bekerjasama dengan Menteri Pertahanan dan Menteri RISTEK dalam mewujudkan kemandirian teknologi dan industri pertahanan.
- f. *Civil Defence.* Pertahanan sipil diorganisasikan untuk dapat menyelenggarakan tindakan penyelamatan dan pemenuhan keperluan dasar masyarakat, agar kehidupan dapat berjalan normal. Untuk itu penduduk harus dilatih melakukan tindakan-tindakan pertolongan darurat, pengungsian, pertolongan pertama, pencegahan kebakaran dan pengendalian kerusakan. Selain itu pertahanan sipil dapat juga ditugasi untuk mendistribusikan barang-brang keperluan hidup yang utama seperti air ataupun sembako. Kerjasama Dephan dan Depdagri dalam

memberayakan kemampuan penduduk sipil untuk melindungi diri dan mengurangi kerusakan akibat bencana perang, bencana alam, ataupun bencana pencemaran lingkungan. Kemampuan penduduk sipil tersebut diorganisir untuk mampu melaksanakan fungsi perlindungan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dari penjelasan di atas mengenai Kebutuhan Indonesia mengenai pertahanan dan keamanan kurun waktu 1994 sampai dengan 2006, maka tampak bahwa melalui Penerbitan Buku Putih Pertahanan, Perumusan Doktrin Pertahanan dan juga Kaji Ulang Strategi Pertahanan, Indonesia berupaya untuk terus memperkuat ketahanan nasional di bidang pertahanan dan keamanan melalui langkah-langkah peningkatan keuletan dan ketangguhan khususnya di bidang pertahanan dan keamanan. Peningkatan keuletan dan ketangguhan seperti yang dijelaskan dalam Teori Ketahanan Nasional tercermin dari upaya Indonesia untuk terus meningkatkan kemampuan personil militer termasuk juga mengadakan sejumlah pelatihan kesiagaan sipil seperti yang diamanatkan dalam Doktrin Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Di samping itu baik dalam Buku Putih Pertahanan, Doktrin Pertahanan maupun juga Kaji Ulang Strategi Pertahanan senantiasa diperinci langkah-langkah strategis dalam upaya menjamin pertahanan dan keamanan Indonesia dari Ancaman, Tantangan, Gangguan dan Hambatan baik dari dalam Negeri maupun Luar Negeri. Langkah-Langkah tersebut merupakan operasionalisasi dari upaya untuk meningkatkan ketahanan nasional khususnya di bidang keamanan dan pertahanan.

Kemudian bahwa isi dari Buku Putih Pertahanan dan juga Kaji Ulang Strategi Pertahanan Indonesia juga mencerminkan langkah-langkah Indonesia untuk memperkuat ketahanan regional. Terutama kontribusi Indonesia terhadap pengelolaan stabilitas keamanan dan perdamaian kawasan melalui keikutsertaan dalam Institusi Regional seperti ASEAN, ASEAN Regional Forum, APEC dan juga mendukung Operasi Pemeliharaan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Termasuk juga meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara tetangga dalam upaya mengelola masalah perbatasan maupun juga ancaman keamanan non-tradisional yang pada abad 21 ini

bersifat transnasional sehingga dibutuhkan penanganan keamanan bersama dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara maupun negara-negara yang berkepentingan terhadap masalah keamanan di kawasan Asia Pasifik.

